

ABSTRAK

HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT PADA MASYARAKAT NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA

AGUS ZAINAL
NPM: 1520020020

Anak angkat acap kali tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan ruang sedikit pun bagi anak angkat untuk memperoleh warisan secara langsung atau mutlak. Kondisi tersebut membuat anak angkat seakan terbuang dari keluarga yang mengangkatnya. Keadaan itu menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan hukum, keadilan hukum plus kepastian hukum terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam pun anak angkat diberikan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Alat pengumpul data diperoleh dari data sekunder yaitu dengan dengan cara studi pustaka (*library research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya ditujukan untuk pemeliharaan saja bukan merubah nasab si anak sehingga merubah statusnya menjadi anak kandung yang mengangkatnya. Bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Bahwa dalam agama Hindu Bali, anak angkat laki-laki kedudukannya sama dengan anak kandung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak angkat laki-laki berhak memperoleh warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Besaran jumlah harta warisan yang diterima oleh anak angkat laki-laki dalam perspektif agama Hindu Bali, sama besarnya dengan yang diterima oleh anak kandung.

Kata kunci: hak, anak angkat, harta peninggalan, orang tua, pembaharuan

ABSTRACT

RELIGIOUS CHILDREN'S RIGHTS ON THE TREATMENT OF PARENTS TO ADVANCE IN NON MUSLIM SOCIETY IN PERDATA LEGAL RENEWAL PERSPECTIVE

AGUS ZAINAL
NPM: 1520020020

The adopted child often does not get the rights to the inheritance of his adoptive parents. The Civil Code (KUHPerdato) does not provide the least space for adopted children to obtain inheritance directly or absolutely. This condition makes adopted children seem to be wasted from the family who picked them up. This situation shows that there is no legal protection, legal justice plus legal certainty regarding the rights of adopted children to the inheritance of their adoptive parents. Even in Islamic law adopted children are given the right to the inheritance of their adoptive parents through wasiat obligah.

This research is descriptive analysis that leads to normative legal research, with a research approach to legal systematics. Data collection tools were obtained from secondary data, namely by means of library research. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis.

Based on the results of the study found that in the Civil Code there is no term adopted child or adopted child. Arrangements regarding adopted children can only be found in the Statute Book of 1917 No. 129 of 1917 concerning the Appointment of Children which is a complement to the Civil Code, because in the Civil Code there are no rules governing adopted children. According to Islamic law, the adoption of a child is only intended for maintenance, not changing the language of the child so that he changes his status to the biological child who appoints him. That adopted children can inherit from parents who pick them up, but the important thing is not to harm other existing heirs. Adopted children who are appointed orally cannot inherit from the person who appointed them, but can be given a will that does not deviate from Legitime portie (the absolute part). Whereas in Balinese Hinduism, male adopted children are in the same position as biological children. Based on these provisions, the male adopted children are entitled to inherit from the inheritance of their adoptive parents. The amount of inheritance received by male adopted children in the perspective of Balinese Hinduism is as large as that received by biological children.

Keywords: rights, adopted children, inheritance, parents, renewal

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	12
1. Kerangka teori	12
2. Kerangka konsep	19
G. Metode Penelitian.....	28
1. Sifat penelitian.....	28
2. Jenis penelitian.....	28
3. Lokasi penelitian	29
4. Alat pengumpul data	29
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	31
6. Analisis data	31
BAB II STATUS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
 PERDATA	33

A. Aspek Hukum Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia	33
1. Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia ...	33
2. Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam	46
B. Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata	52
BAB III KEPASTIAN HUKUM HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT	58
A. Hak Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata	58
B. Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat.....	62
1. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUHPerdata	62
2. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum Islam	72
C. Kepastian Hukum Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat	76
BAB IV PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA NASIONAL TERKAIT HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT PADA MASYARAKAT NONMUSLIM	85
A. Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat dalam Perspektif Keadilan.....	85
B. Pembaharuan Hukum Perdata dalam Upaya Perlindungan Hukum kepada Anak Angkat atas Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat	101

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
	A. Kesimpulan.....	119
	B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Pada sisi lain van Apeldoorn mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak.¹ Peristiwa menurut hukum contohnya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit. Kejadian/peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.² Perkawinan misalnya tentu saja memberikan akibat hukum terhadap adanya hak waris bagi anak-anak jika pewaris telah meninggal dunia, jika memang pewaris meninggalkan harta peninggalan.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni yang menjelaskan bahwa harta peninggalan atau *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.³ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta

¹R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4, halaman 251.

²*Ibid*, halaman 252.

³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

⁴Amin Husein Nasution. 2102. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35.

peninggalan seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris di Indonesia sampai dengan saat ini, masih bersifat pluralistik. Dikatakan demikian karena terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku.⁵

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Hukum waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain:

1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia,
2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;
3. Adanya Hukum Adat yang di sana-sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.⁷

Pluralitas hukum kewarisan di Indonesia disamping merupakan sebuah kekayaan khazanah budaya lokal, namun pada sisi lain menimbulkan kegalauan terhadap hukum mana yang akan dipakai ketika akan menyelesaikan perkara waris jika terjadi konflik antara ahli waris. Problematika yang paling sering terjadi tentang konflik perkara waris adalah terkait dengan status kewarisan anak angkat.

Status anak angkat memang menjadi dilema tersendiri terkait dengan status hak warisnya dalam sistem hukum waris di Indonesia. Misalnya, dalam pembagian harta peninggalan untuk anak angkat yang tidak boleh lebih dari sepertiga bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

⁵Ali Afandi.1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta:Bina Aksara, halaman 7.

⁶Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Media Group Bekerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 1.

⁷*Ibid*, halaman 2-3.

Bagian ini diberikan karena secara normatif, anak angkat tidak memiliki hak waris, sebab menurut hukum Islam, ahli waris harus memiliki hubungan hukum dengan pewaris, baik hubungan darah maupun perkawinan.⁸ Pembagian warisan bagi anak angkat tersebut, sering kali menjadi pertentangan oleh ahli waris lain, karena dianggap menyerobot hak-hak ahli waris yang sebenarnya secara hubungan semenda, hubungan perkawinan dan hubungan darah jauh lebih berhak jika dibandingkan dengan anak angkat.

Seperti diketahui bahwa hukum waris termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata, tapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris Barat misalnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan. harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan.

Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.⁹ Jika hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Barat, maka dampak

⁸Kasuwi Saiban. 2011. *Kewarisan Dalam Islam*. Malang: Unmer Press, halaman 11.

⁹Anisitus Amanat, 1989, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal hukum Perdata BW*, Jakarta: CV Rajawali, halaman 52.

yang timbul dari peristiwa itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap munculnya sederet akibat hukum baru.

Dalam hak mewaris, anak angkat tidak akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (testamen) yang di buat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, anak angkat tidak termasuk salah seorang ahli waris dari orang tua angkat, sebab bukan kerabat hakiki, bukan pula terikat dalam persemendaan dan juga bukan budak yang dimerdekakan.

Akibat seringkali terjadi konflik terkait hak waris anak angkat tentu saja harus ditelaah kembali seperti apa penafsiran hukum perdata tentang hak waris anak angkat. Hukum haruslah memberikan kepastian bagi pencari keadilan termasuk anak angkat. Sebagian fakta terlihat sering kali anak angkat ternyata jauh lebih perhatian daripada anak kandung dari pewaris, bahkan sering juga terjadi bahwa orang tua angkat lebih sayang kepada anak angkatnya. Berdasarkan hal itu haruslah dilihat secara lebih bijaksana dari sisi hukum dan kemanusiaan.

Pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II *staatsblad* 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad* 1917: 129, anak angkat

mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk Tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu.¹⁰

Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Menurut Pasal 14 *staatsblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus. Dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka”.

¹⁰Zeila Mochtar, “Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013, halaman 163-164.

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.¹¹

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orangtua yang mengangkatnya baik suami isteri atau janda /duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orangtua kandung. Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orangtua asli atau kandung menjadi anak dari orangtua angkat.

¹¹Soeroso, 2007, *Perbandingan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

Sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.¹²

Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orang tua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya dan anak adopsi tersebut berhak pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orangtua angkatnya. Di dalam Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris antara anak kandung dan anak adopsi.¹³

Ketentuan mengenai sebab seseorang dapat mewarisi menurut hukum waris KUHPerdara adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam Pasal 832 KUHPerdara ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerdara terdapat empat golongan ahli waris:

1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya;
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara dan keturunannya;
3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas;

¹²Ghina Kartika Ardiyati, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

¹³Muderiz Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 4.

4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Pasal 832 KUHPerdota tersebut memberikan penjelasan yang lengkap bahwa anak angkat tidak termasuk golongan yang berhak mendapatkan warisan. Ketentuan tersebut tentu saja sebuah kenyataan pahit bagi anak angkat. Anak angkat yang biasanya diadopsi sejak kecil tersebut tidak memperoleh keadilan dalam hal warisan. Disebabkan tidak diaturnya hak kewarisan anak angkat, maka terjadilah kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu kemudian menjadi celah yang terbuka untuk mengabaikan sebagian hak anak angkat terutama tentang pembagian harta peninggalan. Sebagian fakta terlihat sering kali anak angkat ternyata jauh lebih perhatian daripada anak kandung dari pewaris, bahkan sering juga terjadi bahwa orang tua angkat lebih sayang kepada anak angkatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang penting diteliti untuk mengetahui penjelasan anak angkat dalam perspektif hukum perdata, serta melihat kepastian hukum hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Berpijak dari uraian diatas maka judul yang akan diteliti ialah: **“Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Perdata”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status anak angkat dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana kepastian hukum hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata?

3. Bagaimana perspektif pembaharuan hukum perdata nasional terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status tentang anak angkat dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata.
3. Untuk menganalisis perspektif pembaharuan hukum perdata nasional terkait hakanak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam proposal tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang pemberian waris kepada anak angkat.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu penegak hukum khususnya para hakim, dapat memberikan pencerahan terhadap berbagai dinamika pemikiran yang ada dalam bidang hukum terutama terkait dalam bidang kewarisan. Khusus bagi pihak legislatif, penelitian ini diharapkan memberikan sebuah masukan agar hak-hak anak angkat dapat dimasukkan dalam upaya pembaharuan hukum waris perdata dalam perundang-undangan yang

ada sekaligus sebagai aplikasi terhadap undang-undang perlindungan anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul: **Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Perdata**”, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemberian waris terhadap anak angkat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ferza Ika Mahendra, dengan judul “Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)”. Tesis yang berasal dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008.
2. Jiiy Ji’ronah Muayyanah dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis yang berasal dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010.

3. M. Rizal dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata (Staatsblad 1917 No. 129) Dan Hukum Islam”. Tesis yang berasal dari Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2002.
4. Adi Supranoto dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Ditetapkan Berdasarkan Penetapan Pengadilan”. Tesis yang berasal dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2016.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁴ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁶

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁷ Oleh

¹⁴M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, halaman 80. Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 93.

¹⁵Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua, halaman 23.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14., halaman 7.

¹⁷Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 35.

karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, dan teori perlindungan hukum.

Menurut Jimly Ashiddiqie¹⁸ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²⁰

¹⁸Jimly Ashiddiqie (1), "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 25 April 2017.

¹⁹L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 44.

²⁰Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, halaman. 79-80.

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹ Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²²

1. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang

²¹Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 157-158.

²²Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2009, halaman. 293.

terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²³

Teori keadilan dipelopori oleh Aristoteles.²⁴ Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dibaca dalam karyanya *Nichomachean Ethics, Politics, and Rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nichomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Hal yang sangat penting untuk dipahami dari pandangannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga negara adalah sama di depan hukum.

²³ *Ibid*, halaman 159-160.

²⁴ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politikan yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Menurut Aristoteles, kedua-duanya mengikuti asas antara keadilan distributif dan kolektif. Menurut Aristoteles, kedua-duanya mengikuti asas persamaan, yang dikatakannya harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka di situ tidak akan ada bagian yang sama atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, maka timbullah sengketa. Lihat Satjipto Rahardjo. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 163.

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perbedaan seputar keadilan.²⁵

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.²⁶ Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Untuk terlaksananya hal tersebut maka teori hukum ini harus membuat apa yang dinamakan dengan *Algemeene Regel* (peraturan dan ketentuan umum) yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.²⁷

Apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan pada satu sisi tidak jarang keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.²⁸ Keadilan disini dikonsepsikan sebagai hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dimana hasil

²⁵Carl Joahim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, halaman 24.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid*, halaman 25.

²⁸*Ibid*, halaman 26.

yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.²⁹

Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa pada dasarnya keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³⁰ Filosofi utama dari hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakikatnya. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum.³¹

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*), akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³² Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).³³

²⁹Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 86-87.

³⁰Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 176.

³¹Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", dalam <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.

³²Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 April 2009, halaman 139-140.

³³*Ibid.*

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).³⁴

Pada sisi lain konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk pada posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membuat adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu, Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *justice as fairness*.³⁵ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.³⁶

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expressio*), sedangkan prinsip

³⁴Ugun Guntari, “Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional”, melalui <http://www.ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.

³⁵Pan Mohamad Faiz, *Loc. Cit.*

³⁶Ugun Guntari, “Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional”, melalui <http://www.ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.

kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).³⁷

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.³⁹

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan hal ini yang membedakan konsep negara hukum Indonesia dengan konsep negara hukum yang dianut atau berkembang di negara lain, walaupun sebenarnya pemikiran tentang negara hukum telah mengalami perkembangan dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia. Konsep negara hukum memang dianggap sebagai konsep universal yang diakui bangsa-bangsa beradab, tetapi pada tataran implementasinya memiliki ciri-ciri dan karakter beragam. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi kesejarahan dan falsafah bangsa, faham filsafat dan ideologi politik suatu negara.⁴⁰

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu nilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon,⁴¹ dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara

⁴⁰Tengku Erwinsyahbana, "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan HukumKeluarga Nasional". *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 2012, halaman 22.

⁴¹Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 90.

musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berpedoman pada pendapat tersebut di atas dan didasarkan pada asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing Sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh Sila Ketuhanan.⁴² . Terkait dengan hal ini, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta,⁴³ dikatakan bahwa apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), bagi bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang *nota bene* identik dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Persoalan yang menonjol saat ini adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur, terdapat 3 (tiga) hal tentang pengertian adil⁴⁴, yaitu:

1. "Adil" adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. "Adil" adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. "Adil" adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang

⁴²Tengku Erwinsyahbana, *Op. Cit*, halaman 32.

⁴³Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh, 2008, hlm. 231.

⁴⁴Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, halaman 71.

sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁴⁵ Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan hubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai⁴⁶:

1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
2. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.

⁴⁵Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50.

⁴⁶Kahar Masyhur, *Loc. Cit.*

3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Memaknai keadilan dalam perspektif negara hukum yang berdasarkan Pancasila tentunya tidak dapat hanya didasarkan pada Sila Kedua dan Kelima saja, melainkan harus melihat masing-masing sila dari Pancasila sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena menurut Otje Salman⁴⁷ dalam teorinya (Teori Keseimbangan Hukum) dikatakan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh sila yang tertuang dalam Pancasila saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sebagai suatu kebulatan yang utuh. Sila Pertama adalah jiwa seluruh sila yang merupakan *core* (inti) dari seluruh sila. Sila Pertama mencerminkan nilai-nilai spritual yang paling dalam, maka secara substansial tidak mudah berubah.

Otje Salman⁴⁸ mengatakan bahwa jika dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam Sila Pertama, Ketiga dan Kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung di dalamnya. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan sila-silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa yang dituntun oleh Sila Ketuhanan. Berpedoman pada teori ini, maka dapat dikatakan bahwa keadilan dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang di dalamnya ada keseimbangan kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, hukum nasional harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak, yaitu keadilan

⁴⁷R. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Ke-2, halaman 159.

⁴⁸*Ibid.*

yang menyeimbangkan, menyasrakan atau menyelaraskan kepentingan individu di antara kepentingan yang bersifat umum (kepentingan masyarakat dan negara).

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karena itu keadilan dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menaserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Teori ketiga adalah perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁴⁹

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang

⁴⁹Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁵⁰

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.⁵¹ Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 57.

⁵¹ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 21.

Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵² Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁵³

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.⁵⁴ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.⁵⁵

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum; meliputi:

1. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. subjek hukum; dan
3. objek perlindungan hukum.⁵⁶

⁵²Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁵³Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

⁵⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama, hlm. 262.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 263.

⁵⁶*Ibid*.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁵⁷

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁵⁸

⁵⁷Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.statushukum.com, diakses tanggal 25 November 2017.

⁵⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 264.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁵⁹

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

- b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

- c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Maret 2016.

2. Kerangka konsep

a) Hak waris menurut KUHPerdato

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Dalam konsep pewarisan terdapat subjek hukum, yaitu pewaris sebagai anggota keluarga yang meninggal dan ahli waris sebagai anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum.⁶¹ Pewarisan berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama dan adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, dinyatakan oleh Undang-Undang diwarisi oleh ahli warisnya.⁶²

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggal dari si pewaris, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara dil dan sempurna. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hal itu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.⁶³

⁶¹ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, halaman 194.

⁶² Efendi Perangin. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

⁶³ Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, halaman 95.

Dalam suatu hak waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit le vif*, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.⁶⁴

Menurut Pasal 834 BW seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Sebagaimana ketentuan waris pada umumnya, bahwa pada prinsipnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangis kelahiran. Apabila si anak bersuara atau dengan kata lain bayi tersebut hidup ketika dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mayit.

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap mewarisi. Jelasnya, seorang anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh bagian harta kekayaan dari almarhum ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara yang mengatakan bahwa dengan mengingat akan

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 96.

ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya. Apabila si anak meninggal dunia sewaktu dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah lahir. Hanya oleh Undang-Undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan (Pasal 838).⁶⁵

Pihak-pihak yang tidak berhak menerima harta warisan diantaranya ialah seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal; seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat; atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.

Pada Pasal 912 KUHPerdara ditetapkan alasan-alasan yang menurut Pasal 838 KUHPerdara, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi ahli waris berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian-pemberian dalam suatu testamen/wasiat, kecuali dalam Pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah coba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Apabila si pewaris ternyata dalam surat wasiat/testamen masih juga memberikan warisan kepada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu pengampunan terhadap orang itu.

Kriteria tidak patut dan tidak berhak menerima warisan berbeda dengan penghapusan hak waris atau *hijab*, karena yang menyebabkan timbulnya dua persoalan tersebut berbeda. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan disebabkan oleh tindakan melawan hukum, misalnya orang yang membunuh pewaris. Selain itu juga

⁶⁵ *Ibid*, halaman 95-97.

disebabkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama Islam, misalnya ahli waris yang murtad atau kafir.

2. Penghapusan hak waris disebabkan karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi, misalnya ibu memperoleh 1/6 bagian jika ia mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara. Selain itu juga disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal (pewaris), misalnya cucu laki-laki tidak mendapat bagian dari harta warisan tersebut selama ada anak laki-laki si pewaris.⁶⁶

b) Anak angkat menurut KUHPerdata

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.⁶⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu:

⁶⁶Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Jakarta: PT Refika Aditama, halaman 24.

⁶⁷Muhammad Bushar. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 16.

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdara).
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara.

Saat membahas mengenai “anak adopsi” dan “anak angkat”, seolah terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Secara awam, jika menyebutkan seorang dengan “anak adopsi”, berarti anak tersebut diadopsi (diangkat) secara resmi di pengadilan. Sementara, jika menyebut “anak angkat”, seolah-olah hanyalah diangkat tanpa surat pengangkatan resmi. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁶⁸

R. Soeroso mengatakan adopsi yang diatur dalam BW hanya adopsi atau pengangkatan anak luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290. Pengangkatan anak sebagaimana terjadi dalam praktik di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak dalam arti luas. Dengan demikian, seharusnya BW tidak mengatur pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Hanya saja kemudian, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Stb. 1917 Nomor 129 yang memberikan ketentuan mengenai adopsi bagi masyarakat Tionghoa, dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai

⁶⁸Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia, Edisi IV. Cet. Ke-1, halaman 56.

dengan Pasal 15. Dalam Stb. 1917 Nomor 129 tersebut diatur tentang siapa yang boleh mengangkat, siapa yang boleh diangkat sebagai anak angkat, dan tata cara pengangkatan anak, termasuk di dalamnya syarat-syarat pengangkatan anak.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.” Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁶⁹

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah “anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁷⁰ Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Anak angkat tersebut diperlakukan sebagai anak segi

⁶⁹Irma Devita Pernamasari. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, halaman 118-119.

⁷⁰Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung, halaman 20.

kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.⁷¹

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁷²

Dari pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tuakandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan.

⁷¹Muderis Zaini. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Akasara, halaman 85. Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Lihat Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara, halaman 34.

⁷²D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia, halaman 48.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.⁷³ Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak. Sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris. Sewaktu Islam datang yang membawakan penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab mempusakai, maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab tak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunannya. Unsur pengangkatan anak tidak dapat memaksakan menjadi adanya sebab penilaian nasab.⁷⁴

Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua

⁷³Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

⁷⁴Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Qiyas*, Vol.1 No.1 Tahun 2016, halaman 102.

angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷⁵

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁷⁶

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap perbandingan dan asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian

⁷⁵Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

⁷⁶Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁷⁷

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁷⁸ Sedangkan penelitian terhadap perbandingan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dalam hal ini KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁷⁹

3. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

4. Alat pengumpul data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di

⁷⁷Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, halaman 4.

⁷⁸Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

⁷⁹Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, halaman 96.

perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *mendownload* melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁸⁰:

- a. Sumber data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu.⁸¹
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁸² dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁸⁰Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada halaman 113.

⁸¹Amiur Nuruddin. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media, hlm. 65,

⁸²Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3, halaman 47.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸³

- d. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁸⁴ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁸⁵

5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi

⁸³*Ibid.*

⁸⁴P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

⁸⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33.

dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan akibat hukum perceraian bagi suami yang tidak memberikan nafkah dalam perkawinan terhadap pembagian harta bersama. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang tertulis.

BAB II

STATUS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Aspek Hukum Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁸⁶ Manusia dalam pertumbuhan dan pergaulannya dengan lawan jenis terjadi kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Hubungan perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mencakup hubungan keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, dan perceraian.

Di dalam perkawinan terdapat unsur lahir dan batin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan

⁸⁶Ridwan Syahrani. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 44.

kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁸⁷

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).⁸⁸ Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Keanekaragaman hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak di Indonesia ini akan tampak jika kita teliti secara cermat ketentuan-ketentuan tentang lembaga pengangkatan ini dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik hukum Barat dari *BW* dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih

⁸⁷ Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, halaman 28-29.

⁸⁸ Bushar Muhammad. 1989. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. ke-1. Jakarta : PT. Pradnya, Paramita, halaman 33.

belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema masyarakat, terutama menyangkut masalah ketentuan hukumnya.⁸⁹

Surojo Wignydipuro mengatakan bahwa adopsi merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga di antara keduanya timbul hubungan hukum layaknya orang tua dan anak kandung.⁹⁰ J.A. Nota seperti dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa adopsi adalah suatu intitusi hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain sehingga menimbulkan hubungan hukum seperti orang tua dan anak kandung, baik sebagian maupun seluruhnya.⁹¹

Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut but, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menghendaki bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah

⁸⁹Harry A. Tuhumury, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *Legal Pluralism*, Vol. 3, No.1, Januari 2013, halaman 114.

⁹⁰Mudaris Zaini. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 176.

⁹¹Soerojo Wignjodipoero. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, halaman 117-118.

suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Musthofa Sy., secara garis besar, ada dua tujuan pengangkatan anak. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. Kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjamin hak keagamaan bagi anak, Pasal 39 ayat (3) memberi ketentuan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selain itu, untuk menjamin hak identitas anak, Pasal 40 mewajibkan orang tua angkat memberitahu asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.⁹²

Ada beberapa sebab sehingga lembaga pengangkatan anak berkembang dalam masyarakat, antara lain:⁹³

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan terhadap anak yang mempunyai orang tua kandung tidak mampu, atau anak tersebut sudah yatim piatu;
3. Hanya memiliki anak laki-laki saja atau anak perempuan saja;
4. Sebagai pancingan agar dapat memiliki anak sendiri.

⁹²Mochammad Taqrib, "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Waris di Indonesia", dalam *Jurnal Pusaka*, Edisi Januari-Juni 2014, halaman 45.

⁹³Harry A. Tuhumury, *Op. Cit*, halaman 115.

Sifat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak).
2. Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo dan Pasal 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).⁹⁴

Definisi anak angkat dalam pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Perihal pengangkatan anak atau adopsi ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat

⁹⁴Dari segi hukum ini menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: *Pertama*, Berlaku larangan perkawinan karna hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) *Kedua*, Tindak-tandak pidana yang ditentukan dalam Pasal 221 ayat (2), (menyembunyikan keluarga yang melakukan kejahatan), Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 356 (penganiayaan dalam keluarga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). *Ketiga*, pembuktian dengan saksi dalam Pasal 145 dan 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). tentang hubungan saksi dengan para pihak karena keluarga. *Keempat*, kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asalnya (UU Perlindungan Anak : Pasal 6 ayat (1) berserta penjelasannya, Pasal 40 dan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Ketiga pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam.⁹⁵

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.⁹⁶ Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.⁹⁷

Lembaga adopsi melalui Stb. No. 129 tahun 1917 adalah suatu perkecualian, yang hanya berlaku bagi golongan Tionghoa dan hanya terbatas untuk adopsi anak laki-laki saja. Kekosongan itu dicoba untuk diisi melalui yurisprudensi. Mahkamah Agung sendiri mendorong untuk pengisian kekosongan itu dengan putusan-putusan pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 menyatakan:

⁹⁵Muderis Zaini, *Op. Cit*, halaman 19.

⁹⁶Soeroso. 2007. *Perbandingan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

⁹⁷Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, “Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan” dalam www.ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2017.

“Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak yang ada. Padahal sangat diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan tentang adopsi atau pengangkatan anak, disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah, serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak”.

Di samping itu, ditinjau dari segi internasional lembaga adopsi, menurut *European Convention of the Adoption of Children*, adopsi itu baru diterima sah kalau diberikan melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan, sebagai syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak. Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyeludupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.⁹⁸

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan

⁹⁸Zeila Mochtar, *Loc.Cit.*

anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Di dalam KUHPerdata tidak diatur tentang pengangkatan anak, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II *staatsblad* 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad* 1917 : 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya."

Didasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan

anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.⁹⁹

Akta kelahiran menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya. Sedangkan dalam proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah: Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan: “Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah:

Ayat (2) a. Apabila yang di adopsi itu seorang anak yang sah, persetujuan dari orang tuanya, atau kalau salah satu dari diantaranya telah meninggal terlebih dahulu persetujuan dari orang yang hidup terlama, kecuali ibu telah beralih keperkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau kedua orang tuanya telah meninggal, untuk adopsi seseorang yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.”

⁹⁹Nursyahbani Katjasungkana. 2003. *Bunga Rampai Catatan Sipil*. Jakarta: Primamedia Pustaka, halaman 19.

Ayat (2) b. Apabila yang diadopsi itu anak luar kawin, persetujuan dari kedua orang tuanya kalau ia diakui oleh keduanya, atau kalau salah satu meninggal lebih dahulu, persetujuan dari orang yang hidup lebih lama, atau ia diakui oleh seorang dari mereka persetujuan dari yang mengakuinya, jika sama sekali tidak ada yang mengakui atau telah meninggal dunia, maka untuk adopsi yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.”

Ayat (3) “ Persetujuan dari orang yang akan diadopsi, jika ia telah mencapai lima belas tahun.”

Ayat (4) “ Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, persetujuan dari saudara-saudara laki-laknya yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan apabila mereka ini tidak ada dan atau tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang tinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal sampai derajat keempat.”

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) *Staatsblad* 1917 Nomor

129 disebutkan:

Ayat (1): “Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, bukan ayah atau wakil dari orang yang diadopsi, jika tidak diperoleh, seperti halnya juga kalau terdapat anggota-anggota keluarga yang dimaksud pada akhir ketentuan itu, dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukumnya janda yang hendak melakukan adopsi itu bertempat tinggal.”

Ayat (2): “Atas permohonan janda tersebut, Pengadilan Negeri di luar bentuk acara dan tanpa kemungkinan banding setelah putusan, setelah mendengar atau memanggil dengan patut seorang yang persetujuannya dibutuhkan dan demikian pula orang-orang lain yang oleh Pengadilan Negeri dianggap perlu.”

Ayat (3): “Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”

Ayat (3): “Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”

Ayat (4): “Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia terhadap anggota anggota keluarga sedarah atau semenda yang dimaksud didalamnya, berlaku juga terhadap orang-orang yang harus di dengar di dalam pasal ini.”

Ayat (5): “Tentang izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri itu harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.”

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) *Staatsblad* 1917 Nomor 129

disebutkan:

Ayat (1): "Adopsi hanya dilakukan dengan akta notaris."

Ayat (2): "Pihak-pihak harus menghadap sendiri didepan notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris."

Ayat (3): "Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 Pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk diadopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan."

Ayat (4): "Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang adopsi."

Ayat (5): Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata anak angkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya."

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengangkatan anak menurut *staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah:

1. Untuk melakukan pengangkatan anak disyaratkan persetujuan dari orang dan orang-orang yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dapat mengangkat anak yang merupakan anak sah, anak luar kawin, anak yang sudah mencapai usia limabelas tahun, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda.
2. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak harus menghadap sendiri di depan Notaris. Apabila para pihak berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.
3. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak dapat menuntut agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dihadapan Notaris, dicatatkan pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.
4. Bila tidak dilakukan pencatatan tentang pengangkatan anak pada tepi akta kelahiran anak yang diangkat, maka yang diangkat tersebut tetap saja tidak dapat menyangkal tentang pengangkatan.¹⁰⁰

Menurut Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang

¹⁰⁰Zeila Mochtar, *Op. Cit*, halaman 166.

sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus. Dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-laknya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka.”

Pengangkatan anak perempuan tidak dapat dilakukan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, bahwa “pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akte notaris batal demi hukum”. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tahun 1963, ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.¹⁰¹

Hal yang menarik adalah konsekwensi lebih lanjut dari pernyataan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut yang menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917, yaitu bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, tetapi cukup ditetapkan dalam keputusan Pengadilan saja.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis

¹⁰¹Putusan Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum. 2. Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa. 4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.¹⁰²

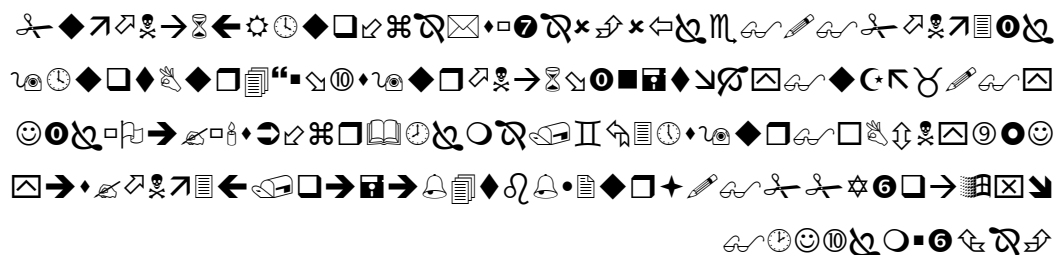
Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Menurut Ali Affandi, adopsi tidak mungkin diatur dalam KUHPerdata karena KUHPerdata memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.¹⁰³ Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, maka:

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11);
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat (1));
3. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;

¹⁰²Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", dalam *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4 Oktober 2013, halaman 140.

¹⁰³Ali Affandi. Tanpa tahun. *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, halaman 57.



Artinya: “Allah tidak menjadikan seorang mempunyai 2 hati dalam dadanya, dan tiada pula menjadikan isterimu yang kamu ceraikan dengan zihar menjadi ibumu dan anak angkatmu anakmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Surat Al-Ahzab (33: 4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain.

¹⁰⁵Sumiati Usman, *Op.Cit*, halaman 142.

Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut dengan *al-tabanni* yang dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau seseorang seperti anak kandung sendiri.¹⁰⁶ Sedangkan Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah "*da'iyyun*", yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.¹⁰⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.¹⁰⁸ Pengertian pengangkatan anak yang demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Secara terminologi, Mahmud Syalthut memberikan dua pengertian yaitu: Pertama, *al-tabanni* adalah mengambil anak orang lain, untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan mengubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama orang tua

¹⁰⁶Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 9. Lihat juga Andi Syamsul Alam, Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 19.

¹⁰⁷Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 5 Desember 2017.

¹⁰⁸Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, halaman 78.

angkatnya, berhak mewarisi, serta memiliki hak dan kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.¹⁰⁹

Menurut Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *al-tabanni* dalam pengertian yang pertama dilakukan berdasarkan keinginan seseorang untuk membantu orang tua kandung yang tidak mampu memberikan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok dan perlindungan yang layak, sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5): 2. Sedangkan *al-tabanni* dalam pengertian yang kedua cenderung menasabkan seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengaburkan asal-usul seseorang dan menimbulkan kesalahpahaman. Larangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab (33): 4-5.¹¹⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak angkat dalam khasanah hukum Islam ialah anak kandung seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk diasuh dan didik secara layak,¹¹¹ akan tetapi ia tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak-hak sebagai anak kandung.¹¹²

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁰⁹Abdul Aziz Dahlan (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, halaman 29-30.

¹¹⁰Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Op. Cit*, halaman 22.

¹¹¹A. Rahmad Budiono. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 187.

¹¹²Safiudin Shidik. 2004. *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Inti media Citra Nusantara, halaman 113.

Menurut Zakiah Darajat, anak angkat ada 2 (dua) macam, yaitu:¹¹³

1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak ini nantinya menjadi orang yang berpendidikan dan berguna.
2. Pengangkatan anak yang didasarkan pada adat kebiasaan yang disebut dengan *tabanni*, yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.

Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sementara di masyarakat Arab sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu Huzaifah mengangkat Salim bin 'Atabah menjadi anak. Salim pun dipanggil dengan panggilan Salim bin Huzaifah. Keadaan ini berakibat turunnya Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang merupakan suatu bentuk teguran dari Allah SWT.¹¹⁴

Oleh karenanya dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan si anak. Yang tidak dikenal, atau secara tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah (a) pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dan (b) dijadikan seperti anak kandung.¹¹⁵

¹¹³Zakiah Darajat, et.al. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, halaman 145.

¹¹⁴M. Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman. 83.

¹¹⁵A. Rachmad Budiono, *Op.Cit*, halaman 192.

M. Budiarto menyatakan bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat, sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹¹⁶ Berdasarkan pemahaman yang demikian, hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat.

Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.¹¹⁷ Dengan kata lain anak angkat tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri. Sementara itu pengertian anak angkat juga terdapat di dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya.

¹¹⁶M. Budiarto, *Op. Cit*, halaman 5.

¹¹⁷M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit*, halaman 83.

Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun KHI. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.

B. Hak-Hak Anak Angkat

Tujuan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap anak angkat. Penetapan dari pengadilan merupakan bukti bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dan memiliki akibat hukumnya yang berdampak terhadap masa depan anak angkat menyangkut segala hak dan kewajiban, tanggung jawab dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Mengenai hal ini perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak dan kewajiban anak angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi.
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - 3) Penelantaran.
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melaksanakan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan social.
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang menjadi objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹¹⁸

2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan negara terhadap anak

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak (anak angkat) Indonesia menjadi sangat penting. Dalam Undang-Undang perlindungan anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai Pasal 26.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin

¹¹⁸Ahmad Kamil dan M. Fuzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 68.

hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bangsa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tua, wali, anak atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang

tuanya tidak diketahui keberadaanya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Pembuatan akta kelahiran tersebut harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan dan pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya.¹¹⁹

C. Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta harapan dan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, setiap anak harus dapat melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹²⁰ Pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara terhadap status manusia sebagai subjek hukum dibuktikan dengan akta kelahirannya. Demikian pula seorang anak diakui sebagai subjek hukum, maka kelahirannya harus dicatat karena merupakan pengakuan negara terhadap status anak. Seorang anak dalam menikmati hak dan memenuhi kewajibannya masih memerlukan bantuan orang tuanya, walinya, ataupun orang lain, karena

¹¹⁹*Ibid*, halaman 71.

¹²⁰Riduan Syahrani. 1989. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 44.

dianggap belum cukup bertindak terhadap hukum. Ketidaccakapan seorang anak menjadikannya dianggap belum dewasa.

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata disebut dengan istilah adopsi. Kata adopsi berasal dari bahasa Belanda "*adoptie*" atau "*adoption*" dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak, yaitu tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang. Istilah adopsi menjadi terkenal di Indonesia dengan keluarnya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi. Meskipun kata adopsi pengertiannya sama dengan pengangkatan anak, namun isi dan pelaksanaannya berbeda. Pada adopsi ditekankan pada kedudukan anak yaitu dari orangtua kandung, setelah diangkat akan berubah menjadi anak yang dianggap secara biologis sebagai anak dari orangtua yang mengangkatnya.

Istilah pengangkatan anak mengandung maksud bahwa dengan pengangkatan anak itu belum tentu harus menyebabkan perubahan status seperti yang dimaksud adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Pada awalnya di dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, hal tersebut dikarenakan menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah.¹²¹

Dengan demikian di Belanda tidak dapat menciptakan keturunan secara buatan atau artificial (*adoption naturam imitatur*), sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang dapat diakui hanya anak kandung sendiri. Itulah yang menyebabkan dalam KUHPerdata Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. Gouw Giok Siong berpendapat bahwa adopsi sudah tidak

¹²¹R. Subekti. 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 21.

mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak hanyalah golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa.¹²² Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum berubah.

Berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, KUHPerdata dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUHPerdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II-nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan orang-orang Tionghoa.¹²³

Pada kenyataannya, secara umum pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:¹²⁴

1. *Adoptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.
2. *Adoptio Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.

Akibat hukum adopsi seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa adopsi di dalam hukum Perdata masuk ke dalam kategori *Adoptio Plena*, yaitu merupakan adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan

¹²²Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 5 Desember 2017.

¹²³Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹²⁴Sudargo Gautama. 1981. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2. Bandung: Alumni, halaman 66.

hukumnya dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang angkatnya. Dimana hal tersebut berakibat anak angkat mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.

Adopsi yang dilakukan menurut hukum Perdata, menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Dimana adopsi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri membawa akibat hukum terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, sehingga dengan terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tersebut akan turut membawa akibat-akibat hukum yang lain, yaitu anak angkat tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memakai nama keturunan dari orangtua kandungnya karena secara hukum anak tersebut telah keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, dan anak angkat tidak lagi berhak menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya.

Kedudukan anak angkat dibedakan atas anak angkat yang tidak diakui dan anak angkat diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah

dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.¹²⁵

Akta kelahiran menunjukan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya” .

Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹²⁵Nursyahbani Katjasungkana, *Loc. Cit.*

berlaku. Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkanseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atauorang lain yangbertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, danmembesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tuaangkatnya.”

Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT

A. Ketentuan Kewarisan Menurut KUHPerdato dan Hukum Islam

1. Ketentuan kewarisan menurut KUHPerdato

Sebagai seorang manusia tentulah memiliki kehidupan yang mana terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang harus dijalani dan pasti terjadi. Berawal dari kelahiran manusia di dunia, hidup dan kemudian kematian. Peristiwa-peristiwa atau proses tersebut merupakan hal-hal yang harus diterima oleh manusia. Tidak dapat ditolak ataupun dicegah agar tidak terjadi di dalam kehidupan.

Berawal dari kelahiran banyak yang akan terjadi setelahnya, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tua, saudara, keluarga atau dapat pula menimbulkan hubungan hukum dengan orang lain. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat. Hak merupakan hal yang harus diperoleh atau dimiliki seseorang, yang tidak dapat dihapuskan dan diabaikan. Dan hak tersebut disertai pula dengan kewajiban yaitu hal-hal yang harus dipenuhi oleh

seseorang. Sehingga bukan hanya ada hak yang harus dituntut namun juga ada kewajiban yang harus dipenuhi.

Setelah kelahiran, di dalam kehidupan selanjutnya terdapat proses perkawinan atau pernikahan. Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan tersebut mengakibatkan timbulnya ikatan⁷² antara dua belah pihak yang artinya juga menimbulkan hubungan hukum. Begitu pula dengan peristiwa kematian (meninggal dunia) yang juga menimbulkan hubungan hukum antar pihak-pihak yang terkait. Perkawinan dan waris memiliki kaitan satu dengan yang lain. Terlihat dari saat terbentuknya ikatan suami-istri merupakan ikatan yang timbul dari sebuah perkawinan. Dengan hal tersebut terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Seorang anggota keluarga pasti akan mengalami kematian. Kematian ini dapat dikarenakan telah lanjut usia, kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain. Peristiwa kematian (meninggal dunia) tersebutlah yang menimbulkan suatu hal berkaitan dengan harta peninggalan. Jika Pernikahan atau perkawinan sudah sah, dan kemudian memiliki harta dalam kehidupan rumah tangganya, lalu salah satu meninggal, maka terbukalah masalah kewarisan. Diperlukan suatu cara atau sistem untuk membagi-bagi harta peninggalan pada keluarganya yang masih hidup. Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai warisan, perlulah diketahui arti dari harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta

peninggalan (harta kekayaan) disebut (pewaris atau *Erflater*)¹²⁶. Harta peninggalan dapat dibagi atau beralih kepada para pihak yang berhak mendapatkannya, harta yang dibagi tersebut disebut dengan harta warisan. Pasal 830 menyebutkan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia, yaitu:

1. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, di mana telah dijelaskan berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak-ibuan.
2. Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.
3. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlukan bagi orang-orang Arab.
4. Hukum warisan *Burgerlijk Wetboek* (buku II litel 12 s.d 18 Pasal 830 s.d 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoa.¹²⁷

Meninjau uraian kalimat di atas, maka dapat dipahami peraturan hukum warisan di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu, hukum adat, Hukum Islam dan hukum *Burgerlijk Wetboek*. Unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai 3 (tiga) persyaratan sebagai berikut:

1. Ada orang yang meninggal dunia;
2. Orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Mengenai hukum waris terdapat berbagai definisi yang berbeda-beda. Beberapa pakar memberikan definisi seperti, menurut Wirjono Prodjodikoro,

¹²⁶ Mohd. Idris Ramulyo (1). 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

¹²⁷ Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 9.

mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan: “Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Pendapat lain diberikan oleh Subekti. Subekti dalam pokok-pokok Hukum Perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti: “Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.”¹²⁸ Jadi hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi.

Hukum waris mengenal asas kematian yang artinya pewarisan hanya berlaku karena adanya kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Kemudian kewarisan menurut KUH Perdata mengenal 3 asas lain, yaitu:

- a. Asas individual. Asas individual (sistem pribadi) dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dalam Pasal 832

¹²⁸M. Idris Ramulyo (2). 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104-105.

- jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.
- b. Asas bilateral. Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.
 - c. Asas penderajatan. Asas penderajatan artinya ahli waris yang sederajatnya dekat si pewaris menutup para ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.¹²⁹

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian.¹³⁰

Sistem hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini. Sebab, harta warisan dalam BW dari siapa pun juga merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam sistem pembagian harta warisan dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh

¹²⁹ *Ibid*, halaman 120-121.

¹³⁰ Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.

pewaris seperti yang diungkapkan dalam Pasal 849 BW, “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.¹³¹ Proses penggabungan masing-masing harta asal menjadi harta perkawinan dalam sistem hukum perdata Barat adalah sesudah terjadinya perkawinan. Harta dimaksud, menjadi harta peninggalan pewaris ketika salah satu pihak meninggal dunia.¹³²

Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1066 BW sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu
- d. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Hukum waris itu sendiripun memiliki tujuan. Tujuan hukum waris perdata Barat adalah bagaimana mengatur peralihan harta kekayaan yang

¹³¹ *Ibid*, halaman 83-84.

¹³² *Ibid*, halaman 84.

ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris, agar tidak terjadinya kesalahan dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Mengenai sumber-sumbernya, waris bersumber dari KUH Perdata mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Hukum waris perdata Barat diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu yang mengatur tentang benda. Hal ini didasari oleh pemikiran: (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2) falsafah hidup orang Barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis. Hal pertama dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang memperoleh harta melalui warisan; hal kedua, dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum waris perdata Barat, yaitu hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan; kecuali itu, dalam hak pakai hasil yang sebenarnya termasuk hukum harta benda, tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, hak seorang anak untuk diakui sebagai anak sah dan hak seorang ayah untuk menyangkut sahnya anak, yang sebenarnya termasuk lapangan hukum keluarga. Hal ini didasari oleh keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.¹³³

Pada suatu hal sudah tentu memiliki unsur-unsur yang menyertainya, begitu juga dengan masalah pewarisan. Diterangkan bahwa pewarisan dalam Hukum Perdata memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.

¹³³ *Ibid*, halaman 82.

2. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris. Pada KUH Perdata terdapat 4 (empat) golongan dari ahli waris, yaitu:
 - a. Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852: "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti". Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.¹³⁴ Pasal 852 a (1) menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/isteri, maka undang-undang

¹³⁴Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 30.

memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II). Dengan demikian, golongan terdahulu menutup yang berikutnya.¹³⁵

- b. Golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Pasal 854 menyatakan: “Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”.
- c. Golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.
- d. Golongan IV adalah keluarga garis ke samping derajat keenam. Pasal 858 menentukan: “Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam Pasal berikut. Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan

¹³⁵ *Ibid*, halaman 31.

dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.

Selanjutnya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris:

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara.
2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jadi, jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III, IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlainan garis.
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 859, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan

satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu
(Pasal 853)¹³⁶

3. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Setelah mengetahui unsur-unsur dari hukum waris. Selanjutnya perlulah diketahui mengenai hal apa saja yang dapat membuat seseorang mendapatkan warisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut.

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.¹³⁷

- b. Secara *testamentir* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat=testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.¹³⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya mengatur mengenai cara untuk mendapatkan suatu warisan, akan tetapi juga terdapat beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang dikatakan tidak patut menjadi ahli

¹³⁶ *Ibid*, halaman 35-36.

¹³⁷ *Ibid*, halaman 4.

¹³⁸ *Ibid*.

waris. Orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris disebut juga dengan *onwaardig*. Mengenai siapa saja yang dikatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*) telah diuraikan dalam Pasal 838 yang berbunyi: “yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Berdasarkan Pasal 838 tersebut, timbullah akibat dari tidak patutnya seseorang menjadi ahli waris, yang dengan tegas dijelaskan pada Pasal 839 yang berbunyi: “Tiap-tiap waris, yang karena tak patut telah dikecualikan dari pewarisan, berwajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan jatuh meluang”

Pengaturan lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 840 yang berbunyi: “Apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut

supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana, menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.”

2. Ketentuan kewarisan menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) tetapi juga terdapat pengaturan mengenai hubungan manusia dengan manusia lain (*hablum minannas*) dan waris merupakan salah satu bentuk dari hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Ilmu yang mengatur tentang beralihnya kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup tersebut didalam Hukum Islam dikenal dengan hukum waris, Fiqih mawaris atau ilmu *faraidh*.

Kewarisan berasal dari kata *warasa* yang mana Menurut etimologi kata *warasa* memiliki beberapa arti, yaitu:

- a. Mengganti, ketentuan ini dijelaskan dalam QS. Al-Naml ayat 16, yaitu:

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا رُسُلَ اللَّهِ وَكَانُوا حَاكِمِينَ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (sulaiman) berkata,
"Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami
diberi segala sesuatu. Sungguh. (semua) ini benar-benar karunia

mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹⁴²

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan hadis Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-Nisa' disamping surah-surah lainnya sebagai pembantu.¹⁴³

Jika pada hukum waris Perdata terdapat 3 asas di dalamnya, maka pada waris islam juga terdapat asas-asas yang dapat dilihat dari ayat-ayat serta Sunnah nabi Muhammad SAW, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Asas ijbari*

Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.¹⁴⁴ Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.¹⁴⁵

¹⁴² Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya, halaman 150-151.

¹⁴³ M. Idris Ramulyo (2). *Op.Cit*, halaman 45.

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, halaman 17.

¹⁴⁵ *Ibid*, halaman 17-18.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan Hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.¹⁴⁶

b. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang ke mana arah peralihan harta

itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.¹⁴⁷

c. Asas individual

¹⁴⁶ *Ibid*, halaman 18.

¹⁴⁷ *Ibid*, halaman 19-20.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini, didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul Fikih disebut “*ahliyat al-wujub*”. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri.¹⁴⁸

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem Hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran agama Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan manusia.

e. Kewarisan semata akibat kematian

¹⁴⁸ *Ibid*, halaman 21.

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut Hukum Islam.

Terdapat unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris yang dalam literatur Fikih disebut *al-muwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.¹⁴⁹

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, pada hakikatnya tidak hanya beralih kepada keluarga saja namun juga dapat beralih kepada seseorang yang pernah membebaskan si pewaris dari

¹⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, halaman 204.

perbudakan. Pewaris di dalam al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa "pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-walidain*), dan kerabat (*al-aqrabin*). *Al-walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan *nasab* dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga pewaris, baik istri maupun suami. Pewaris yang disebutkan diatas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Karena sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang itu dipandang masih hidup. Kepastian meninggal seseorang dimungkinkan secara *haqiqy*, *hukmy*, dan *taqdiry*.¹⁵⁰

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁵¹ Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris sababiyah dan ahli waris *nasabiyah*.

- 1) Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan,

¹⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, halaman 46.

¹⁵¹ *Ibid*, halaman 47.

sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi¹⁵². Suami atau istri, disebut sebagai ahli waris *sababiyah*, karena hubungan pewarisan mereka disebabkan akad nikah yang sah. Apabila suami atau istri meninggal dunia dalam masa ikatan perkawinan yang sah atau setelah cerai dari perkawinan tetapi masih dalam masa idah, mereka tetap saling mewarisi. Bagian warisan suami ada dua jenis yaitu 1/2.

- 2) Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.

- a) *Furu' al-mayyit*. *Furu' al-mayyit* yaitu hubungan *nasab* menurut garis lurus keturunan ke bawah. Yang termasuk ke dalam jenis *furu'*

al-mayyit ini ialah:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Anak perempuan
- (3) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki

- b) *Usul al-Mayyit*. *Usul al-Mayyit* ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan *nasab* garis keturunan ke atas. Mereka ini ialah:

- (1) Ayah
- (2) Ibu

¹⁵² Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 99.

- (3) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas
- (4) Ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu)
- c) *Al-hawasyi* ialah hubungan nasab dari arah menyamping dan mereka terdiri dari:
 - (1) Saudara laki-laki sekandung
 - (2) Saudara perempuan sekandung
 - (3) Saudara laki-laki seayah
 - (4) Saudara perempuan seayah
 - (5) Saudara laki-laki seibu
 - (6) Saudara perempuan seibu
 - (7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki
 - (8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki.
 - (9) Saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan-
seterusnya ke atas
 - (10) Saudara laki-laki seayah dari ayah (paman seayah) dan seterusnya ke atas
 - (11) Anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah
 - (12) Anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.¹⁵³

Ahli waris dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

¹⁵³ *Ibid*, halaman 99-101.

- 1) Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
- 2) Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*.
- 3) Ahli waris *zawî al-arhâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.¹⁵⁴

Perkataan waris yang berasal dari bahasa Arab yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan banyak dikenal dengan ahli waris dan jika dianalisis mengenai ketentuan Hukum Islam, terdapat pula sebab-sebab yang menentukan seseorang menjadi ahli waris dari orang yang telah meninggal (pewaris) yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Karena Hubungan Perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit
- b. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam

¹⁵⁴Mukhtar "Ahli Waris dalam Islam", melalui <http://ahsanuamala.blogspot.com/2011/11/ahli-waris-dalam-islam.html>, diakses 5 Desember 2017.

klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

- c. Karena memerdekakan si mayit. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
- d. Karena sesama Islam. Seseorang muslim meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.¹⁵⁵

Dalam menganalisis ketentuan hukum waris Islam, tidak hanya mengatur mengenai sebab-sebab seseorang mendapat warisan saja, namun juga terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang tidak mendapatkan warisan. Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:

1. Karena halangan kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut.
 - a. Pembunuhan. Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan

¹⁵⁵Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 55-56.

bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.¹⁵⁶ Dalilnya, Hurairah Radhiyallahu'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَرِثُ

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.¹⁵⁷

- b. Karena Perbedaan/Berlainan Agama. Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.¹⁵⁸ Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis yaitu: Usamah bin Zaid Radhiyallahu 'anhu berkata sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

لَا يَرِثُ

- c. Perbudakan. Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapa pun.¹⁵⁹
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab. Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah

¹⁵⁶ *Ibid*, halaman 56

¹⁵⁷ *Ibid*, halaman 56-57.

¹⁵⁸ *Ibid*, halaman 58.

¹⁵⁹ Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, halaman 82.

lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).¹⁶⁰

Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdinding atau terhibab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenal "lembaga hibab".¹⁶¹ Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga hibab tersebut adalah para ahli waris yang terhalang disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat atau lebih utama dan hilanglah hak si ahli waris tersebut dalam mendapatkan warisan dari si pewaris.

B. Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat

1. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUHPerdara

Kewarisan terjadi apabila ada kematian seseorang (pewaris) dengan meninggalkan harta kekayaan (warisan) dan keturunan yang sah dan sedarah (ahli waris). Segala kewajiban perorangan, dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada orang lain. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak yang masih hidup yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris. Masalah hukum kewarisan adalah merupakan suatu masalah yang sangat sensitif karena

¹⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 61.

¹⁶¹ *Ibid*, halaman 62.

menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama dan adat istiadat serta susunan kekerabatan dalam masyarakat.

KUHPerdata membagi dua ahli waris, yaitu ahli waris menurut undang-undang dan menurut testamen (wasiat).¹⁶² Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang menunjuk sebagai ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup. Jadi seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan sedarah dan hubungan perkawinan.

Ahli waris menurut undang-undang ada dua yaitu *ab intertaad* dan *legitimaris*. *Ab intertaad* biasa adalah ahli waris berdasarkan keturunan darah, baik garis lurus maupun garis kesamping sesuai dengan golongan ahli waris dalam undang-undang sampai derajat ketujuh, sedangkan ahli waris *legitimaris* yaitu ahli waris *ab intertaad* dari pewaris yang mempunyai jaminan khusus yaitu mereka tidak boleh menerima dari peninggalan pewaris kurang dari bagian terkecil yang telah ditetapkan untuk mereka (Pasal 912 KUHPerdata).

Ahli waris menurut *testamen* adalah siapa saja yang disebutkan dalam *testemen* dengan tidak mengurangi kekecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdata. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tertentu tergantung kehendak pembuat wasiat. Dengan demikian, ahli waris mendapat bagian warisan berdasarkan penunjukan si pewaris pada waktu ia masih hidup. Terkadang wasiat berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan dan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Namun demikian, kebebasan untuk membuat surat wasiat dibatasi Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwa

¹⁶²Suparman Usman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Darul Ulum Press, halaman 52.

dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak. Dengan demikian yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.

Di dalam Pasal 832 KUHPerdara dinyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Pasal 290 KUHPerdara menyatakan bahwa keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Dengan demikian, pewarisan pada intinya menyatakan hak seorang janda atau duda setelah pasangan meninggal dunia, maka yang hidup terlama menjadi ahli warisnya (janda atau duda yang masih hidup) dan anak keturunannya bila ada.

Pewarisan secara otomatis terjadi pada waktu ada yang meninggal. Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli waris dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si yang meninggal di taruh dulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus meminta keputusan hakim terlebih dahulu dan atas ancaman hukuman

mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.”

Seseorang yang akan menerima waris harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus ada yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara), ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia; dan ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam artian tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau dianggap tidak cakap menjadi ahli waris.

Di dalam Pasal 838 KUHPerdara ditegaskan tentang orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah menunjukkan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat dan mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Ketidakpatutan ini menghalangi ahli waris tersebut untuk menerima warisan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pewaris dan keluarganya dari tindakan pihak lain (ahli waris) yang tidak beritikad baik. Dalam KUHPerdara, peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan, karena apabila ia menerima maka harus

menerima segala konsekuensinya, salah satunya masalah melunasi seluruh hutang pewaris.

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.¹⁶³

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.¹⁶⁴

Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnyaharta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hakmutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Halini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor

¹⁶³R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 97-98.

¹⁶⁴Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, halaman 58.

62/1962Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.¹⁶⁵

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahwasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdata mengenal asas *Ligitimeportie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerdata. Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*. Pasal 913 KUHPerdata, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas.

Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama

¹⁶⁵ *Ibid*, halaman 120.

kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdara dan berlaku "*Ligitime portie*" (Pasal 913 sampai Pasal 929).

Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (*testamen*) yang di buat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

Ahli waris menurut surat wasiat (*testamentair*) yaitu siapa saja yang disebutkan dalam *testamenter* dengan tidak mengurangi kekecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdara tentang kecakapan seseorang untuk membuat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat. Jumlah ahli waris menurut wasiat tidak tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut undang-undang (*ab Intestato*).

Staatsblad 1917 Nomor 129 menentukan bahwa akibat hukum perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 berbunyi: "Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak."
2. Pasal 12 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka."

3. Pasal 14 berbunyi: “Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis ke samping dengan orang yang diangkat”.

J. Satrio lebih lanjut mengatakan bahwa sebagai akibat dari tindakan pengangkatan anak, pembuat undang-undang tersebut membuat fiksi bahwa seakan-akan orang yang diangkat anak, dilahirkan dari perkawinan suami-istri yang mengangkat anak.¹⁶⁶ Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkat anak, maka dalam keluarga, anak angkat berkedudukan sebagai anak sah. Sekarang dengan adopsi itu, pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Stbl. 1917 No. 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang mengangkat anak, yang semula mungkin saja bukan apa-panya (Pasal 12 Stbl. 1917 No. 129). Akibat yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya anak angkat itu sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.¹⁶⁷

2. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Hal ini berarti pengangkatan anak dalam arti sebenarnya yaitu menjadikannya sebagai anak kandung, tidak diakui oleh hukum

¹⁶⁶J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 242.

¹⁶⁷*Ibid*, halaman 245.

Islam. Begitu pula akibat-akibat hukum dari pengangkatan anak sebagaimana tersebut, tidak diakui dalam hukum Islam.

Sebagaimana halnya dengan pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak angkat yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Keluhuran dan ketulusan orang tua angkat terhadap anak angkat biasanya mendapatkan balasan yang sama dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya, sehingga akan membentuk suatu ikatan batin yang erat, sama dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Anak angkat yang dipelihara tersebut setelah dewasa bukan tidak mungkin akan menjadi lebih dekat kepada orang tua angkatnya dibandingkan dengan anak kandung orang tua angkatnya.

Atas dasar itulah, hukum Islam mempunyai suatu kebijaksanaan yang ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Meskipun dalam Pasal 171 huruf H KHI yang menegaskan “status anak angkat hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan” menunjukkan bahwa anak angkat tidak berstatus sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Untuk memberikan rasa keadilan bagi anak angkat,

maka pembuat peraturan juga memberikan suatu jalan agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya melalui konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁶⁸ Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹⁶⁹

Menurut Fathur Rahman, orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.¹⁷⁰ Hukum Islam (KHI) dalam hal ini membuat ketentuan tersendiri, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat.

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi pengangkatan anak seseorang menjadi anak angkat tidak menjadikan anak angkat itu seperti anak sendiri yang mempunyai hubungan darah. Menurut agama Islam, anak

¹⁶⁸ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi. Cet. 1., halaman 371.

¹⁶⁹ Fathur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, halaman 63.

¹⁷⁰ *Ibid*, halaman 63-64.

angkat bukanlah anak kandung. Hal ini dapat dilihat pada Surat Al-ahzab 33 ayat 4-5 yang secara garis besarnya merumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu adalah bukan anak kandungmu;

Dengan demikian, dalam hukum kewarisan Islam tidak mengakui keberadaan anak angkat dalam pengertian adopsi menurut Hukum Barat, yang mana kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung sehingga dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya dan keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat yang menyangkut masalah kewarisan, dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian sukarela dari para ahli waris, pada saat pembagian warisan itu.

Pasal 209 KHI menentukan, bahwa:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Bertolak dari uraian-uraian diatas bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam menimbulkan hubungan hukum yang berupa wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya sehingga berhak mewaris dari orang tua kandungnya.

C. Kepastian Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Menurut KUHPerdata

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.¹⁷¹

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.¹⁷²

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat

¹⁷¹Djaja S.Meliala. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, halaman 224 .

¹⁷²Muhammad al-Ghazali, *Op. Cit*, halaman 104.

dengan orangtua kandungnya, dimana antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 852 KUHPerdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdara.

Masih terjadinya kesemrawutan hukum terkait dengan hak waris anak angkat, tentu saja memberikan ketidakpastian hukum bagi hak anak angkat atas

harta peninggalan orang tuanya. Pembagian harta waris untuk anggota keluarga, termasuk bagian anak angkat, selalu berpedoman pada asas keadilan.¹⁷³ Menurut Agus Yudha Hermoko, suatu aturan atau norma pada hakikatnya memiliki dasar filosofis dan pijakan berupa asas sebagai rohnya. Jika tidak berpijak dalam konteks operasionalnya, maka suatu norma akan janggal. Secara etimologis, asas dalam bahasa Belanda disebut dengan *beginssel* atau *principle* dalam bahasa Inggris, atau *principium* dalam bahasa Latin¹⁷⁴ yang berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan.¹⁷⁵ Dengan kata lain, asas merupakan pondasi di mana segala sesuatu dibangun di atasnya.

Secara terminologis, para ahli hukum memberikan beberapa definisi. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum ialah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu Hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, atau dengan kata lain, asas hukum merupakan kristalisasi hukum positif di masyarakat. Van Eikema Hommer mendefinisikan asas hukum sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi pembentukan hukum yang berlaku. Sedangkan Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat dalam sistem hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷⁶

Paton menyatakan bahwa asas hukum ialah sesuatu yang tidak pernah habis kekuatannya hanya karena melahirkan suatu peraturan hukum, dan mampu melahirkan peraturan-peraturan yang lain.¹⁷⁷ Berdasarkan berbagai definisi di atas, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum bukan

¹⁷³Mochammad Taqrib, *Op. Cit*, halaman 49.

¹⁷⁴Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

¹⁷⁵Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 94.

¹⁷⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 34.

¹⁷⁷Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia, halaman 109.

merupakan aturan kaidah hukum kongkrit, melainkan merupakan latar belakang munculnya peraturan kongkrit, bersifat umum, dan abstrak.¹⁷⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, asas atau prinsip merupakan jantung hukum. Secara rinci Rahardjo menjelaskan bahwa asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan, sehingga semua peraturan pada akhirnya harus bisa dikembalikan kepadanya. Asas juga disebut sebagai alasan lahirnya suatu peraturan (rasio legis). Tanpa menemukan rasio legis, manusia kurang memahami arah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dengan menemukannya, manusia bisa menyusun suatu bangunan atau tatanan hukum lanjutan yang konsisten dengan peraturan-peraturan sebelumnya.¹⁷⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum menjadikan sebuah sistem hukum menjadi fleksibel sebab ia mengakui adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan umum.¹⁸⁰ Menurut Marwan Mas, ada 3 (tiga) fungsi pokok asas hukum dalam sistem hukum, antara lain:¹⁸¹

- a. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Misalnya, dalam perkara perdata, hakim hanya mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak kepadanya. Dengan demikian hakim menjaga konsistensi asas pasif dalam Hukum Acara Perdata;
- b. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum. Misalnya, jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan Peraturan Daerah, maka yang diberlakukan asas *lex superior derogate lex inferior*;
- c. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam peraturan maupun sistem peradilan. Misalnya asas personalitas keislaman yang terdapat dalam Pengadilan Agama, atau asas persamaan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas hukum memiliki kaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya selalu merujuk dan diselesaikan dengan asas hukum. Asas hukum juga dapat mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif.

¹⁷⁸Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 35.

¹⁷⁹Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, halaman 45-47.

¹⁸⁰Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 36.

¹⁸¹Marwan Mas, *Op. Cit*, halaman 110-111.

Muhammad Alim menyatakan bahwa dalam setiap hubungan, khususnya hubungan perdata, harus ada kesamaan dalam arti tidak boleh ada unsur penindasan, pemaksaan, penipuan, bahwa kekhilafan untuk memperoleh keuntungan, dan hasil yang diperoleh harus seimbang dengan usaha yang dilakukan. Asas ini ditarik dari Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Najm (53):39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.¹⁸²

Menurut Fathurochman, keadilan distributif yang proporsional, sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan, untuk menerapkannya banyak persoalan yang harus dipenuhi, salah satunya kontribusi yang diberikan seseorang harus terukur, ketika tolak ukur antara input dan output sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Proporsi akan berubah berdasarkan upaya atau kontribusi yang diberikan seseorang. Misalnya, seorang konsultan yang memberikan saran kepada sebuah lembaga akan dibayar mahal sekalipun saran tersebut belum ada hasil yang nampak. Pembayaran yang mahal ini dikatakan adil karena sebanding dengan upaya yang dilakukan.¹⁸³

Menurut Amir Syarifuddin, keadilan jika dihubungkan dengan hak memperoleh materi, khususnya kewarisan diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara perolehan dengan keperluan dan kegunaan.¹⁸⁴ Lebih lanjut ia menyatakan bahwa hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris pun berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap

¹⁸²Muhammad Alim. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS, halaman 370.

¹⁸³Fathurochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, halaman 36.

¹⁸⁴Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, halaman 24.

keluarganya.¹⁸⁵ Berangkat dari pandangan Amir Syarifuddin di atas, bagian yang boleh diterima oleh anak angkat tidak mutlak dari harta peninggalan orang tua angkat akan tetapi anak angkat hanya mendapat 1/3 bagian dari total harta peninggalan orang tua angkat, bahkan bisa lebih mempertimbangkan kontribusi dan jasa yang ia berikan kepada orang tua angkat.

Aristoteles dengan konsep keadilan distributifnya apabila dikaitkan dengan pembagian harta peninggalan bahwa bagian seseorang dalam waris diberikan sesuai dengan jasa-jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan hukum maupun darah dengan si pewaris dipandang tidak adil jika ia hanya diberikan “wasiat wajibah” dari total harta pusaka, padahal ia turut merawat orang tua angkatnya sampai meninggal dunia, termasuk mencari modal atau turut serta mengembangkan usaha milik orang tua angkatnya. Seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan upaya yang dilakukannya masing-masing, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upaya yang ia dilakukan berbeda.¹⁸⁶

Secara sosiologisnya, anak angkat adalah anak yang secara sengaja diambil karena adanya kepentingan orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, kepentingannya adalah sebagai pengganti bagi anak kandung dalam tujuan kasih sayang. Sehingga wajar-wajar saja anak angkat tersebut memperoleh suatu hak kenikmatan harta dari orang tua angkatnya. Dengan asumsi tersebutlah dan ditambah dengan kebolehan adanya wasiat dalam

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Mochammad Taqrib, *Op. Cit*, halaman 53.

hukum Islam, para yuris Islam di Indonesia memuat pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Kompilasi Hukum Islam di sini telah menjembatani kenyataan demikian untuk menempatkan anak angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan. Dari hal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa seharusnya sebelum meninggalnya orang tua angkat, maka ada baiknya orang tua angkat itu membuat wasiat atau memberikan wasiat harta kepada anak angkatnya. Dapat dimaklumi pula bahwa Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang memberlakukan wasiat wajibah ini merupakan alternatif jalan terakhir jika orang tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya.

Adanya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan jembatan yang menutupi ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak terjadi saling mewarisi, karena memang tidak ada ketentuan saling mewarisi antara keduanya. Anak angkat yang telah sangat berjasa, merawat dan memelihara orang tua angkat tidak mendapat harta peninggalan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, atau sebaliknya, kecuali orang tua angkat atau anak angkat itu telah lebih dahulu membuat wasiat. Bila tidak ada anak angkat atau orang tua angkat itu tidak mendapat harta apapun. Hal ini telah terasa tidak adil dalam masyarakat. Anak angkat yang telah mengabdikan begitu lama untuk kemaslahatan orang tua angkat atau sebaliknya tidak mendapat bagian harta.

Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum, maka Pasal 209 memodifikasi sesuatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak

angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris mewarisi. Modifikasi ini berujud bahwa anak angkat berhak mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah. Demikian juga sebaliknya orang tua angkat berhak mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan anak angkatnya berdasarkan pada konstruksi wasiat wajibah.

Konteks kenyataannya, wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sangat tidak jelas, di mana bukan hanya pembagian sistem wasiat wajibah akan mengurangi jatah bagian ahli waris yang berhak, tetapi juga memungkinkan konflik baru antara ahli waris dan anak angkat. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum, setidaknya doktrin hukum berdasarkan metode penemuan hukum agar kasus dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat jelas dan mudah diterapkan. Anak angkat, pada sisi lain juga memiliki kewajaran dan kepatutan untuk mendapatkan haknya dari orang tua angkatnya sebab ia tercipta karena adanya kultur dalam masyarakat.

Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia adalah tututan perasaan keadilan hukum masyarakat. Sangatlah kecewa anak angkat atau sebaliknya yang telah bertahun-tahun bersama orang tua angkat atau anak angkat, merawat dan menjaganya, akan tetapi ketika orang tua angkat atau anak angkat meninggal dunia, anak angkat harus angkat kaki dari rumah yang selama ini ditempati bersama. Anak angkat harus meninggalkan rumah, karena harta itu harus diserahkan kepada ahli warisnya. Perasaan kecewa ini pula akan dialami oleh orang tua angkat yang telah meninggal, karena tidak sempat membalas jasa-jasa anak angkatnya.

Dasar dari mengapa di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat atau anak angkat adalah dikarenakan tanggung jawab terhadap anak angkat tidak hanya terletak pada tanggung jawab untuk memberi nafkah dan perawatan, melainkan kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, karena itu terkadang nama ayah angkat selalu melekat kepada anak angkatnya sebagai identitas diri pribadi. Anak angkat dianggap mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung terhadap kedua orang tuanya dan begitu pula sebaliknya. Atas dasar inilah maka antara anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan dianggap sebagai mahram (orang yang haram dinikahi).¹⁸⁷

Status anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga dengan keluarganya.¹⁸⁸ Meskipun pengangkatan ini tidak merubah status nasab anak tersebut, akan tetapi hal itu tidaklah mengurangi nilai dan makna pengangkatan tersebut, terutama hal ini bisa dilihat dari:

1. Pengangkatan anak menciptakan hukum adanya peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari yang pada mulanya di bawah kekuasaan orang tua kandungnya yang berpindah kepada orang tua angkatnya.
2. Tanggung jawab biaya pendidikan yang pada mulanya mesti ditanggulangi oleh orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak tidak memadai kalau hanya dengan persetujuan kedua belah pihak saja, meskipun telah diresmikan melalui upacara adat dan agama, tetapi mesti diperoleh lewat ketetapan pengadilan, dengan demikian status anak akan menjadi jelas dan sah di mata hukum.
4. Adanya status anak angkat yang sah akan menciptakan akibat hukum dalam kewarisan, dimana anak akan memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta. Demikian juga dengan hal sebaliknya yaitu bila

¹⁸⁷Satria Effendi M. Zein, "Analisis Fiqih Analisis Yuripsrudensi", dalam *Mimbar Hukum* No. 37 Thn. IX, 1998, halaman 92.

¹⁸⁸Pagar, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 54. Tahun 2001, halaman 9.

si anak yang meninggal dunia maka si orang tua angkat juga akan dapat memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta dari harta si anak angkat.¹⁸⁹

Wasiat wajibah di Indonesia dijadikan sebagai dasar oleh Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberikan wasiat oleh pewaris (anak angkatnya). Menurut Kompilasi Hukum Indonesia, penerima wasiat wajibah adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkat tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan demikian, wasiat wajibah untuk orang tua angkat atau anak angkat diperlukan, meskipun keberadaannya tidak harus dibuka selebarnya sehingga mempengaruhi bagian *fard* para ahli waris, dan tidak perlu juga harus dihapus ketentuan wasiat wajibah dalam rangka perwujudan apresiasi terhadap pewaris sebagai orang tua angkatnya yang mengangkatnya karena kasih sayang.

Berdasarkan teori keadilan, maka apa yang telah digariskan oleh para ulama klasik sebenarnya telah tepat. Wasiat wajibah seharusnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris karena adanya dinding/penghalang (*hijab*). Bukan berarti pula ahli waris yang non muslim dapat diberikan harta melalui wasiat wajibah. Dasar hukumnya adalah *nash* yang mengatakan tidak boleh mewarisi antara muslim dengan non muslim, serta tidak boleh ahli waris juga mendapatkan wasiat. Keadilan harusnya ditegakkan

¹⁸⁹ *Ibid*, halaman 11.

dengan melihat dasar hukum tertinggi, bukan sekedar menegakkan keadilan semata.

Harus diakui bahwa keadilan merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang bersifat universal. Melalui sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yaitu: (QS. 4: 58, 135), (QS.5: 8, 42), (QS. 7:29, (QS. 16: 90), (QS. 42: 15), (QS.49: 9), dan (QS. 57: 25). Islam memerintahkan penegakan keadilan bagi semu orang. Bahkan, Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan meskipun terhadap non muslim selama mereka tidak menyerang dan mengusir umat Islam.

Menurut Aristoteles, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesetaraan. Kesetaraan tersebut perlu dibedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang dimaksud sekarang dengan prinsip kesetaraan di depan hukum bagi semua warga (*equality before the law*). Sementara kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.¹⁹⁰

Berdasarkan teori keadilan hukum berdasarkan kesetaraan proporsional, maka ketentuan hukum yang memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak mendapatkan harta warisan sangat tepat. Logikanya, apabila hak waris anak angkat terhalang untuk mendapat warisan karena bukan anak kandung, maka seharusnya menjadi sebuah keniscayaan untuk tidak memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat. Pemikiran lain yang terkait dengan posisi anak angkat untuk mendapat hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya adalah sang anak merupakan penyelamat psikologis dari orang tua angkatnya. Anak angkat dapat menjadi kebanggaan orang tua angkatnya.

¹⁹⁰C. J. Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung Nuansa dan Nusamedia, halaman 24.

Anak angkat juga dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tua angkatnya. Tidak tertutup kemungkinan juga bahwa anak angkat lebih berbakti kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layaklah anak angkat diberikan hak untuk memperoleh harta peninggalan orang tuanya baik dalam bentuk wasiat wajibah atau pun hibah wasiat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁹¹

Pemberian wasiat wajibah atau hibah wasiat kepada anak angkat merupakan salah satu alternatif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Anak angkat yang status hukumnya diakui oleh undang-undang seharusnya diberikan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak dan tidak boleh sama dengan yang diterima oleh anak kandung, namun hak atas harta peninggalan itu tetap harus diberikan.

Adanya beberapa regulasi yang mengatur tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan tersebut menunjukkan bahwa Negara melalui undang-undang, hadir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum

¹⁹¹Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

bagi anak angkat. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau meletakkan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

¹⁹²Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media, halaman 157-158.

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan.

BAB IV

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA NASIONAL TERKAIT HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT

A. Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia

Pengangkatan anak ternyata tidak hanya menimbulkan akibat sosial, seperti ikatan emosional dan kasih sayang yang “menghilangkan” asal anak yang bukan dari darah biologisnya. Akan tetapi akibat lanjutannya adalah timbulnya pengakuan orang tua angkat terhadap hak anak angkat atas harta peninggalannya, yang kemudian berujung pada pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung).¹⁹³

Adanya kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan telah diatur dalam setiap stelsel hukum (Islam, Barat dan Adat keuda terakhir tidak dibahas). Menurut KHI, angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sedangkan Pasal 209 mengatur ketentuan kewarisan anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 ayat (1) mengatur wasiat wajibah anak angkat terhadap orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 bahagian dari harta warisan anak angkatnya. Pasal 209 ayat (2) menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua anaknya.¹⁹⁴ Ketentuan ini menunjukkan anak

¹⁹³Thahir Azhary, “Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal Pengangkatan Anak”, dalam , dalam *Suara Uldilag* Vo. 3 No.XI, Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, 2007, halaman 2.

¹⁹⁴Zainal Abidin Abu Bakar. 1991. *Himpunan Peraturan Perundangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al Hikmah, halaman 145.

angkat tidak mungkin memperoleh harta peninggalan dengan jalan warisan, sehingga dibentuk lembaga wasiat wajibah.¹⁹⁵ Jadi wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (KHI) terhadap orang tua angkat agar, sebagai jalan untuk harta peninggalannya kepada anak angkatnya. Dalam kajian teori hukum, KHI melakukan *diskresi* hukum¹⁹⁶ terhadap wasiat wajibah yang dalam fiqh klasik hanya untuk cucu dan non muslim.

Ketentuan dalam KHI ini menimbulkan problem filosofis yang berkaitan dengan keadilan. Karena dalam hukum kewarisan Islam (*fiqh*), telah ditentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan telah ditetapkan pula bagiannya masing, yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, yang disebut dengan *dzawil furudl* dan *dzawil arham* dengan ketentuan porsi bagiannya masing-masing.¹⁹⁷ Sementara itu anak angkat tidak termasuk dalam kedua golongan ahli waris tersebut. Oleh karena itu, ketika anak angkat ditetapkan berhak atas sebagian harta peninggalan orang tua anaknya, boleh jadi akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi bagian ahli waris yang termasuk *dzawil furudl* atau *dzawil arham*. Di sinilah diperlukan jawaban filosofis problematika keadilan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Seperti diuraikan di atas, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya dengan besaran maksimal 1/3 bagian. Di samping Kompilasi Hukum Islam yang telah menetapkan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan terdapat pula yurisprudensi yang menetapkan anak angkat

¹⁹⁵Dede Ibin, "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Nonmuslim", dalam *Mimbar Hukum* No. 26, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2003, halaman 34.

¹⁹⁶Erlyn Indarty. 2006. *Diskresi Hukum Kepolisian*. Tidak Diterbitkan untuk kalangan sendiri Akpol, Semarang, halaman 23.

¹⁹⁷Fathurrahman. 1980. *Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Al Maarif, halaman 23.

memperoleh 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, melalui wasiat wajibah.¹⁹⁸

Putusan Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998 M. yang telah menjadi yurisprudensi tersebut mengadili kasus sengketa warisan antara dua orang isteri, tetapi di dalamnya terdapat anak angkat yang kemudian ditetapkan memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut bagi penulis merupakan upaya konkretisasi kaidah hukum dalam KHI. Sehingga keraguan terhadap landasan yuridis KHI tidak menjadi soal, karena sudah ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai hukum positif, bukan lagi sebagai hukum tidak tertulis. Dengan demikian apabila mereka dihadapkan pada kasus kewarisan anak angkat, maka akan menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai salah satu landasan hukumnya.

Pewarisan adalah proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan material maupun non-material dari generasi yang satu kepada keturunannya. Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa dalam pewarisan itu meliputi unsur-unsur :

1. Subjek, yaitu orang yang akan mewariskan harta bendanya yang disebut pewaris;
2. Ahli waris, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak menerima, menikmati, dan mengurus harta warisan yang diterima dari pewaris;
3. Objek warisan, yakni sejumlah harta benda material maupun non material. Harta mana yang akan diwariskan kepada ahli waris yang disebut harta warisan;
4. Proses pewarisan, yaitu proses dan prosedur tanah itu diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris mereka.¹⁹⁹

Di Indonesia, hukum yang mengatur pewarisan bersifat pluralis karena ada empat sistem hukum yang mengatur yaitu sistem hukum adat, sistem hukum

¹⁹⁸Putusan Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998 M.

¹⁹⁹Harry H. Tuhumury, *Op. Cit*, halaman 121.

barat yang diatur dalam BW, sistem hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, serta sistem hukum Nasional bersumber pada undang-undang dan yurisprudensi. Dalam Sistem Hukum Adat pun bersifat plural, karena dipengaruhi oleh bentuk dan sifat persekutuan hukum dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, dan berkembang.

Kedudukan Anak Angkat sebagai ahli waris ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 37 K/ Sip/ 1959 yaitu Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang pusaka atau harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi, selain itu juga hal terpenting dalam masalah warisan ini adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam warisan itu sendiri, antara lain:

1. Peninggal Warisan, yaitu orang yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan;
2. Ahli Waris ; adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Adapun pengertian dari ahli waris yang lain adalah mereka yang menerima harta peninggalan suami atau istri dan anak-anak yang terdiri dari :
 - a. Anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya secara sah ;
 - b. Anak tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ;
 - c. Anak tiri, adalah anak yang bukan hasil kandungan suami-istri yang bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan dikarenakan sebelumnya telah terjadi perkawinan di salah satu pihak;

- d. Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunannya dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan.
3. Harta Warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewarisan setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan waris saja. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang menjadi hak ahli waris.

Di dalam hukum waris Islam telah diatur secara rinci hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris.²⁰⁰ Proses peralihan semacam itu dikenal dengan "*Fara'id*" yaitu ilmu tentang pembagian pusaka atau ilmu tentang ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris. Secara teoritis, warisan memiliki beberapa unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, yang ketiganya memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar.

Ditinjau dari sudut hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, masalah waris pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal yang menghubungkan keturunannya kepada garis ibu, patrilineal yang hanya menghubungkan keturunan kepada bapak dan bilateral atau parental, yang menghubungkan keturunannya kepada bapak atau ibu, oleh karena sebuah

²⁰⁰Sudarsono. 1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994). Dalam kewarisan Islam, ada empat prinsip pokok yaitu pertama, prinsip yang berkaitan dengan anak-anak, bapak dan ibu dari pewaris ; kedua, prinsip mengenai suami-istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan; ketiga, prinsip yang menyangkut maw li dan keempat, prinsip yang berkaitan dengan masalah kal lah.

keluarga telah melahirkan satuan-satuan kekeluargaan yang besar.²⁰¹ Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesia (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu: Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁰²

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum Barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung.

Pada kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam QS. al-Ahzab 4 dan 5. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) menyatakan: "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan."

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk

²⁰¹Hazairin. 1983. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, halaman 11.

²⁰²Abdurrahman. 1993. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo, halaman 3.

golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI ayat (1 dan 2), yaitu:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah. Sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya

Apabila dilihat dari landasan filosofis bangsa ini yaitu Pancasila, maka pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya sangat tepat. Landasan filosofis adalah landasan yang dibangun atas dasar pemikiran yang mendalam, dalam kerangka mencari kebenaran secara sistematis dan metodis dengan cara melakukan refleksi makna yang hakiki dari keseluruhan fenomena yang ada, sehingga menemukan kebenaran yang bersifat logis.²⁰³

Landasan filosofis juga mengandung pengertian pemikiran yang dilandasi oleh cita-cita luhur yang menjadi pandangan hidup bangsa, sebagai salah satu unsur untuk menjamin berlakunya suatu aturan hukum. Dua unsur lainnya adalah landasan yuridis, yaitu bahwa suatu aturan hukum harus dibuat oleh otoritas yang berwenang (badan legislatif) dan sosiologis, yaitu bahwa hukum yang dibuat haruslah merupakan kristalisasi dari nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya suatu aturan hukum akan efektif apabila dibangun di atas tiga pandangan hidup bangsa yang bersangkutan, memuat nilai hukum yang

²⁰³Theo Hujibers. 1999. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, halaman 15.

hidup di dalamnya dan aturan hukum dibuat oleh badan perwakilan yang berwenang.²⁰⁴

Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis dari hukum yang berlaku adalah Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila mengandung inti pengakuan tentang adanya *Tuhan*, yaitu sebagai kausa prima, dan *manusia*, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yang harus bekerja sama dan gotong royong, dengan adil.²⁰⁵ Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya.²⁰⁶

Uraian diatas dapat memberi gambaran bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis merupakan sistem moral yang membimbing manusia Indonesia agar berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadilan. Dengan demikian peran filosofis Pancasila secara konstitutif yang menentukan dasar dan memberi peran regulative, pada aturan hukum positif yang berlaku. Sementara itu KHI merupakan produk konstitusional lembaga presiden, yaitu Instruksi Presiden (Inpres). Oleh karena itu, dalam membahas landasan filosofis penetapan wasiat wajibah anak angkat untuk memperoleh harta warisan dengan besaran 1/3 bagian, harus membahasnya menurut falsafah Pancasila.

Seperti telah dijelaskan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis mengandung tiga unsur penting, yaitu ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan. Ini

²⁰⁴Riyan Kusuma Ayu, "*Efektitas Hukum*", dalam www.riyanaayu.com, diakses tanggal 12 Desember 2017.

²⁰⁵Aryna Talina, "*Filsafat Pancasila*", dalam www.staff.gunadharma.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2017.

²⁰⁶*Ibid.*

berarti, landasan filosofis penetapan wasiat bagi anak angkat dalam KHI harus dilihat dari kebenaran yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Landasan filosofis penetapan wasiat wajibah dari nilai ketuhanan tidak lain adalah melihatnya menurut kaidah agama (Islam). Islam memandang harta kekayaan dengan fungsi sosialnya terutama, berkaitan dengan penyantunan anak-anak yang tidak beruntung. Islam merupakan agama yang sangat mengajurkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Tidak kurang dari 37 ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat selalu dirangkaikan dengan shalat, yang menunjukkan bahwa antara pengabdian kepada tuhan selalu berujung pada kepedulian sosial. Dalam salah satu haditsnya Rasul juga menyatakan bahwa orang tidak peduli dengan sesama bukan termasuk golongan kaum muslimin (*man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minny*).

Berdasarkan semangat kepedulian kepada kaum yang lemah, maka Islam mengajarkan berbagai metode dan media untuk mewujudkannya, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, infaq, warisan, hibah serta wasiat sebagai upaya yang bersifat publik untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian wasiat wajibah kepada anak angkat secara filosofis memenuhi kebenaran menurut dasar Pancasila, menurut nilai-nilai ketuhanan (Islam), dan menurut nilai kemanusiaan.

Menurut hukum Islam pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan aplikasi dari asas saling tolong dan kasih sayang (*al-ta'awun wa al-mawaddah*), yakni peralihan hak kepemilikan yang dilakukan dengan suasana yang sedemikian rupa supaya ahli-ahli waris dan kaum kerabat benar-benar ekstra ketat untuk "melipatgandakan" keikhlasan hatinya, mengikatkan hati

sebagian dengan sebagian yang lainnya, serta menimbulkan perasaan dan menyatukan arah-cita hidupnya, dari kemungkinan ada seseorang di antara mereka yang demikian menjadi rakus atas kebaikan yang lain, yang kelak akan mengembalikan kemanfaatan terhadap dirinya atau terhadap salah seorang dari kerabatnya.²⁰⁷

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan hikmah dari dasar disyariatkannya hak waris kepada yang berhak.²⁰⁸ Ditolaknya anak angkat menerima warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya merupakan perombakan terhadap tradisi Aran jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris. Hal ini terjadi karena jika dilihat dari aspek syarat kekerabatan, antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak memenuhi persyaratan. Baik dari segi hubungan kelamin maupun akad nikah, dengan kata lain anak angkat tersebut tidak dilahirkan dari orang tua angkatnya yang telah melakukan hubungan kelamin dengan akad nikah.²⁰⁹

B. Upaya Pembaharuan Hukum Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Keadilan

Staatsblad 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 12 ayat(1) dari *staatsblad* ini berbunyi, jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi dalam Pasal 12 ayat(1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan

²⁰⁷ Muhammad Amin Suma. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 67-68.

²⁰⁸ Pada dasarnya sebab-sebab seseorang mewarisi ada 4 (empat) macam, tetapi dalam kasus tertentu dan dsalam waktu serta geografis tertentu bisa dicukupkan pada 2 (dua) macam saja. Empat sebab-sebab seseorang mewarisi itu adalah: 1. Hubungan kekerabatan; 2. Hubungan pernikahan; 3. Hubungan *wala'*. 3. Hubungan agama (tujuan Islam. Keempat penyebab kewarisan ini dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir. 1981. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: FE UII, halaman 15.

²⁰⁹ Abdul Ghofur Anshori. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 35-36.

hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah).

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, tiap-tiap anak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Pasal ini lebih dititik beratkan kepada ikatan keturunan hubungan darah antara anak dengan orang tua yang dilahirkannya atau dibuahkan sepanjang perkawinan. Perlu diketahui bahwa anak sah mempunyai bagian mutlak dalam warisan dan sesuai dengan bunyi Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antar yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Ordonantie Staatsblad 1917 No. 129 dalam pasal 12 ayat (2) yaitu Jika suami setelah perkawinannya bubar mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak dianggap telah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibubar karena kematian. Pada pasal ini pembuat undang-undang ada membedakan antara kata-kata *Uit een dan uit het*. Walaupun memang perkawinannya itu pecah karena kematian istrinya. Jadi anak yang diadopsi itu dianggap sebagai anak sah dari si laki-laki itu tapi bukan anak dari bekas istrinya yang telah cerai atau meninggal dunia. Dalam pasal ini juga tidak disebutkan *door echtscheiding onbonthden* (pecah perceraian) karena dengan demikian maka akan diciptakan hubungan antara bekas istri dengan anak.²¹⁰

²¹⁰Sumiati Usman, *Op. Cit*, halaman 140.

Dengan demikian menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 bahwa anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat (adopsi) adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum Perdata, seseorang dapat mewaris karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Sementara anak adopsi dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orangtua angkat. Dikarenakan di dalam pasal 12 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 telah diatur bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Dalam hal pewarisan, anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, yaitu samasama menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdata, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak adopsi, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak adopsi tersebut. Yakni anak adopsi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya.

Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak adopsi dengan orangtua kandungnya sendiri, adalah anak adopsi tidak mewaris dari orangtua kandungnya dan begitu pula sebaliknya, karena status anak adopsi tersebut telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat, sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian karena anak adopsi bukan merupakan ahli waris dari orangtua kandungnya sendiri, maka anak adopsi tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua kandungnya tersebut.

Ketentuan tersebut di atas masih juga abu-abu karena terbuka kemungkinan harta warisan akan habis dibagi kepada ahli waris sehingga hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tuanya tentu tidak lagi ada. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalan²¹¹ kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil.

Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal peraturan wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :

²¹¹R. Subekti.1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, halaman 28.

“Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”.

Menurut Hukum Barat (KUHPerdara) pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut “*Legitime Portie*”, atau “*wettelijk erfdeel*” (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *legitimeportie* ini adalah untuk menghindarkan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.

Legitime Portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian wasiat (Pasal 913 KUH Perdata). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Legitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan “Pancer”). Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu-satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Berdasarkan statemen tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan kalau perlu adanya pembaharuan hukum kewarisan untuk memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum kepada anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pembaharuan hukum itu menyiratkan perlu

adanya revisi, inovasi terhadap substansi hukum yang lebih berkemanusiaan, berkeadilan.

Seperti diketahui, hukum dibuat oleh Negara dalam kerangka menciptakan keadilan dalam masyarakat yang dipandu oleh keadilan itu sendiri. Tanpa keadilan, hukum tidak dapat mewajibkan pelaksanaan nilai-nilainya. Seperti dinyatakan oleh Luypen, tanpa sifat mewajibkan yang bersumber dari keadilan, maka sebuah aturan tidak dapat disebut sebagai hukum.²¹² Oleh karena itu dalam keadilan tersirat membangun kehidupan bersama yang lebih baik, yaitu kehidupan adil dan baik bagi kemanusiaan.

Demikian juga, putusan hakim dianggap adil, meskipun tidak dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Hukum pengadilan juga harus dianggap benar (*waarheid*), karena dibuat oleh hakim sebagai orang yang tahu hukum (*jus curia novit*). Jadi hukum dapat disebut sebagai hukum kalau tidak adil, demikian juga keadilan tidak dapat tumbuh di luar hukum. Pada sisi lain hukum adalah instrumen penguasa (Negara) untuk mengatur pihak yang dikuasai (masyarakat). Ini berarti Negara bertanggungjawab atas ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menciptakan keadilan, Negara harus membuat aturan hukum yang menguntungkan semua pihak, terutama kelompok yang rentan terhadap ketidak-adilan, dalam kerangka memberikan perlindungan sekaligus menguntungkan bagi kelompok yang lemah.

Dalam KHI dan putusan hakim²¹³ telah ditentukan bahwa anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan

²¹²Bernard L Tanya dkk. tt. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, tp, halaman 150.

²¹³Di samping yurisprudensi juga ada putusan PN Kudus, yang telah menetapkan anak angkat memperoleh 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkat berdasarkan KHI. Lihat : Evi Krisitiani, "Hak Waris Anak Angkat menurut KHI", melalui www.unnes.ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2017.

demikian ketentuan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya adalah pembagian yang adil menurut keadilan hukum (*legal justice*). Sebagaimana dikatakan oleh Rawls, kepentingan utama dari keadilan dari hukum yang dibuat oleh Negara adalah adanya jaminan stabilitas hidup manusia. Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dapat dilihat dalam sebagai jaminan stabilitas kehidupan manusia.

Pemberian hak atas harta peninggalan orang tua angkat terhadap anak angkat juga merupakan suatu keadilan moral hak anak angkat. Seperti diuraikan di atas, keadilan dapat dinyatakan sebagai keadaan yang memungkinkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, setara dengan peran dan kewajibannya. Sedangkan moral, yang berasal dari kata latin "*morales*" berarti ukuran atau standar baik dan buruk. Karenanya keadilan moral adalah keadilan yang berdasarkan pada ukuran baik dan buruk, yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik serta dihayati dengan hati yang bersih.²¹⁴ Untuk itu perlu diuraikan lebih dahulu moral sebagai standar atau ukuran baik dan buruk.

Secara umum moral mempunyai banyak sumber, dan sumber yang paling valid adalah agama. Agama (Islam) menentukan baik dan buruk, benar dan tidak benar, serta adil-tidak adil, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an.²¹⁵ Jadi apa yang baik adalah apa yang dinilai oleh Al-Qur'an sebagai baik, dan sebaliknya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan manusia.

²¹⁴Mahmutarom Harun Al Rasyid, "Perkembangan Makna Hukum dan Keadilan Islam dalam Sejarah Pemikiran Prof. Sri Rejeki Hartono, SH", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.2 No. 2 September, Unissula, Semarang, 2007, halaman 198.

²¹⁵Rifyal Ka'bah. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta:Khairul Bayan, Jakarta, halaman 134.

Pelaksanaan konsep moral dalam pergaulan manusia oleh alquran disebut dengan *makruf*, artinya kebaikan yang dikenal dan dilaksanakan. Seperti menyantuni orang yang kekurangan, membela yang lemah, menghormati orang tua pasti dinyatakan sebagai hal yang baik, hanya setiap zaman dan tempat ekspresi kebaikan itu berbeda-beda, dan itu tetap baik selama memuliakan manusia, maka ia tetap dinilai sebagai makruf.²¹⁶ Dengan demikian menegakkan keadilan moral pada hakekatnya melaksanakan perintah agama, karena pada saat yang sama Islam mengajarkan tidak boleh berbuat zalim termasuk kepada diri sendiri dan orang lain.²¹⁷

Moralitas (Islam) yang demikian bila dikaitkan dengan ketentuan KHI yang memberikan hak anak angkat sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, menunjukkan kebaikan yang dianjurkan. Banyak ayat Al-Qur'an dan as Sunnah yang menganjurkan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang kurang beruntung, sekalipun tidak ada ikatan hukum apa pun. Sebaliknya pada anak angkat yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan putusan pengadilan, lebih layak lagi menerima kebaikan berupa bantuan materi dari orang tua angkatnya.

Singkatnya, memberikan 1/3 bagian harta kepada anak angkat, merupakan keadilan berdasarkan moral, yaitu keadilan yang berdasarkan kebaikan dengan tolok ukur ajaran agama Islam. Karena menurut ketentuan pasal 209 KHI, memberikan hak 1/3 kepada anak angkat merupakan ketentuan maksimal. Apabila adil dinyatakan sebagai memberi hak kepada yang berhak, maka hak anak angkat atas 1/3 bagian merupakan keadilan karena dalam

²¹⁶M. Qurash Shihab. 1996. *Wawasan al Quran*. Bandung:Mizan, Cet. III, 1996, halaman 250.

²¹⁷Murtadha Mutahhari. 1995. *Falsafah Akhaq*. Bandung: Pustaka Hidayah, halaman 165.

ketentuan KHI ditegaskan anak angkat demikian. Artinya ketika anak angkat diberi 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, berarti telah adil, karena memberikan bagian anak angkat sesuai dengan haknya, yakni 1/3 bagian.

Dari sisi moral, tidak ada dapat disangkal lagi memberi dalam kerangka untuk menjamin kehidupan yang lebih sejahtera merupakan kebaikan. Islam sebagai sumber moral menganjurkan untuk memberi jaminan kesejahteraan kepada orang lain. Salah satu teks keagamaan menunjukkan hal ini adalah surat al Maidah: 32 , yang berbunyi:

Artinya: “Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, berarti ia memelihara kehidupan seluruh umat manusia.”

Pemberian hak atas harta peninggalan orang tua angkat terhadap anak angkat juga memberikan rasa keadilan sosial bagi anak tersebut. Term keadilan sosial sebenarnya baru muncul pada tahun 1840-an, sebagai akibat dari tumbuhnya industrialisasi di Perancis dan Inggris. Gagasan keadilan sosial merupakan gagasan revolusioner bahwa institusi sosial (yang kapitalistik) dapat dilawan tidak hanya dari pinggiran (marginal) tetapi juga dari inti tengahnya (*the core of sosial institutions*). Ketidakadilan yang menandai betapa dalamnya ketimpangan hubungan antara buruh dan majikan, distribusi kekayaan /pendapatan akibat institusi kapitalis, harus dipertanyakan, karena telah mempermainkan kehidupan rakyat banyak.²¹⁸Perlawanan dapat diarahkan terhadap kekuasaan dari para pemilik modal, dan terhadap dominasi dari keseluruhan sistem pasar tempat bersemayamnya kapitalisme.

²¹⁸Agus Wahyudi, “Munculnya Pengertian Keadilan Sosial”, dalam www.pps.ugm.ac.id. Diakses tanggal 24 November 2017.

Pada perang dunia ke-dua, gagasan keadilan sosial makin berkembang, setelah kekuasaan capital harus dibatasi dengan adanya organisasi buruh dengan regulasi untuk memastikan bahwa keuntungan lebih dahulu mengalir kepada rakyat. Karena itu institusi Negara sejahtera (*welfare state*) harus diciptakan untuk menyediakan pendapatan yang memadai bagi seluruh rakyat.²¹⁹

Dengan latar belakang sejarah sosial (ekonomi industri) di Eropa tersebut, Indonesia mengadopsi gagasan keadilan sosial dan kemudian dengan modifikasi dicantumkan sebagai salah satu sila dari Pancasila dan tercantum pula dalam pembukaan UUD 1945. bahwa Indonesia berusaha menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Soekarno dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, di negara barat hanya ada *politiek domocratie*, tetapi tidak ada *rechtsvaardigheid*, tidak ada keadilan sosial, tidak ada *ekonomische democratie* sama sekali. Jadi Indonesia harus menganut demokrasi, yang memberi hidup, yakni *politiek ekonomische democratie* yang mampu mendatangkan keadilan sosial.²²⁰ Hal senada juga disampaikan tokoh lain seperti Soepomo dan Moh. Yamin, bahwa keadilan sosial yang dimaksud adalah kesejahteraan rakyat. Pendapat ketiga *founding fathers* tersebut memberikan gambaran bahwa keadilan sosial mempunyai tiga bentuk, yaitu keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsyafi oleh mayoritas masyarakat.

Jadi secara rinci keadilan sosial dapat dikenali melalui berbagai pengertian; (1) pewujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan), (2). pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (3). proses fasilitasi untuk akses atas informasi yang diperlukan,

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Safruddin Bahar et al. 1992. *Risalah Sidang BPUPKI, PPKI*. Jakarta: Setneg RI, halaman 67-68.

layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan (4). dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Adapun wujud paling nyata dari sikap keadilan sosial adalah kedermawanan sosial, atau filantropi sebagai cahaya krisis sosial, putus sekolah dan pengangguran, yang setidaknya akan menciptakan rasa adil bagi orang yang kebetulan terpinggirkan.

Oleh karena itu, pemberian hak kepada anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat merupakan wujud dari keadilan sosial, terlepas dari berapa besaran bagian yang diperoleh anak angkat. Seperti diketahui, redaksi pengertian anak angkat menurut pasal 171 huruf (h) KHI dicantumkan frasa kata “pemeliharaan hidupnya sehari-hari”, “biaya pendidikan”, dan sebagainya. Pada sisi lain, pemberian hak kepada anak angkat sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dapat dilihat pula dari filantropi orang tua angkat. Sikap filantropi pemberian 1/3 bagian kepada anak angkat paling tidak mempunyai dua makna, pertamasecara material, pemberian kepada anak angkat dapat mengentaskan anak dari penderitaan dan menghidarkannya dari ketidakpastian di masa depannya. Kedua, adalah makna moral, meskipun nilai 1/3 bagian tidak memberikan jaminan kesejahteraan, akan rasa disayangi dan memperoleh perlakuan adil ini akan menumbuhkan kepercayaan diri pada di anak angkat.

Perlunya pembaharuan hukum terkait hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat juga dikarenakan secara yuridis formal staatsblad 1917 Nomor 129 belum dicabut dan masih berlaku. Dalam perkara pengangkatan ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (tentang pengesahan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak) sebagai batu penguji untuk menyatakan Pasal 5 sampai Pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tidak berlakunya staasblad 1917 Nomor 129, maka diperbolehkan mengangkat anak perempuan menjadi anak angkat karena anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda. Staatsblad tersebut tidak dapat dipergunakan.

Pertama, Karena setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 Staasregeling.

Kedua, ketentuan dalam staatsblad 1917 Nomor 129 bersifat diskriminasi. Beberapa ketentuan yang diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129 yang bersifat diskriminasi yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 5 ditentukan bahwa hanya anak laki-laki saja yang boleh diadopsi;
2. Berdasarkan Pasal 6 dikatakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain.

Sejalan dengan perkembangan hukum yang menghendaki agar Warga negara Indonesia yang satu dan Integral, tanpa diskriminasi dan bukan warga

negara Indonesia sebagai lanjutan dari Pasal 163 Indische Staatsregeling, maka keturunan Tionghoa tidak lagi terikat Staatsblad 1917 Nomor 129.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan hak. Asas persamaan hak ini telah dianut pula dalam resolusi Seminar Hukum Nasional 1963 dalam resolusi tersebut dicantumkan agar mengindahkan keseimbangan pembagian antara pria dan wanita dalam hukum waris dan masyarakat yang bersifat parental.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat hasil kesimpulan:

1. Bahwa didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya ditujukan untuk pemeliharaan saja bukan merubah nasab si anak sehingga merubah statusnya menjadi anak kandung yang mengangkatnya.
2. Bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak

angkat. Menurut hukum Islam anak angkat tidak dapat menerima warisan tetapi diberikan wasiat wajibah yang tidak lebih 1/3 bagian dari harta.

3. Bahwa *Staatsblad* 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, sesungguhnya penuh dengan diskriminasi terutama tidak diakuinya pengangkatan anak perempuan. Pada sisi lain karena setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 Staasregeling, sehingga layak untuk dilakukan pembaharuan hukum kewarisan.

B. Saran

1. Bahwa sebaiknya dan secepatnya pihak legislatif harusnya membuat regulasi baru terkait dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dengan berasaskan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum.
2. Sebaiknya ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dilegitimasi menjadi undang-undang, karena selama ini ketentuan tersebut hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan oleh Instruksi Presiden.
3. Sebaiknya pihak pemerintah bersama pihak legislatif segera merumuskan ketentuan yang menghilangkan diskriminasi terhadap hak anak angkat terutama yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. 1993. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Affandi, Ali. Tanpa tahun. *Hukum Keluarga Menurut KUHPerduta*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Alam, Andi Syamsul, Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS.
- Amanat, Anisitus, 1989, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal hukum Perdata BW*, Jakarta: CV Rajawali.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ashshofa, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua.
- Bahar, Safruddin, et al. 1992. *Risalah Sidang BPUPKI, PPKI*. Jakarta: Setneg RI.
- Bakar, Zainal Abidin Abu. 1991. *Himpunan Peraturan Perundangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al Hikmah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1981. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: FE UII.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bushar, Muhammad. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darajat, Zakiah, et.al. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2008. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh.
- Daulay, Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi. 2012. *Studi Islam II*. Medan: Ratu Jaya.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan.
- Fahmi Al Amruzi, M. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Fathurrahman. 1980. *Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Al Maarif.
- Faturochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Friedrich, C. J.. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung Nuansa dan Nusamedia.
- Gautama, Sudargo. 1981. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hazairin. 1983. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hujibers, Theo. 1999. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

- Idris Ramulyo, M.. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indarty, Erlyn. 2006. *Diskresi Hukum Kepolisian*. Tidak Diterbitkan untuk kalangan sendiri Akpol, Semarang.
- Joko Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta:Khairul Bayan, Jakarta.
- Kamil, Ahmad dan M. Fuzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 2003. *Bunga Rampai Catatan Sipil*. Jakarta: Primamedia Pustaka.
- L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K.. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4.
- , 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Masyhur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Meliala, Djaja S.. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J.. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 1989. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. ke-1. Jakarta : PT. Pradnya, Paramita.
- Mutahhari, Murtadha. 1995. *Falsafah Akhaq*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuruddin, Amiur. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Otje Salman S, R. dan Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Ke-2.
- Pandika, Rusli. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perangin, Effendi. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pernamasari, Irma Devita. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa.
- Prawirohamidjojo, Soetojo.1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Purbacaraka, Purnadi dalam A. Ridwan Halim. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmad Budiono, A. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Fathur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif.

- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi. Cet. 1.
- Saiban, Kasuwi. 2011. *Kewarisan Dalam Islam*. Malang: Unmer Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama.
- Satrio, J.. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidik, Safiudin. 2004. *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Inti media Citra Nusantara.
- Shihab, M. Qurash. 1996. *Wawasan al Quran*. Bandung: Mizan, Cet. III.
- Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Soepomo, R., dalam M.Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Soeroso, 2007, *Perbandingan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R., 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4.
- Soeroso. 2007. *Perbandingan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- , 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sy., Mustofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Syahrani, Riduan. 1989. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Media Group Bekerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Tanya, Bernard L, dkk. tt. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*,tp.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia, Edisi IV. Cet. Ke-1.
- Usman, Suparman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia.
- Zaini, Mudaris. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998 M.

Tesis, Disertasi

Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Tengku Erwinsyahbana, "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional". *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 2012.

Jurnal

Dede Ibin, "*Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Nonmuslim*", dalam *Mimbar Hukum* No. 26, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2003.

Harry A. Tuhumury, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *Legal Pluralism*, Vol. 3, No.1, Januari 2013.

Mahmutarom Harun Al Rasyid, "Perkembangan Makna Hukum dan Keadilan Islam dalam Sejarah Pemikiran Prof. Sri Rejeki Hartono, SH", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.2 No. 2 September, Unissula, Semarang, 2007.

Mochammad Taqrib, "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Waris di Indonesia", dalam *Jurnal Pusaka*, Edisi Januari-Juni 2014.

Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Qiyas*, Vol.1 No.1 Tahun 2016.

Pagar, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 54. Tahun 2001.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 April 2009.

Satria Effendi M. Zein, "Analisis Fiqih Analisis Yuripsrudensi", dalam *Mimbar Hukum* No. 37 Thn. IX, 1998.

Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", dalam *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4 Oktober 2013.

Thahir Azhary, "Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal Pengangkatan Anak", dalam , dalam *Suara Uldilag* Vo. 3 No.XI, Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, 2007.

Zeila Mochtar, "Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata", dalam *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.

Situs Internet

Agus Wahyudi, "Munculnya Pengertian Keadilan Sosial", dalam www.pps.ugm.ac.id. Diakses tanggal 24 November 2017.

Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.statushukum.com, diakses tanggal 25 November 2017.

Aryna Talina, "Filsaafat Pancasila", dalam www.staff.gunadharma.ac.id. diakses tanggal 12 Desember 2017.

Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", dalam <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.

Evi Krisitiani, "Hak Waris Anak Angkat menurut KHI", melalui www.unnes.ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2017.

Ghina Kartika Ardiyati, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Maret 2016.

Jimly Ashiddiqie (1), "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 25 April 2017.

Mukhtar "Ahli Waris dalam Islam", melalui <http://ahsanuamala.blogspot.com/2011/11/ahli-waris-dalam-islam.html>, diakses 5 Desember 2017.

Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan" dalam www.ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2017.

Riayan Kusuma Ayu, "*Efektitas Hukum*", dalam www.riayanaayu.com, diakses tanggal 12 Desember 2017.

Ugun Guntari, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional", melalui <http://www.ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Pada sisi lain van Apeldoorn mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak.¹ Peristiwa menurut hukum contohnya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit. Kejadian/peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.² Perkawinan misalnya tentu saja memberikan akibat hukum terhadap adanya hak waris bagi anak-anak jika pewaris telah meninggal dunia, jika memang pewaris meninggalkan harta peninggalan.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni yang menjelaskan bahwa harta peninggalan atau *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.³ Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-

¹R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4, halaman 251.

²*Ibid*, halaman 252.

³Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

⁴Amin Husein Nasution. 2102. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35.

akibatnya didalam bidang kebendaan, diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris di Indonesia sampai dengan saat ini, masih bersifat pluralistik. Dikatakan demikian karena terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku.⁵

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Hukum waris di Indonesia berbeda-beda, antara lain:

1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia,
2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;
3. Adanya Hukum Adat yang di sana-sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.⁷

Pluralitas hukum kewarisan di Indonesia disamping merupakan sebuah kekayaan khazanah budaya lokal, namun pada sisi lain menimbulkan kegalauan terhadap hukum mana yang akan dipakai ketika akan menyelesaikan perkara waris jika terjadi konflik antara ahli waris. Problematika yang paling sering terjadi tentang konflik perkara waris adalah terkait dengan status kewarisan anak angkat.

Status anak angkat memang menjadi dilema tersendiri terkait dengan status hak warisnya dalam sistem hukum waris di Indonesia. Misalnya, dalam pembagian harta peninggalan untuk anak angkat yang tidak boleh lebih dari

⁵ Ali Afandi.1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta:Bina Aksara, halaman 7.

⁶Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Media Group Bekerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 1.

⁷*Ibid*, halaman 2-3.

sepertiga bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bagian ini diberikan karena secara normatif anak angkat tidak memiliki hak waris, sebab menurut hukum Islam, ahli waris harus memiliki hubungan hukum dengan pewaris, baik hubungan darah maupun perkawinan.⁸ Pembagian warisan bagi anak angkat tersebut, sering kali menjadi pertentangan oleh ahli waris lain, karena dianggap menyerobot hak-hak ahli waris yang sebenarnya secara hubungan semenda, hubungan perkawinan dan hubungan darah jauh lebih berhak jika dibandingkan dengan anak angkat.

Seperti diketahui bahwa hukum waris termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata. tapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris Barat misalnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan. harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan.

Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak

⁸Kasuwi Saiban. 2011. *Kewarisan Dalam Islam*. Malang: Unmer Press, halaman 11.

besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.⁹ Jika hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Barat, maka dampak yang timbul dari peristiwa itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap munculnya sederet akibat hukum baru.

Dalam hak mewaris, anak angkat tidak akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (testamen) yang di buat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya. Berdasarkan ketentuan di atas, anak angkat tidak termasuk salah seorang ahli waris dari orang tua angkat, sebab bukan kerabat hakiki, bukan pula terikat dalam persemendaan dan juga bukan budak yang dimerdekakan.

Akibat seringkali terjadi konflik terkait hak waris anak angkat tentu saja harus ditelaah kembali seperti apa penafsiran hukum perdata tentang hak waris anak angkat. Hukum haruslah memberikan kepastian bagi pencari keadilan termasuk anak angkat. Sebagian fakta terlihat sering kali anak angkat ternyata jauh lebih perhatian daripada anak kandung dari pewaris, bahkan sering juga terjadi bahwa orang tua angkat lebih sayang kepada anak angkatnya. Berdasarkan hal itu haruslah dilihat secara lebih bijaksana dari sisi hukum dan kemanusiaan.

Pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II

⁹ Anisitus Amanat, 1989, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal hukum Perdata BW*, Jakarta: CV Rajawali, halaman 52.

*Staatsblad*1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad*1917: 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk Tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu.¹⁰

Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Menurut Pasal 14 *Staatsblad*1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus. Dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad*1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami

¹⁰Zeila Mochtar, “Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013, halaman 163-164.

isterimengangkat seseorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka”.

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.¹¹

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orangtua yang mengangkatnya baik suami isteri atau janda /duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orangtua kandung. Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak

¹¹Soeroso, 2007, *Perbandingan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

dari orangtua asli atau kandung menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.¹²

Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orang tua angkat membawa konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya dan anak adopsi tersebut berhak pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orangtua angkatnya. Di dalam Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris antara anak kandung dan anak adopsi.¹³

Ketentuan mengenai sebab seseorang dapat mewarisi menurut hukum waris KUHPerdara adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam Pasal 832 KUHPerdara ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUHPerdara terdapat empat golongan ahli waris:

1. Golongan pertama, terdiri dari suami atau isteri dan keturunannya;
2. Golongan kedua, terdiri dari orangtua, saudara dan keturunannya;

¹² Ghina Kartika Ardiyati, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

¹³ Muderiz Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, halaman 4.

3. Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas;
4. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Pasal 832 KUHPerdata tersebut memberikan penjelasan yang lengkap bahwa anak angkat tidak termasuk golongan yang berhak mendapatkan warisan. Ketentuan tersebut tentu saja sebuah kenyataan pahit bagi anak angkat. Anak angkat yang biasanya diadopsi sejak kecil tersebut tidak memperoleh keadilan dalam hal warisan. Disebabkan tidak diaturnya hak kewarisan anak angkat, maka terjadilah kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu kemudian menjadi celah yang terbuka untuk mengabaikan sebagian hak anak angkat terutama tentang pembagian harta peninggalan. Sebagian fakta terlihat sering kali anak angkat ternyata jauh lebih perhatian daripada anak kandung dari pewaris, bahkan sering juga terjadi bahwa orang tua angkat lebih sayang kepada anak angkatnya.

Dalam Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris, meskipun ada cara lain misalnya dengan jalan hibah atau wasiat wajibah. Tentu ada pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab terkait dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam agama selain Islam, karena selama ini tidak teridentifikasi secara pasti hal tersebut. Karena bagaimanapun juga peristiwa pengangkatan anak tidak hanya terjadi pada agama Islam saja, tetapi juga pada agama lainnya. Anak angkat bagaimanapun juga harus diberikan kepastian dan perlindungan hukum oleh negara.

Permasalahan lainnya adalah tentang batasan atau jangka waktu anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkat yang tidak terdapat dalam aturan perundang-undangan yang ada. Dapat saja terjadi seorang anak angkat yang baru beberapa bulan diangkat kemudian orang tua

angkatnya meninggal dunia, yang dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, dianggap sebagai anak kandung yang notabenenya harus mendapat waris dari orang tua angkatnya. Fakta tersebut dirasa tidak adil bagi ahli waris yang memang menurut agama dan undang-undang adalah orang-orang yang berhak menerima warisan.

Menarik untuk melihat bagaimana hak waris anak angkat menurut agama Hindu Bali, karena dengan menyatunya doktrin agama Hindu dan adat istiadat menjadikan hukum agama juga sekaligus hukum adat. Dalam ajaran Hindu Bali anak angkat laki-laki disamakan kedudukannya dengan anak kandung, demikian pula dengan hak waris. Anak angkat laki-laki dalam sistem hukum agama Hindu Bali berhak menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang penting diteliti untuk mengetahui penjelasan anak angkat dalam perspektif hukum perdata, serta melihat kepastian hukum hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Berpijak dari uraian diatas maka judul yang akan diteliti ialah: **“Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat pada Masyarakat Non Muslim dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Perdata”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status anak angkat dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana kepastian hukum hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana perspektif pembaharuan hukum perdata nasional terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status tentang anak angkat dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dalam perspektif hukum perdata.
3. Untuk menganalisis perspektif pembaharuan hukum perdata nasional terkait hakanak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam proposal tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang pemberian waris kepada anak angkat.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu penegak hukum khususnya para hakim, dapat memberikan pencerahan terhadap berbagai dinamika pemikiran yang ada dalam bidang hukum terutama terkait dalam bidang kewarisan. Khusus bagi pihak legislatif, penelitian ini diharapkan memberikan sebuah masukan agar hak-hak anak angkat dapat dimasukkan dalam upaya pembaharuan hukum waris perdata dalam perundang-undangan yang ada sekaligus sebagai aplikasi terhadap undang-undang perlindungan anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul: **Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Perdata**”, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemberian waris terhadap anak angkat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ferza Ika Mahendra, dengan judul “Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata(Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur)”. Tesis yang berasal dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008.
2. Jiyy Ji’ronah Muayyanah dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis yang berasal dari Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010.
3. M. Rizal dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata (Staatsblad 1917 No. 129) Dan Hukum Islam”. Tesis yang berasal dari Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2002.

4. Adi Supranoto dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Yang Tidak Ditetapkan Berdasarkan Penetapan Pengadilan”. Tesis yang berasal dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2016.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁴ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁶

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁷ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum.

¹⁴M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, halaman 80. Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 93.

¹⁵Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua, halaman 23.

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14., halaman 7.

¹⁷Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 35.

Menurut Jimly Ashiddiqie¹⁸ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁹

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²⁰

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

¹⁸ Jimly Ashiddiqie (1), "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 25 April 2017.

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 44.

²⁰ Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, halaman. 79-80.

2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹ Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²²

1. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah

²¹Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 157-158.

²²Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, 2009, halaman. 293.

dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²³

Teori selanjutnya adalah perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²⁴

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

²³ *Ibid*, halaman 159-160.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²⁵

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.²⁶ Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

²⁵ *Ibid*, halaman 57.

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, halaman 21.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²⁸

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.²⁹ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum; meliputi:

1. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. subjek hukum; dan
3. objek perlindungan hukum.³¹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

²⁷Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 54.

²⁸Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 99.

²⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama, hlm. 262.

³⁰*Ibid*, hlm. 263.

³¹*Ibid*.

bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³²

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.³³

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan

³² Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.statushukum.com, diakses tanggal 25 November 2017.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 264.

2. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.³⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

a. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.³⁵

2. Kerangka konsep

a) Hak waris menurut KUHPerdato

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Dalam konsep pewarisan terdapat subjek hukum, yaitu

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Maret 2016.

pewaris sebagai anggota keluarga yang meninggal dan ahli waris sebagai anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum.³⁶ Pewarisan berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama dan adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya, dinyatakan oleh Undang-Undang diwarisi oleh ahli warisnya.³⁷

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si pewaris, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara dil dan sempurna. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan hal itu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.³⁸

Dalam suatu hak waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit le vivif*, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana sekalian ahli

³⁶ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, halaman 194.

³⁷ Efendi Perangin. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

³⁸ Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, halaman 95.

waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.³⁹

Menurut Pasal 834 BW seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Sebagaimana ketentuan waris pada umumnya, bahwa pada prinsipnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangis kelahiran. Apabila si anak bersuara atau dengan kata lain bayi tersebut hidup ketika dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mayit.

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap mewarisi. Jelasnya, seorang anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh bagian harta kekayaan dari almarhum ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara yang mengatakan bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendakinya. Apabila si anak meninggal dunia sewaktu dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah lahir. Hanya oleh Undang-Undang

³⁹ *Ibid.*, halaman 96.

telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan (Pasal 838).⁴⁰

Pihak-pihak yang tidak berhak menerima harta warisan diantaranya ialah seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal; seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat; atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.

Pada Pasal 912 KUHPdata ditetapkan alasan-alasan yang menurut Pasal 838 KUHPdata, menyebabkan seseorang tidak patut menjadi ahli waris berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian-pemberian dalam suatu testamen/wasiat, kecuali dalam Pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah coba membunuh orang yang meninggalkan warisan. Apabila si pewaris ternyata dalam surat wasiat/testamen masih juga memberikan warisan kepada seorang yang telah berbuat demikian, hal itu dianggap sebagai suatu pengampunan terhadap orang itu.

Kriteria tidak patut dan tidak berhak menerima warisan berbeda dengan penghapusan hak waris atau *hijab*, karena yang menyebabkan timbulnya dua persoalan tersebut berbeda. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan disebabkan oleh tindakan melawan hukum, misalnya orang yang membunuh pewaris. Selain itu juga disebabkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama Islam, misalnya ahli waris yang murtad atau kafir.
2. Penghapusan hak waris disebabkan karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi, misalnya ibu memperoleh 1/6 bagian jika ia mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara. Selain itu juga disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal (pewaris), misalnya cucu laki-laki

⁴⁰ *Ibid*, halaman 95-97.

tidak mendapat bagian dari harta warisan tersebut selama ada anak laki-laki si pewaris.⁴¹

b) Anak angkat menurut KUHPerdato

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.⁴² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak dalam Pasal 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdato).
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-

⁴¹Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Jakarta: PT Refika Aditama, halaman 24.

⁴²Muhammad Bushar. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 16.

undang yang diatur dalam KUHPerdara berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdara.

Saat membahas mengenai “anak adopsi” dan “anak angkat”, seolah terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Secara awam, jika menyebutkan seorang dengan “anak adopsi”, berarti anak tersebut diadopsi (diangkat) secara resmi di pengadilan. Sementara, jika menyebut “anak angkat”, seolah-olah hanyalah diangkat tanpa surat pengangkatan resmi. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴³

R. Soeroso mengatakan adopsi yang diatur dalam BW hanya adopsi atau pengangkatan anak luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290. Pengangkatan anak sebagaimana terjadi dalam praktik di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak dalam arti luas. Dengan demikian, seharusnya BW tidak mengatur pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang. Hanya saja kemudian, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Stb. 1917 Nomor 129 yang memberikan ketentuan mengenai adopsi bagi masyarakat Tionghoa, dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Dalam Stb. 1917 Nomor 129 tersebut diatur tentang siapa yang boleh mengangkat, siapa yang boleh diangkat sebagai anak angkat, dan tata cara pengangkatan anak, termasuk di dalamnya syarat-syarat pengangkatan anak.

⁴³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia, Edisi IV. Cet. Ke-1, halaman 56.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.” Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴⁴

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah “anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁴⁵ Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Anak angkat tersebut diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.⁴⁶

⁴⁴ Irma Devita Pernamasari. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, halaman 118-119.

⁴⁵ Hilman Hadikusuma. 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung, halaman 20.

⁴⁶ Muderis Zaini. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Akasara, halaman 85. Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Lihat Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara, halaman 34.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tuakandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.⁴⁸ Anak angkat

⁴⁷ D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia, halaman 48.

⁴⁸ Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris. Sewaktu Islam datang yang membawakan penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab mempusakai, maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab tak mewarisi itu hanya berdarakan keturunannya. Unsur pengangkatan anak tidak dapat memaksakan menjadi adanya sebab penilaian nasab.⁴⁹

Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

⁴⁹ Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Qiyas*, Vol.1 No.1 Tahun 2016, halaman 102.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵⁰

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁵¹

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap perbandingan dan asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁵²

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

⁵⁰ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

⁵¹ Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, halaman 4.

perundang-undangan (*law in books*).⁵³ Sedangkan penelitian terhadap perbandingan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dalam hal ini KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁵⁴

3. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

4. Alat pengumpul data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *mendownload* melalui internet. Data yang diperoleh

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

⁵⁴ Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan, halaman 96.

kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁵⁵:

- a. Sumber data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu.⁵⁶
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁵⁷ dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁸
- d. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan

⁵⁵ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada halaman 113.

⁵⁶ Amiur Nuruddin. 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media, hlm. 65,

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3, halaman 47.

⁵⁸ *Ibid.*

indeks kumulatif.⁵⁹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶⁰

5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan akibat hukum perceraian bagi suami yang tidak memberikan nafkah dalam perkawinan terhadap

⁵⁹P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

⁶⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33.

pembagian harta bersama. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang tertulis.

BAB II

STATUS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Aspek Hukum Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁶¹ Manusia dalam pertumbuhan dan pergaulannya dengan lawan jenis terjadi kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Hubungan perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mencakup hubungan keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, dan perceraian.

Di dalam perkawinan terdapat unsur lahir dan batin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan

⁶¹Ridwan Syahrani. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 44.

kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.⁶²

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat kecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, akan tetapi tidak selalu keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi).⁶³ Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Keanekaragaman hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak di Indonesia ini akan tampak jika kita teliti secara cermat ketentuan-ketentuan tentang lembaga pengangkatan ini dari berbagai sumber hukum yang berlaku, baik hukum Barat dari BW dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih

⁶²Soetojo Prawirohamidjojo.1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, halaman 28-29.

⁶³Bushar Muhammad. 1989. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. ke-1. Jakarta : PT. Pradnya, Paramita, halaman 33.

belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema masyarakat, terutama menyangkut masalah ketentuan hukumnya.⁶⁴

Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa adopsi merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga di antara keduanya timbul hubungan hukum layaknya orang tua dan anak kandung.⁶⁵ J.A. Nota seperti dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa adopsi adalah suatu intitusi hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain sehingga menimbulkan hubungan hukum seperti orang tua dan anak kandung, baik sebagian maupun seluruhnya.⁶⁶

Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menghendaki bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah

⁶⁴Harry A. Tuhumury, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *Legal Pluralism*, Vol. 3, No.1, Januari 2013, halaman 114.

⁶⁵Mudaris Zaini. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 176.

⁶⁶Soerojo Wignjodipuro. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, halaman 117-118.

suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Musthofa Sy., secara garis besar, ada dua tujuan pengangkatan anak. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. Kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjamin hak keagamaan bagi anak, Pasal 39 ayat (3) memberi ketentuan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selain itu, untuk menjamin hak identitas anak, Pasal 40 mewajibkan orang tua angkat memberitahu asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.⁶⁷

Ada beberapa sebab sehingga lembaga pengangkatan anak berkembang dalam masyarakat, antara lain:⁶⁸

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan terhadap anak yang mempunyai orang tua kandung tidak mampu, atau anak tersebut sudah yatim piatu;
3. Hanya memiliki anak laki-laki saja atau anak perempuan saja;
4. Sebagai pancingan agar dapat memiliki anak sendiri.

⁶⁷Mochammad Taqrib, "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Waris di Indonesia", dalam *Jurnal Pusaka*, Edisi Januari-Juni 2014, halaman 45.

⁶⁸Harry A. Tuhumury, *Op. Cit*, halaman 115.

Sifat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak).
2. Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo dan Pasal 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).⁶⁹

Definisi anak angkat dalam pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Perihal pengangkatan anak atau adopsi ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat

⁶⁹ Dari segi hukum ini menimbulkan konsekuensi sebagai berikut: *Pertama*, Berlaku larangan perkawinan karna hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.) *Kedua*, Tindak-tandak pidana yang ditentukan dalam Pasal 221 ayat (2), (menyembunyikan keluarga yang melakukan kejahatan), Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 356 (penganiayaan dalam keluarga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). *Ketiga*, pembuktian dengan saksi dalam Pasal 145 dan 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). tentang hubungan saksi dengan para pihak karena keluarga. *Keempat*, kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asalnya (UU Perlindungan Anak : Pasal 6 ayat (1) berserta penjelasannya, Pasal 40 dan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Ketiga pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam.⁷⁰

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.⁷¹ Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.⁷²

Lembaga adopsi melalui Stb. No. 129 tahun 1917 adalah suatu perkecualian, yang hanya berlaku bagi golongan Tionghoa dan hanya terbatas untuk adopsi anak laki-laki saja. Kekosongan itu dicoba untuk diisi melalui yurisprudensi. Mahkamah Agung sendiri mendorong untuk pengisian kekosongan itu dengan putusan-putusan pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 menyatakan:

⁷⁰Muderis Zaini, *Op. Cit*, halaman 19.

⁷¹Soeroso. 2007. *Perbandingan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

⁷²Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, “Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan” dalam www.ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2017.

“Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak yang ada. Padahal sangat diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan tentang adopsi atau pengangkatan anak, disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah, serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak”.

Di samping itu, ditinjau dari segi internasional lembaga adopsi, menurut *European Convention of the Adoption of Children*, adopsi itu baru diterima sah kalau diberikan melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan, sebagai syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak. Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyeludupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.⁷³

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan

⁷³Zeila Mochtar, *Loc.Cit.*

anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Di dalam KUHPerdata tidak diatur tentang pengangkatan anak, tetapi diatur mengenai anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin dibedakan atas anak luar kawin yang tidak diakui dan anak luar kawin diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II *Staatsblad* 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 14 *Staatsblad* 1917 : 129, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung, yaitu anak yang dianggap sebagai telah dilahirkan dari perkawinan mereka yang telah mengangkat anak dan hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Pengangkatan anak melalui jalur formal (Pengadilan) awalnya hanya dikenal di lingkungan penduduk tionghoa yang didasarkan atas aturan khusus untuk itu.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya."

Didasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan

anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.⁷⁴

Akta kelahiran menunjukan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya. Sedangkan dalam proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah: Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan: “Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2), (3), (4) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah:

Ayat (2) a. Apabila yang di adopsi itu seorang anak yang sah, persetujuan dari orang tuanya, atau kalau salah satu dari diantaranya telah meninggal terlebih dahulu persetujuan dari orang yang hidup terlama, kecuali ibu telah beralih keperkawinan baru; dalam hal ini, seperti halnya kalau kedua orang tuanya telah meninggal, untuk adopsi seseorang yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.”

⁷⁴Nursyahbani Katjasungkana. 2003. *Bunga Rampai Catatan Sipil*. Jakarta: Primamedia Pustaka, halaman 19.

Ayat (2) b. Apabila yang diadopsi itu anak luar kawin, persetujuan dari kedua orang tuanya kalau ia diakui oleh keduanya, atau kalau salah satu meninggal lebih dahulu, persetujuan dari orang yang hidup lebih lama, atau ia diakui oleh seorang dari mereka persetujuan dari yang mengakuinya, jika sama sekali tidak ada yang mengakui atau telah meninggal dunia, maka untuk adopsi yang dibawah umur disyaratkan persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan.”

Ayat (3) “ Persetujuan dari orang yang akan diadopsi, jika ia telah mencapai lima belas tahun.”

Ayat (4) “ Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3,persetujuan dari saudara-saudara laki-lakinya yang telah dewasa dan dari ayah suaminya yang telah meninggal, dan apabila mereka ini tidak ada dan atau tidak tinggal di Indonesia, persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang tinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal sampai derajat keempat.”

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5) *Staatsblad* 1917 Nomor

129 disebutkan:

Ayat (1): “Persetujuan dari orang-orang yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, bukan ayah atau wakil dari orang yang diadopsi, jika tidak diperoleh, seperti halnya juga kalau terdapat anggota-anggota keluarga yang dimaksud pada akhir ketentuan itu, dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri, dalam wilayah hukumnya janda yang hendak melakukan adopsi itu bertempat tinggal.”

Ayat (2): “Atas permohonan janda tersebut, Pengadilan Negeri di luar bentuk acara dan tanpa kemungkinan banding setelah putusan, setelah mendengar atau memanggil dengan patut seorang yang persetujuannya dibutuhkan dan demikian pula orang-orang lain yang oleh Pengadilan Negeri dianggap perlu.”

Ayat (3): “Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”

Ayat (3): “Jika orang-orang yang harus di dengar itu bertempat tinggal di luar wilayah di mana Pengadilan Negeri yang berwenang berkedudukan, maka Pengadilan Negeri tersebut dapat melimpahkan pemeriksaan itu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat mana harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”

Ayat (4): “Ketentuan dalam Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia terhadap anggota anggota keluarga sedarah atau semenda yang dimaksud didalamnya, berlaku juga terhadap orang-orang yang harus di dengar di dalam pasal ini.”

Ayat (5): “Tentang izin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri itu harus dinyatakan dalam akta pengangkatan.”

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) *Staatsblad* 1917 Nomor 129

disebutkan:

Ayat (1): "Adopsi hanya dilakukan dengan akta notaris."

Ayat (2): "Pihak-pihak harus menghadap sendiri didepan notaris atau melalui seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris."

Ayat (3): "Orang-orang yang dimaksud dengan nomor 4 Pasal 8, kecuali siapapun dari mereka yang sebagai ayah atau wali menyerahkan anak untuk diadopsi dapat secara bersama-sama atau masing-masing memberi persetujuannya, tentang hal mana harus dinyatakan dalam akta pengangkatan."

Ayat (4): "Setiap yang berkepentingan dapat menuntut agar tentang adopsi dicatat pada tepi akta kelahiran dari orang adopsi."

Ayat (5): Namun tidak adanya suatu catatan tentang adopsi pada tepi akta kelahiran, tidak dapat digunakan sebagai senjata anak angkat, untuk akhirnya menyangkal pengangkatannya."

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah:

1. Untuk melakukan pengangkatan anak disyaratkan persetujuan dari orang dan orang-orang yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan untuk dapat mengangkat anak yang merupakan anak sah, anak luar kawin, anak yang sudah mencapai usia limabelas tahun, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda.
2. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta Notaris. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak harus menghadap sendiri di depan Notaris. Apabila para pihak berhalangan, maka dapat diwakilkan oleh seorang wakil khusus yang dikuasakan dengan akta Notaris.
3. Para pihak yang mengangkat dan akan diangkat sebagai anak dapat menuntut agar pengangkatan anak yang telah dilakukan dihadapan Notaris, dicatatkan pada tepi akta kelahiran dari orang yang diadopsi.
4. Bila tidak dilakukan pencatatan tentang pengangkatan anak pada tepi akta kelahiran anak yang diangkat, maka yang diangkat tersebut tetap saja tidak dapat menyangkal tentang pengangkatan.⁷⁵

Menurut Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak memberikan status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali, berarti anak yang diangkat tersebut mempunyai hak-hak yang

⁷⁵Zeila Mochtar, *Op. Cit*, halaman 166.

sama seperti anak sah, misalnya persamaan dalam hal kekuasaan orang tua, hak mewaris. Hal mana semuanya dari orang yang mengangkatnya dan hubungan dengan orang tua aslinya terputus. Dalam Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa “dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang anak laki-laknya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka.”

Pengangkatan anak perempuan tidak dapat dilakukan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129, bahwa “pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan anak dengan cara lain kecuali dengan akte notaris batal demi hukum”. Berdasarkan yurisprudensi tertanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963P atau Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tahun 1963, ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.⁷⁶

Hal yang menarik adalah konsekwensi lebih lanjut dari pernyataan putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tersebut yang menyatakan tidak berlakunya beberapa pasal dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917, yaitu bahwa adopsi itu tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, tetapi cukup ditetapkan dalam keputusan Pengadilan saja.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan

⁷⁶Putusan Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum. 2. Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh *Staatsblad* No. 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa. 4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.⁷⁷

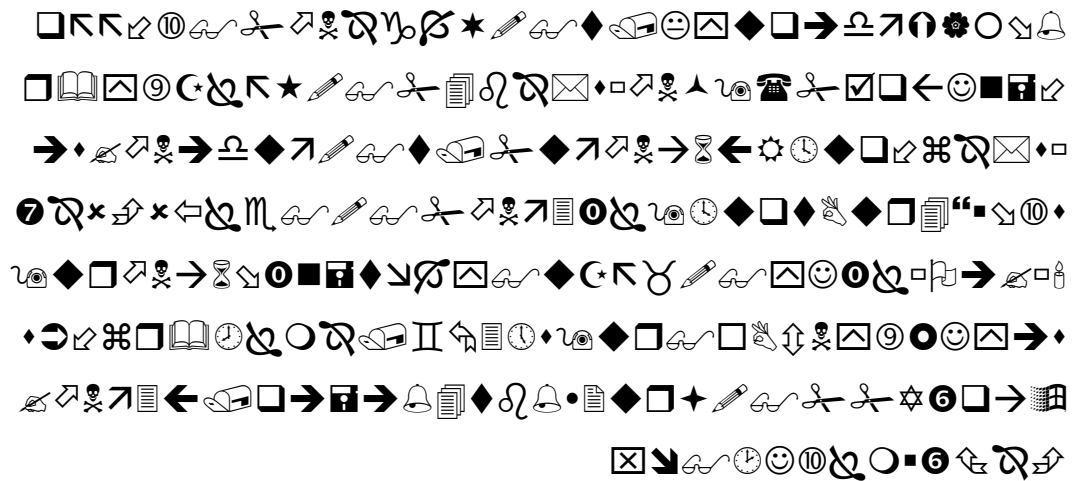
Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Menurut Ali Affandi, adopsi tidak mungkin diatur dalam KUHPdata karena KUHPdata memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.⁷⁸ Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, maka:

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal 11);
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Pasal 12 ayat (1));
3. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;

⁷⁷Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", dalam *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4 Oktober 2013, halaman 140.

⁷⁸Ali Affandi. Tanpa tahun. *Hukum Keluarga Menurut KUHPdata*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, halaman 57.



Artinya: “Allah tidak menjadikan seorang mempunyai 2 hati dalam dadanya, dan tiada pula menjadikan isterimu yang kamu ceraikan dengan zihar menjadi ibumu dan anak angkatmu anakmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Surat Al-Ahzab (33: 4-5) tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸⁰

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena

⁸⁰Sumiati Usman, *Op.Cit*, halaman 142.

ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut dengan *al-tabanni* yang dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau seseorang seperti anak kandung sendiri.⁸¹ Sedangkan Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah "*da'iyyun*", yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.⁸²

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *tabanni* adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orangtua kandungnya.⁸³ Pengertian pengangkatan anak yang demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Secara terminologi, Mahmud Syalthut memberikan dua pengertian yaitu: Pertama, *al-tabanni* adalah mengambil anak orang lain, untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya.

⁸¹ Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 9. Lihat juga Andi Syamsul Alam, Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 19.

⁸² Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 5 Desember 2017.

⁸³ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, halaman 78.

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan mengubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya, berhak mewarisi, serta memiliki hak dan kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.⁸⁴

Menurut Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *al-tabanni* dalam pengertian yang pertama dilakukan berdasarkan keinginan seseorang untuk membantu orang tua kandung yang tidak mampu memberikan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok dan perlindungan yang layak, sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5): 2. Sedangkan *al-tabanni* dalam pengertian yang kedua cenderung menasabkan seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengaburkan asal-usul seseorang dan menimbulkan kesalahpahaman. Larangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab (33): 4-5.⁸⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak angkat dalam khasanah hukum Islam ialah anak kandung seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk diasuh dan didik secara layak,⁸⁶ akan tetapi ia tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak-hak sebagai anak kandung.⁸⁷

Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

⁸⁴Abdul Aziz Dahlan (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, halaman 29-30.

⁸⁵Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Op. Cit*, halaman 22.

⁸⁶A. Rahmad Budiono. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 187.

⁸⁷Safiudin Shidik. 2004. *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Inti media Citra Nusantara, halaman 113.

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Zakiah Darajat, anak angkat ada 2 (dua) macam, yaitu:⁸⁸

1. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak ini nantinya menjadi orang yang berpendidikan dan berguna.
2. Pengangkatan anak yang didasarkan pada adat kebiasaan yang disebut dengan *tabanni*, yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.

Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sementara di masyarakat Arab sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu Huzaifah mengangkat Salim bin 'Atabah menjadi anak. Salim pun dipanggil dengan panggilan Salim bin Huzaifah. Keadaan ini berakibat turunnya Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang merupakan suatu bentuk teguran dari Allah SWT.⁸⁹

Oleh karenanya dengan makna khusus, agama Islam tidak melarang pengangkatan anak. Makna khusus disini diartikan sebagai pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan si anak. Yang tidak dikenal, atau secara tegasnya dilarang oleh agama Islam adalah (a)

⁸⁸Zakiah Darajat, et.al. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, halaman 145.

⁸⁹M. Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman. 83.

pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan dan (b) dijadikan seperti anak kandung.⁹⁰

M. Budiarto menyatakan bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat, sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁹¹ Berdasarkan pemahaman yang demikian, hukum Islam membolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orangtua angkat.

Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan dalam kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.⁹² Dengan kata lain anak angkat tidak dapat dipersamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri. Sementara itu pengertian anak angkat juga terdapat di dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Di dalam pasal tersebut jelas terlihat bahwa pengangkatan anak menurut KHI mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya

⁹⁰A. Rachmad Budiono, *Op.Cit*, halaman 192.

⁹¹M. Budiarto, *Op. Cit*, halaman 5.

⁹²M. Fahmi Al Amruzi, *Op. Cit*, halaman 83.

pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya.

Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun KHI. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.

B. Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta harapan dan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Oleh karena itu, setiap anak harus dapat melewati masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.⁹³ Pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara terhadap status manusia sebagai subjek hukum dibuktikan dengan akta kelahirannya. Demikian pula seorang anak diakui sebagai subjek hukum, maka kelahirannya harus dicatat karena merupakan pengakuan negara terhadap status anak. Seorang anak dalam menikmati hak dan memenuhi kewajibannya masih memerlukan bantuan orang tuanya, walinya, ataupun orang lain, karena

⁹³Riduan Syahrani. 1989. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 44.

dianggap belum cukup bertindak terhadap hukum. Ketidaccakapan seorang anak menjadikannya dianggap belum dewasa.

Pengangkatan anak menurut hukum Perdata disebut dengan istilah adopsi. Kata adopsi berasal dari bahasa Belanda "*adoptie*" atau "*adoption*" dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak, yaitu tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang. Istilah adopsi menjadi terkenal di Indonesia dengan keluarnya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang menyebut pengangkatan anak dengan istilah adopsi. Meskipun kata adopsi pengertiannya sama dengan pengangkatan anak, namun isi dan pelaksanaannya berbeda. Pada adopsi ditekankan pada kedudukan anak yaitu dari orangtua kandung, setelah diangkat akan berubah menjadi anak yang dianggap secara biologis sebagai anak dari orangtua yang mengangkatnya.

Istilah pengangkatan anak mengandung maksud bahwa dengan pengangkatan anak itu belum tentu harus menyebabkan perubahan status seperti yang dimaksud adopsi menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Pada awalnya di dalam *Burgerlijk Wetboek* Belanda tidak mengenal adanya lembaga pengangkatan anak, hal tersebut dikarenakan menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah.⁹⁴

Dengan demikian di Belanda tidak dapat menciptakan keturunan secara buatan atau artificial (*adoption naturam imitatur*), sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang dapat diakui hanya anak kandung sendiri. Itulah yang menyebabkan dalam KUHPerdata Indonesia tidak dikenal lembaga pengangkatan anak. Gouw Giok Siong berpendapat bahwa adopsi sudah tidak

⁹⁴R. Subekti. 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 21.

mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak hanyalah golongan Bumiputera dan golongan Tionghoa.⁹⁵ Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum berubah.

Berdasarkan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, KUHPerdata dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUHPerdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. StaatsbladTahun 1917 Nomor 129 itu bukan sekedar menentukan berlakunya hukum Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II-nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku di kalangan orang-orang Tionghoa.⁹⁶

Pada kenyataannya, secara umum pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:⁹⁷

1. *Adoptio Plena*, yaitu adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.
2. *Adoptio Minus Plena*, yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya.

Akibat hukum adopsi seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa adopsi di dalam hukum Perdata masuk ke dalam kategori *Adoptio Plena*, yaitu merupakan adopsi yang menyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya, sehingga anak yang diangkat terputus sama sekali hubungan

⁹⁵ Ghina Kartika Ardiyati, Hj. Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 5 Desember 2017.

⁹⁶ Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

⁹⁷ Sudargo Gautama. 1981. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2. Bandung: Alumni, halaman 66.

hukumnya dengan orangtua kandungnya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang angkatnya. Dimana hal tersebut berakibat anak angkat mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandungnya.

Adopsi yang dilakukan menurut hukum Perdata, menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Dimana adopsi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri membawa akibat hukum terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, sehingga dengan terputusnya hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tersebut akan turut membawa akibat-akibat hukum yang lain, yaitu anak angkat tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memakai nama keturunan dari orangtua kandungnya karena secara hukum anak tersebut telah keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, dan anak angkat tidak lagi berhak menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya.

Kedudukan anak angkat dibedakan atas anak angkat yang tidak diakui dan anak angkat diakui serta disahkan. Oleh karena itu pemerintah Belanda berusaha membuat aturan tersendiri yaitu dalam Bab II staatsblad 1917 Nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan Timur asing khususnya masyarakat Tionghoa. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah

dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.⁹⁸

Akta kelahiran menunjukan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya” .

Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁹⁸Nursyahbani Katjasungkana, *Loc. Cit.*

berlaku. Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Didasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT

A. Hak Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau ar 58 am keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melaksanakan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk.
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang menjadi objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁹⁹

B. Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

1. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut KUHPerdata

Kewarisan terjadi apabila ada kematian seseorang (pewaris) dengan meninggalkan harta kekayaan (warisan) dan keturunan yang sah dan sedarah (ahli waris). Segala kewajiban perorangan, dengan meninggalnya seseorang pada prinsipnya tidak beralih kepada orang lain. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, beralih kepada pihak yang masih hidup yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris. Masalah hukum kewarisan adalah merupakan suatu masalah yang sangat sensitif karena menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama dan adat istiadat serta susunan kekerabatan dalam masyarakat.

KUHPerdata membagi dua ahli waris, yaitu ahli waris menurut undang-undang dan menurut testamen (wasiat).¹⁰⁰ Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang menunjuk sebagai ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau isteri yang masih hidup. Seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan sedarah dan hubungan perkawinan.

⁹⁹ Ahmad Kamil dan M. Fuzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 68.

¹⁰⁰ Suparman Usman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Darul Ulum Press, halaman 52.

Ahli waris menurut undang-undang ada dua yaitu *ab intertaad* dan *legitimaris*. *Ab intertaad* biasa adalah ahli waris berdasarkan keturunan darah, baik garis lurus maupun garis kesamping sesuai dengan golongan ahli waris dalam undang-undang sampai derajat ketujuh, sedangkan ahli waris *legitimaris* yaitu ahli waris *ab intertaad* dari pewaris yang mempunyai jaminan khusus yaitu mereka tidak boleh menerima dari peninggalan pewaris kurang dari bagian terkecil yang telah ditetapkan untuk mereka (Pasal 912 KUHPerdara).

Ahli waris menurut *testemen* adalah siapa saja yang disebutkan dalam *testemen* dengan tidak mengurangi pengecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdara. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tertentu tergantung kehendak pembuat wasiat. Dengan demikian, ahli waris mendapat bagian warisan berdasarkan penunjukan si pewaris pada waktu ia masih hidup. Terkadang wasiat berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan dan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Namun demikian, kebebasan untuk membuat surat wasiat dibatasi Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak. Dengan demikian yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.

Menurut Pasal 832 KUHPerdara dinyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Pasal 290 KUHPerdara menyatakan bahwa keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang

mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Dengan demikian, pewarisan pada intinya menyatakan hak seorang janda atau duda setelah pasangan meninggal dunia, maka yang hidup terlama menjadi ahli warisnya (janda atau duda yang masih hidup) dan anak keturunannya bila ada.

Pewarisan secara otomatis terjadi pada waktu ada yang meninggal. Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Apabila timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli waris dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan agar segala harta peninggalan si yang meninggal di taruh dulu dalam penyimpanan. Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus meminta keputusan hakim terlebih dahulu dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang.”

Seseorang yang akan menerima waris harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus ada yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara), ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia; dan ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam artian tidak dinyatakan oleh undang-

undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian atau dianggap tidak cakap menjadi ahli waris.

Menurut Pasal 838 KUHPerdara ditegaskan tentang orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan adalah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah menunjukkan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat dan mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Ketidakpatutan ini menghalangi ahli waris tersebut untuk menerima warisan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pewaris dan keluarganya dari tindakan pihak lain (ahli waris) yang tidak beritikad baik. Dalam KUHPerdara, peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan, karena apabila ia menerima maka harus menerima segala konsekuensinya, salah satunya masalah melunasi seluruh hutang pewaris.

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan didalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau

pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata (*Burgerlijk Weetboek*). Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum Perdata, seseorang dapat mewaris karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Anak adopsi dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orangtua angkat, akan tetapi dikarenakan di dalam pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 telah diatur bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Dalam hal pewarisan, anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUH Perdata, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat

penggolongan ahli waris, karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak adopsi, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak adopsi tersebut, yakni anak adopsi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya.¹⁰¹

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.¹⁰²

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.¹⁰³ Pengadilan dalam

¹⁰¹ Ghina Kartika Ardiyati, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

¹⁰² B. Ter Haar. 1985. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 247.

¹⁰³ R. Wirjono Prodjodikoro. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, halaman 29.

praktiknya telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Hubungan darah : mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
2. Hubungan waris : dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
3. Hubungan perwalian : dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.
4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.

Staatblad 1917 No. 219 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11: “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
2. Pasal 12 ayat 1: “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.

Bila anak adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada KUHPerdara yang meliputi:
 - a. Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdara). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap dibawah kekuasaan

¹⁰⁴M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 21.

¹⁰⁵J. Satrio. 2005. *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya, halaman 236.

- orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdara)
- b. Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdara)
 - c. Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan kesegaran terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.
2. Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1974 yang meliputi:
- a. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu :
Didalam Pasal 45 dinyatakan bahwa :
 - 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - 2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pengangkatan anak akan memengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Berdasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.¹⁰⁶

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini,

¹⁰⁶R. Soepomo dalam M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 97-98.

biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa barat disebut *wekason* atau *welingan*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan* dan di Tapanuli *ngeudeskan*.¹⁰⁷

Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnyaharta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hakmutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Halini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962Pn.Tjn, tanggal 13 oktober 1962 dan didasarkan putusanMahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak bolehmerugikan ahli waris dari si penghibah.¹⁰⁸

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahwasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerdata mengenal asas *Ligitimeportie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerdata. Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerdata, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime portie*.Pasal 913 KUHPerdata, yang dijamin dengan bagianmutlak atau *Ligitime portie* itu adalah para ahli warisdalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya sertaorang tua dan leluhurnya ke atas.

Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang

¹⁰⁷Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, halaman 58.

¹⁰⁸*Ibid*, halaman 120.

mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdara dan berlaku "*Ligitime portie*" (Pasal 913 sampai Pasal 929).

Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (*testamen*) yang di buat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

Ahli waris menurut surat wasiat (*testamentair*) yaitu siapa saja yang disebutkan dalam *testamenter* dengan tidak mengurangi kekecualian yang diatur dalam Pasal 895-912 KUHPerdara tentang kecakapan seseorang untuk membuat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat. Jumlah ahli waris menurut wasiat tidak tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut undang-undang (*ab Intestato*).

Staatsblad 1917 Nomor 129 menentukan bahwa akibat hukum perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 berbunyi: "Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak."
2. Pasal 12 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-laknya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka."
3. Pasal 14 berbunyi: "Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis ke samping dengan orang yang diangkat".

J. Satrio lebih lanjut mengatakan bahwa sebagai akibat dari tindakan pengangkatan anak, pembuat undang-undang tersebut membuat fiksi bahwa seakan-akan orang yang diangkat anak, dilahirkan dari perkawinan suami-isteri yang mengangkat anak.¹⁰⁹ Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkat anak, maka dalam keluarga, anak angkat berkedudukan sebagai anak sah. Sekarang dengan adopsi itu, pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Stbl. 1917 No. 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang mengangkat anak, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Stbl. 1917 No. 129). Akibat yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya anak angkat itu sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang angkatnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ J. Satrio, *Op.Cit.*, halaman 242.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 245.

2. Kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari bapak kandungnya dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Hal ini berarti pengangkatan anak dalam arti sebenarnya yaitu menjadikannya sebagai anak kandung, tidak diakui oleh hukum Islam. Begitu pula akibat-akibat hukum dari pengangkatan anak sebagaimana tersebut, tidak diakui dalam hukum Islam.

Sebagaimana halnya dengan pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak angkat yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Keluhuran dan ketulusan orang tua angkat terhadap anak angkat biasanya mendapatkan balasan yang sama dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya, sehingga akan membentuk suatu ikatan batin yang erat, sama dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Anak angkat yang dipelihara tersebut setelah dewasa bukan tidak mungkin akan menjadi lebih dekat kepada orang tua angkatnya dibandingkan dengan anak kandung orang tua angkatnya.

Atas dasar itulah, hukum Islam mempunyai suatu kebijaksanaan yang ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Meskipun dalam Pasal 171 huruf H KHI yang menegaskan “status anak angkat hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan” menunjukkan bahwa anak angkat tidak berstatus sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Untuk memberikan rasa keadilan bagi anak angkat, maka pembuat peraturan juga memberikan suatu jalan agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya melalui konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 KHI.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹¹¹ Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.¹¹²

Menurut Fathur Rahman, orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama

¹¹¹ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi. Cet. 1., halaman 371.

¹¹² Fathur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, halaman 63.

dengan kakek atau neneknya.¹¹³ Hukum Islam (KHI) dalam hal ini membuat ketentuan tersendiri, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat.

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam, akan tetapi pengangkatan anak seseorang menjadi anak angkat tidak menjadikan anak angkat itu seperti anak sendiri yang mempunyai hubungan darah. Menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hal ini dapat dilihat pada Surat Al-ahzab 33 ayat 4-5 yang secara garis besarnya merumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak pernah menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu adalah bukan anak kandungmu;

Dengan demikian, dalam hukum kewarisan Islam tidak mengakui keberadaan anak angkat dalam pengertian adopsi menurut Hukum Barat, yang mana kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung sehingga dapat waris mewarisi dengan orang tua angkatnya dan keluarga orang tua angkatnya.

Anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Hubungan orang tua angkat dengan anak angkat yang menyangkut masalah kewarisan, dapat terjadi melalui hibah atau wasiat, atau pemberian sukarela dari para ahli waris, pada saat pembagian warisan itu.

¹¹³ *Ibid*, halaman 63-64.

Pasal 209 KHI menentukan, bahwa:

- 1) Harta peninggalann anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Bertolak dari uraian-uraian diatas bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam menimbulkan hubungan hukum yang berupa wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya sehingga berhak mewaris dari orang tua kandungnya.

C. Kepastian Hukum Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.¹¹⁴

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak

¹¹⁴Djaja S.Meliala. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, halaman 224 .

kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.¹¹⁵

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitime portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917

¹¹⁵Muhammad al-Ghazali, *Op. Cit*, halaman 104.

No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandunganya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandunganya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandunganya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandunganya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerdara.

Masih terjadinya kesemrawutan hukum terkait dengan hak waris anak angkat, tentu saja memberikan ketidakpastian hukum bagi hak anak angkat atas harta peninggalan orang tuanya. Hal lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah dari sisi psikologis si anak angkat. Bukan hal yang tidak mungkin terjadi pada kenyataannya banyak anak angkat yang ternyata lebih perhatian dan sayang kepada orang tua angkatnya daripada anak kandung orang tua angkat itu sendiri. Semestinya undang-undang dan juga hakim melihat hal itu sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat.

Berbeda halnya dengan hukum Islam dalam konteks Indonesia dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya namun diberikan wasiat wajibah yang jumlahnya tak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Ketentuan wasiat wajibah dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193 KHI. Sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-

banyaknya 1/3 dari hartawasiat anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya,terhadap anak angkat yang tidakmenerima wasiat diberi wasiat wajibahsebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisanorang tua angkatnya.¹¹⁶

Menurut Muhammad Daud Ali, pemberian hak wasiat wajibah terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam karena berpindahnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak.¹¹⁷ Berkaitan dengan pasal ini, Roihan A. Rasyid menyatakan bahwa berlakukanya wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat bersifat imperatif. Meskipun ketentuan ini terinspirasi oleh QS. al. Baqorah (2):180, ia menyangkal bahwa anak atau orang tua angkat termasuk dalam katagori *validain* (kedua orang tua) dan *aqrobin* (kerabat dekat atau karib kerabat). Untuk mendukung argumentasinya, Roihan, mengutip Q.S. al-Ahzab (33):4-5 dan menyatakan bahwa ayat ini bersifat *qath'i* (pasti) sehingga tidak menerima ijtihad di dalamnya.¹¹⁸

Sebagai catatan akhir, perlu dicermati pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wasiat wajibah, antara lain; pertama, harta yang akan diberikan kepada seseorang hanya dapat disalurkan melalui wasiat, bukan waris. Jika ia memperoleh harta waris, maka tidak wajib dilakukan wasiat wajibah terhadapnya. Kedua, orang yang meninggal belum memberikan harta kepada orang tersebut melalui cara

¹¹⁶Mochammad Taqrib, *Op. Cit.*, halaman 48.

¹¹⁷Muhammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Pengadilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 137.

¹¹⁸Roihan A, Rasyid, "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah", dalam Cik Hasan Bisri (ed). 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, halaman 93.

yang lain, seperti hibah. Jika telah diberikan melalui hibah dan menyatakan kurang, maka wajib dipenuhi hingga sepertiga bagian.¹¹⁹

Nampaknya ketentuan hak atas harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat yang terdapat dalam KHI lebih memberikan kepastian hukum. Pasal dalam KHI tersebut memang jelas memberikan bagian anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Kepastian hukum sendiri mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹²⁰

Ketentuan dalam KHI terhadap hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat juga sesuai dengan pendapat Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:¹²¹

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara

¹¹⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pusaka Rizki, halaman 277.

¹²⁰ L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 44.

¹²¹ Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, halaman. 79-80.

kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung terdapat disparitas putusan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.182 K/Sip/1959 tanggal 15 juli 1959 menyebutkan; anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang di warisi oleh orang tua angkat tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 menyebutkan; menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat yang di perkenankan mewarisi harta gonogini dari orang tua angkatnya.jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor : 516 K/Sip/1968 tanggal 14 Januari 1969, menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak rnewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh atau hadiah (hibah) dari orang tua angkatnya selagi hidup."¹²²

Berdasarkan uraian ini dapatlah dipahami bagaimana kedudukan anak angkat dari berbagai daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Status hukum di berikan kepada anak angkat berupa berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, harta gonogini dari orang tua angkatnya. Sangat berbeda dengan hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Disparitas putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut ternyata

¹²² Surojo Wingjodipuro. 1990. Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Haji Masagung, halaman 163-164.

tidak terlepas dari pengaruh kearifan lokal (baca adat istiadat) masing-masing daerah yang tentu mengenal lembaga pengangkatan anak dalam perspektif yang berbeda terkait hak-hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Masalahnya adalah putusan yang dispartitas itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Sedangkan Yurisprudensi di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasar wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya memberi bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris.¹²³

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹²⁴ Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹²⁵

1. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
3. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
4. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

¹²³ Habiburrahman, "Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 16, No. 2, Agustus 2014, halaman 129.

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 157-158.

¹²⁵ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, halaman 293.

Berdasarkan pemikiran Achmad Ali di atas terkait dengan makna kepastian hukum, maka seharusnya putusan terkait dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya tidak boleh sering diubah-ubah karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹²⁶

Merujuk kepada teori kepastian hukum tersebut, maka disparitas putusan terhadap hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat harus segera diakhiri. Adanya kepastian hukum terhadap hak-hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya tentu akan memberikan ketenangan bagi anak angkat maupun orang tua angkat demikian pula dengan anak kandung dari orang tua angkat.

¹²⁶ *Ibid*, halaman 159-160.

Adanya beberapa regulasi yang mengatur tentang hak anak angkat terhadap harta peninggalan tersebut menunjukkan bahwa Negara melalui undang-undang, hadir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi anak angkat. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau meletakkan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹²⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

¹²⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media, halaman 157-158.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan peraturan tersebut b demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang ter karena adanya peraturan itu harus dipulihkan.

BAB IV

PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA NASIONAL TERKAIT HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT PADA MASYARAKAT NONMUSLIM

A. Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat kepada Anak Angkat dalam Perspektif Agama Hindu Bali

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.¹²⁸

Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia,

¹²⁸Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, dalam *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, halaman 38.

sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang pengangkatan anak ini. Kenyataan adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, menjadikan tema ini menarik melihat bagaimana sistem hukum Islam, BW dan hukum adat dalam memposisikan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.¹²⁹

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW); hukum adat yang merupakan *the living law* yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam.

Salah satu agama yang hidup di Indonesia adalah agama Hindu. Agama Hindu di Indonesia mayoritas berkembang di Bali. Bahkan semua sendi kehidupan di Bali semua berasal dari ajaran agama Hindu, sehingga sangat sulit mengidentifikasi antara adat istiadat dan ajaran agama Hindu, karena semua bersatu dan dipedomani oleh orang Bali. Bali merupakan pulau kecil di Indonesia, tetapi Bali memiliki keunikan tersendiri yang lain daripada pulau-pulau manapun di Indonesia bahkan di dunia. Kekhasan Pulau Bali sendiri dapat dilihat dari begitu banyaknya julukan yang diberikan dunia luar terhadap Bali,

¹²⁹Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif), dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, Nomor 2, Desember 2016, halaman 184.

diantaranya pulau surga, pulau dewata, pulau seribu pura dan banyak sebutan lainnya. Selain julukan tersebut Bali juga terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, adatnya kuat serta budayanya yang khas, dan tidak lepas dari implementasi ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat Bali yaitu agama Hindu.¹³⁰

Landasan agama Hindu yang paling menonjol dan menjadi penerapan atau yang menjadi tuntunan dalam pola kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yakni, konsep *Tri Hita Karana* yaitu tiga penyebab kebahagiaan yang terdiri dari: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Wianamenyebutkan bahwa Parahyangan adalah media umat Hindu untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, Pawongan adalah media untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan Palemahan adalah media untuk membangun hubungan yang harmonis dengan alam /lingkungan.¹³¹

Di dalam kehidupan orang Bali, dikenal beberapa istilah atau pengertian dan macam-macam anak. Anak *sentana rajeg*, jika didalam keluarga hanya dapat dilahirkan satu anak yang berjenis kelamin wanita, maka anak ini diangkat statusnya menjadi anak laki-laki.¹³² Hal ini akan terjadi jika anak perempuan itu kawin keceburin (menarik suaminya masuk keluarga ayahnya atau tidak kawin keluar) sedangkan anak dalam arti kandung sendiri adalah anak lakilaki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah, dimana anak laki-laki adalah

¹³⁰ I Wayan Martha, I Nyoman Surtana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Akibat Konversi Agama Hindu Ke Agama Kristen (Di Desa Pakraman Taro Kaja) Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar), dalam *Widya Wretta Jurnal Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2017, halaman 87.

¹³¹ I Ketut Wiana, 2007, *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita, halaman 8.

¹³² Ketut Artadi, 1980, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post, halaman 10.

berstatus sama dengan anak *sentana rajeg* sedang anak perempuan adalah anak yang tidak mewaris.¹³³

Selain itu di Bali dikenal pula anak angkat yaitu anak laki-laki atau statusnya diangkat sama dengan anak laki-laki yang pengangkatan itu mengakibatkan status anak angkat itu menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Pengangkatan anak ini pada umumnya dilakukan oleh keluarga atau suami istri yang telah bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun tidak memiliki anak. Yang terpenting dalam soal anak angkat adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali, tujuan pengangkatan anak pada hakikatnya untuk melanjutkan keturunan, tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkatan anak meninggal dunia.¹³⁴

Menurut Gede Penetje, hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan Patriarchaat, menentukan hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi penyusunan keluarganya. Selanjutnya dikatakan bahwa keluarga dari bapaknya atau keluarga dari pancar laki-laki (*purusa*) adalah yang paling penting dalam penghidupannya dan harus mendapat perhatian yang lebih dahulu dari pada keluarga dari pihak ibunya, karena pancar laki-lakilah maka yang pertama-tama mewarisi adalah si anak dan sianak akan menuruti kasta bapaknya dan ia masuk *dadia* bapaknya.¹³⁵

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ | Gede Panetje, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Kayumas, halaman 39.

Bagi masyarakat hukum adat di Bali, keturunan dari satu pihak, yaitu pihak bapak disebut dengan istilah, “tunggal dadia”, “tunggal sanggah” atau “tunggal kawitan”. Maksudnya, mempunyai satu atau ketunggalan leluhur yang dilacak tidak hanya dari satu generasi melainkan berpuluh-puluh generasi keatas. Keistimewaan hukum adat kekeluargaan bagi masyarakat hukum adat di Bali adalah mengusahakan selama mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan, persembahyangan tertentu yang dilakukan dan dilanjutkan oleh keturunan laki-laki. Disamping itu, anak laki-laki yang melanjutkan kewajiban di banjar/desa pakraman, kewajiban mengabenkan orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Anak laki-lakilah yang dapat membukakan jalan menuju surga, oleh karena itu anak laki-laki tidak ada, maka dapat digantikan oleh anak angkat baik anak angkat laki-laki maupun anak angkat perempuan, hanya saja apabila anak angkat tersebut perempuan maka harus melakukan perkawinan nyentana agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anak laki-laki.¹³⁶

Pada hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah seperti *meras pianak* atau *meras sentana*. Kata *sentana* berarti anak atau keturunan dan kata *meras* berasal dari kata *peras* yaitu semacam sesajen atau banten untuk pengakuan/pemasukan si anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Disamping istilah tersebut di atas ada pula yang memakai istilah atau menyebut dengan *ngidih sentana/ngidih pianak*. Penyebutan tersebut mengandung pula pengertian sama dengan pengertian *meras sentana* ataupun *meras pianak*.

¹³⁶ Nyoman Sukerti, 2002, *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press, halaman 8.

Adapun yang dimaksud dengan anak angkat dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain diangkat oleh orang tua angkatnya menurut adat setempat, sehingga dia mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Hal ini selanjutnya akan membawa akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan, waris dan kemasyarakatan. Konsekuensinya disini segala hak dan kewajiban yang ada ada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Dari pengertian pengangkatan menurut Hukum Adat Bali seperti tersebut di atas dapat dijabarkan:

1. Adanya perbuatan melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandung.
2. Adanya perbuatan memasukkan si anak ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya.

Pengertian melepaskan si anak adalah perbuatan berupa permintaan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung si anak atau kerabat si anak. Permintaan itu untuk melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandungnya/kerabatnya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkat untuk didudukkan sebagai pelanjut keturunan. Perbuatan hukum ini termasuk pula pengumuman atau siaran yaitu pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat adat maupun kepada kerabatkerabat si anak itu. Adapun maksud dari pengumuman itu agar ada kata sepakat untuk melepas si anak tersebut dan perbuatan tersebutpun menjadi terang.

Pengertian memasukkan si anak ke dalam kerabat orang tua angkatnya tercermin dalam perbuatan yang berupa pelaksanaan upacara pemerasan atau mewidiwidana. Secara keagamaan hal ini mengandung arti bahwa si anak akan dilepas dari kekuasaan baik dari orang tua kandungnya/kerabat maupun

leluhurnya untuk selanjutnya dimasukkan dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Disamping itu upacara tersebut juga mengandung arti bahwa si orang tua angkat selanjutnya akan mengakui si anak tadi sebagai anak kandung sendiri. Mulai saat itulah timbul hubungan hukum antara si anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian secara yuridis anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak lagi ada hubungan waris mewaris tapi ia mewaris pada orang tua angkatnya.

Bila membandingkannya dengan pengangkatan anak di luar daerah Bali misalnya yang mempunyai sistem kekeluargaan parental seperti di daerah Jawa, maka pengangkatan anak tidaklah mempunyai konsekuensi yuridis seperti di Bali. Padamasyarakat adat di Jawa kedudukan anak angkat hanya sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, ia tidak berstatus sebagai anak kandung.¹³⁷

Pengangkatan anak dilakukan melalui upacara Paperasan yaitu upacara yang dihadiri oleh kepala adat dan keluarga dalam satu “pakraman” atau kekeluargaan. Upacara dilakukan dengan membakar benang melambangkan hubungan dengan ibunya putus, dan pembayaran adat berupa 1.000 (seribu) kepeng serta seperangkat pakaian, yang kemudian diumumkan (siar) kepada warga desa, dan kemudian raja memberikan izinnya dengan membuat akta (“surat Peras”).¹³⁸

Memperhatikan ketentuan di atas, tampak ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan apabila pasangan suami-istri ingin mengangkat anak, yaitu: (1). Anak yang diangkat berasal dari anggota keluarga sedarah terdekat

¹³⁷ R. Soepomo, 2000, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 104.

¹³⁸ www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid, diakses tanggal 23 Maret 2018.

("kasta" yang sama), dalam garis keturunan laki-laki. (2). Perlu mendapat persetujuan keluarga dan desa. Dalam pengangkatan anak (adopsi) kemenakan ini selain dilatarbelakangi karena alasan tidak atau belum dikaruniai anak, juga terdorong oleh rasa kasihan atau iba. Perbedaan antara adopsi kemenakan dan adopsi dengan satu clan/kekerabatan dalam perbedaan status dan tidak adanya pembayaran.

Menurut Tolib Setiady , pada umumnya pada masyarakat Bali terdapat sebab-sebab mengangkat anak dari keponakan adalah:

1. Tidak mempunyai anak sendiri sehingga dengan mengangkat keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Belum dikaruniai anak sehingga dengan mengangkat anak tersebut, diharapkan akan mempercepat kemungkinannya akan mendapatkan anak (kandung).
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan karena misalnya hidupnya kurang terurus, dan lain sebagainya.¹³⁹

Pada mulanya alasan pengangkatan anak di Bali dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Di samping alasan tersebut juga sebagai pancingan agar dapat melahirkan anak kandung, dan keabsahan kekuatan hukum pengangkatan anak tidak terganggu apabila nantinya ibu angkat melahirkan anak kandung. Dengan demikian pengangkatan anak dengan sendirinya mempersaudarakan anak kandung dengan anak angkat.¹⁴⁰

Pada masyarakat Bali yang beragama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh anak (putra), yang diharapkan dapat melanjutkan peribadatan keluarga seperti melakukan persembahyangan di pura, melaksanakan pemujaan

¹³⁹Tolib setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, halaman 30.

¹⁴⁰Meri Wanyi Rihi, "Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Denpasar). Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, halaman 21.

terhadap leluhur mereka. Dengan tujuan agar keluarga tersebut selamat dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹⁴¹

Begitu pentingnya keturunan (anak) ini dalam suatu perkawinan sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai peristiwa sebagai akibat ketiadaan anak seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak itu sendiri. Demikian dikatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak) maka tujuan perkawinandianggap telah tercapai dimana proses pelanjutan generasi dapat pula berlangsung.

Masyarakat hukum adat Bali adalah menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan garis *kepurusa*.¹⁴² Sistem kekeluargaan patrilineal pada masyarakat Bali merupakan suatu prinsip, suatu sikap yang magis religius. Adapun ciri-ciri hukum kekeluargaan patrilineal di Bali tampak dalam penguasaan kepada anak laki-laki untuk melaksanakan pemujaan leluhur, dan mengabdikan kepada desa yang banyak memerlukan tenaga bagi warga desa.¹⁴³

Konsekwensi dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki adalah sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orang tuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di masyarakat hukum adat Bali adalah berkedudukan di samping sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Ketentuan tersebut tidak berlaku

¹⁴¹ I Gde Pudja, 1977, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: Mayasari, halaman 71.

¹⁴² Gede Panetje, *Loc. Cit.*

¹⁴³ V.E. Korn, 1978, *Het Adat Recht Van Bali, Hukum Adat Kekeluargaan Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, halaman 24.

bagi anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya.

Menonjolnya kedudukan anak laki-laki dalam kekeluargaan masyarakat hukum adat Bali disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Magis Religius

Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu anak laki-laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Anak laki-laki dinamakan Putra karena dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah meninggal dunia.¹⁴⁴ Adapun maksud dari pandangan magis religius terhadap anak laki-laki karena hanya anak laki-laki/putera yang dapat mengantarkan arwah orang tuanya yang telah meninggal ke surga, yaitu dengan cara melakukan upacara pemujaan terhadap leluhurnya tersebut.

Menurut hukum adat Bali, pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang terlahir dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun ketentuan tersebut dapat diterobos dengan jalan menjadikan anak perempuan berhak mewaris sebagai anak laki-laki. Terobosan tersebut dalam hukum adat Bali dilakukan dengan jalan menjadikan anak perempuan sebagai *sentana rajeg*, sehingga dalam aspek hukum statusnya sebagai anak laki-laki pada penerimaan harta warisan orang tuanya.¹⁴⁵

Pada *sentana rajeg* penting untuk diperhatikan adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak perempuan yang berkedudukan sebagai *sentana rajeg*, maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga

¹⁴⁴ Nyoman Kadjeng, 1971, *Sarasamurcaya*, Proyek Penerbit: Kitab Suci Hindhu dan Budha, Dirjen Bimas Hindhu-Budha Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta, halaman 124.

¹⁴⁵ Gusti Ketut Sutha, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, halaman 62.

pihak istrinya. Selanjutnya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut dari pihak keluarga istrinya, dengan perkataan lain dalam kekeluargaan dan pewarisan laki-laki tersebut berkedudukan/berstatus sebagai wanita. Adapun bentuk perkawinan laki-laki dengan perempuan *sentana rajeg* disebut kawin *nyeburin*.¹⁴⁶

2. Faktor Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki-laki (garis kepurusa). Seperti telah diuraikan di atas bagi masyarakat hukum adat Bali yang tidak mempunyai anak atau keturunan sama sekali, maka dilakukan perbuatan mengangkat anak. Oleh karena itu hukum adat Bali mengenal lembaga pengangkatan anak. Keluarga yang tidak mempunyai keturunan dapat mengambil anak laki-laki dari keluarga terdekat dengan maksud untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Proses pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, serta dilaksanakan menurut cara atau prosedur tertentu, antara lain: diadakannya upacara pemerasan dan diumumkan dihadapan masyarakat.¹⁴⁷

Anak angkat yang demikian di dalam masyarakat hukum adat Bali disebut *sentana peperasan*. Kedudukan hukum *sentana peperasan* sama dengan anak kandung, baik dalam hubungan hukum kekeluargaan, hukum pewarisan, serta dalam hubungan kemasyarakatan. Jadi *sentana peperasan*

¹⁴⁶Meri Wanyi Rihi, *Op. Cit.*, halaman 26.

¹⁴⁷I Gusti Ketut Sutha, *Op. Cit.*, halaman 61.

atau anak angkat, adalah pelanjut keturunan serta berhak penuh sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya.¹⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hubungan hukum mengangkat anak pada masyarakat hukum adat Bali dapat mengakibatkan status seorang anak berubah. Perubahan ini terjadi dengan perbuatan hukum berganda, yaitu :

1. Perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan anak yang bersangkutan dari ikatan keluarganya. Biasanya dengan jalan pembakaran suatu benang, dan pembayaran secara adat, yaitu berupa seribu kepeng, dan satu stel pakaian wanita.
2. Memasukkan anak itu dalam lingkungan keluarga yang mengangkat dinamakan peras.¹⁴⁹

Sebelum pengangkatan anak berlangsung terlebih dahulu diadakan permufakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari pihak keluarga pengangkat maupun pihak keluarga anak yang diangkat, serta memintakan persetujuan kepada anak yang akan diangkat (apabila sudah dianggap bisa/dapat memberikan persetujuan). Setelah mendapat persetujuan, maka niat itu diumumkan pada seluruh masyarakat hukum adat. Pengumuman tersebut dinamakan siar. Untuk menguatkan tanda pengesahan anak itu, dibuatkan surat oleh kepala desa/lurah yang dinamakan surat peras. Surat Peras itu berisi Berita Acara Pengangkatan Anak yaitu tentang identitas orang tua angkat, orang tua kandung si anak angkat dan si anak angkat sendiri serta pengesahan upacara pengangkatannya, yang fungsinya sebagai surat bukti pengangkatan anak.

Tujuan dari pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, adalah untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat. Akibat dari tujuan ini maka anak

¹⁴⁸Meri Wanyi Rihi, *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁴⁹Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, halaman 121.

angkat sepenuhnya menjadi anggota keluarga yang mengangkat, terutama dalam hal meneruskan kewajiban serta hak orang tua angkat. Adapun hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Dalam perkembangannya pengangkatan anak tidak saja oleh keluarga yang utuh (suami istri), tetapi juga dapat dilakukan oleh janda/duda yang ditinggal mati, dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak keluarga *purusa*.

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah orang tuanya telah diabenkan.¹⁵⁰ Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpencar-pencar dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi.

Pada sistem pewarisan di Bali memang anak angkat terutama laki-laki mendapatkan hak mewaris dari orang tuayang telah mengangkatnya. Berbeda dengan anak angkat perempuan karena perempuan hanya akan mendapatkan hibah dari saudara laki-lakinya. Secara turun menurun melalui sistem patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Bali disini sudah jelas sekali bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.¹⁵¹

Tiap keluarga menginginkan adanya keturunan laki-laki dan berhubungan dengan hal ini terbentuklah lembaga pengangkatan anak di Bali, bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan/anak laki-laki masih ada kesempatan untuk diteruskannya keluarganya yaitu dengan jalan mengangkat anak untuk dijadikan sentana (anak angkat). Dalam hal ini anak angkat di Bali terutama sekali berfungsi sebagai penerus keluarga terutama yang diangkat sebagai anak

¹⁵⁰ Soeripto, 1973, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*, Jember: Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, halaman 49.

¹⁵¹ | Gede Penetje, *Op.Cit.*, halaman 41.

angkat itu ialah anak laki-laki, sekalipun tidak ada larangan mengangkat anak perempuan sebagai anak angkat (mengangkat *panak*, *ngidih panak*, *nuduk panah*, mengambil *sentana*). Sebagai penerus keluarga agar mantap mutlak artinya tidak ada keraguraguan maka haruslah anak angkat ini mempunyai tempat dalam keluarga rumah tangga yaitu rumah tangga orang tua angkatnya, untuk itu anak angkat harus lepas/putus dari keluarga orang tua kandungnya semenjak diadakan upacara memeras jadi perbuatan mengangkat anak berarti melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya, dan sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Karena anak angkat tidak mempunyai hak waris terhadap orang tua kandungnya anak angkat disebut juga nyentanain waris orang tua angkatnya, anak angkat antara lain berkewajiban memelihara orang tua angkat dihari tua dan mengabenkan jenazah orang tua angkat tersebut.¹⁵²

Anak perempuan tunggal yang ditetapkan kedudukan hukumnya sebagai anak laki-laki tersebut di atas bila kawin keluar kehilangan haknya sebagai anak laki-laki/ahli waris.¹⁵³ Pengutamaan garis keturunan laki-laki tersebut hal ini ada hubungannya dengan kepercayaan di muka bahwa anak laki-lakilah yang akan dapat membukakan jalan kesurga untuk arwah orang tuanya/leluhurnya, maka dari itu upacara ngaben (upacara pembakaran jenazah) terutama sekali adalah menjadi kewajiban anak laki-laki kecuali di Tengananpagringsingan jenazah tidak dibakar tetapi cukup ditanam dalam keadaan telanjang bulat serta membujur ke selatan untuk wanita menelungkup, untuk laki-laki menelentang, penguburan jenazah dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru 3 atau 7 harinya dibuatkan upacara untuk itu. Tugas kewajiban anak laki-laki tersebut di atas mungkin

¹⁵² *Ibid.*, halaman 55.

¹⁵³ Soeripto, 1979, *Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ, halaman 59.

menjadi pokok pikiran dari imbangan 1 bagian untuk anak lelaki sebagai warisan dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak perempuan guna dikuasai agar mendapat penghasilan bila anak perempuan ini belum kawin, sebab bila anak perempuan itu kawin (kawin keluar) ini berarti anak perempuan itu telah keluar dari lingkungan keluarganya. Perlu ditegaskan lagi bahwa bagian yang diteruskan kepada anak perempuan itu tidak merupakan warisan tetapi hanya untuk dikuasai saja untuk dapat dinikmatinya.¹⁵⁴

Pengangkatan anak pada Suku Bali yang bersifat kekeluargaan kebapaan (patrilineal) memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung. Soeriptomenjelaskan bahwa setiap keluarga Hindu Bali mempunyai harta/kekayaan keluarga yang berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan/upacara-upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai-nilai magis religius. Selanjutnya disebutkan harta yang tidak mempunyai nilai magis religius antara lain:

1. harta *akas kaya*,
2. Harta *jiwa dana*,
3. Harta *tetatadan*,
4. Harta *druwe gabro*.¹⁵⁵

Adapun pengertian dari harta *akas kaya* adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Pengertian dari harta *jiwa dana* adalah pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan. Pemberian dari

¹⁵⁴ *Ibid.*, halaman 62.

¹⁵⁵ *Ibid.*, halaman 92.

tetatadan adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan, sedangkan barang *druwe gabro* adalah harta yang diperoleh suami isteri dengan cucuran keringat bersama.¹⁵⁶

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kesemuannya itu adalah harta benda/kekayaan yang diperoleh sebelum masuk jenjang perkawinan, sedangkan harta *druwe gabro* adalah harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan (suami isteri). Dengan adanya macam-macam barang dari keluarga sebagaimana tersebut di atas hak-hak anak angkat terhadap harta keluarga orang tua angkatnya, adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Dari kalangan para sarjana hukum adat waris yang berlaku pada suku Bali anak angkat adalah ahli waris harta benda keluarga seperti harta *akas kaya*, harta jiwa, harta *tetatadan*, dan harta *Druwe gabro* dari orang tua angkatnya.¹⁵⁷

Berdasarkan argumentasi di atas, maka apa yang terjadi di Bali tersebut telah menunjukkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Anak angkat laki-laki dalam perspektif agama Hindu Bali mendapat harta warisan selayaknya anak kandung. Karena anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung dengan berbagai persyaratan yang telah dipenuhi oleh orang tua angkat tersebut.

Pemberian warisan kepada anak angkat dalam perspektif agama Hindu Bali tanpa mempertimbangkan jangka waktu berapa lama anak angkat tersebut hidup dalam keluarga angkatnya. Perpindahan kepemilikan harta melalui warisan terjadi saat orang tua angkat tersebut meninggal dunia. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga

¹⁵⁶Meri Wanyi Rihi, *Op. Cit.*, halaman 32.

¹⁵⁷*Ibid.*

berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Dengan ketentuan anak angkat dari clan sendiri mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka. Sebaliknya anak angkatbukan dari clan sendiri hanya mewarisi harta guna kaya (harta pencaharian), sedangkan harta pusaknya kembali kepada asalnya. Anak angkat tersebut tidak berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

Dengan demikian anak angkat di Bali sejak diangkat telah mendapatkan kepastian hukum akan mendapat harta peninggalan orang tua angkatnya. Demikian pula anak angkat tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum sejak ditetapkan sebagai anak oleh orang tua yang mengangkatnya sebagai anak, sehingga harta warisan si orang tua angkat tersebut akan jatuh ke tangan anak angkat.

B. Pembaharuan Hukum Perdata dalam Upaya Perlindungan Hukum kepada Anak Angkat atas Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Orang tua berkewajiban untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, namun apabila salah satu atau kedua orang tua lalai atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya maka kekuasaannya dapat dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua ini diajukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan atas permintaan salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang. Selain itu kekuasaan orang tua dapat dialihkan kepada orang lain yaitu dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setiap peristiwa yang memengaruhi kedudukan hukum seseorang, diwajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru. Akta kelahiran tersebut menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat tersebut diakui oleh Negara sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.

Pewarisan adalah proses penerusan dan pemindahan harta kekayaan material maupun non-material dari generasi yang satu kepada keturunannya. Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa dalam pewarisan itu meliputi unsur-unsur :

1. Subjek, yaitu orang yang akan mewariskan harta bendanya yang disebut pewaris;
2. Ahli waris, yaitu mereka yang digolongkan sebagai orang yang berhak menerima, menikmati, dan mengurus harta warisan yang diterima dari pewaris;
3. Objek warisan, yakni sejumlah harta benda material maupun nonmaterial. Harta mana yang akan diwariskan kepada ahli waris yang disebut harta warisan;
4. Proses pewarisan, yaitu proses dan prosedur tanah itu diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris mereka.¹⁵⁸

Staatsblad1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 12 ayat(1) dari staatsbladini berbunyi, jika suami isteri mengadopsi

¹⁵⁸Harry H. Tuhumury, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *Legal Pluralism*, Vol. 3, No.1, Januari 2013, halaman 121.

seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Menurut Pasal 12 ayat(1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah).

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:“tiap-tiap anak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya.” Pasal ini lebih dititikberatkan kepada ikatan keturunan hubungan darah antara anak dengan orang tua yang dilahirkannya atau dibuahkan sepanjang perkawinan. Perlu diketahui bahwa anak sah mempunyai bagian mutlak dalam warisan dan sesuai dengan bunyi Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antar yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Ordonantie Staatsblad 1917 No. 129 dalam pasal 12 ayat (2) yaitu: jika suami setelah perkawinannya bubar mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak dianggap telah dilahirkan dari perkawinan yang telah dibubar karena kematian. Pada pasal ini pembuat undang-undang ada membedakan antara kata-kata *Uit een* dan *uit het*. Walaupun memang perkawinannya itu pecah karena kematian isterinya. Dengan demikian anak yang diadopsi itu dianggap sebagai anak sah dari si laki-laki itu tapi bukan anak dari bekas isterinya yang telah cerai atau meninggal dunia. Dalam pasal ini juga tidak disebutkan *door*

echscheiding onbonthden (pecah perceraian) karena dengan demikian maka akan diciptakan hubungan antara bekas isteri dengan anak.¹⁵⁹

Dengan demikian menurut Staatsblad 1917 No. 129 bahwa anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Staatsblad ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat (adopsi) adalah bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum Perdata, seseorang dapat mewarisi karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Pada sisi lain anak adopsi dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orangtua angkat. Dikarenakan di dalam pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 telah diatur bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Dalam hal pewarisan, anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdata, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Hal ini karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak adopsi, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak adopsi tersebut. Yakni anak

¹⁵⁹Sumiati Usman, *Op. Cit.*, halaman 140.

adopsi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orang tua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya.

Mengenai hak mewaris antara anak adopsi dengan orangtua kandungnya sendiri, adalah anak adopsi tidak mewaris dari orangtua kandungnya dan begitu pula sebaliknya, karena status anak adopsi tersebut telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat, sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian karena anak adopsi bukan merupakan ahli waris dari orangtua kandungnya sendiri, maka anak adopsi tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua kandungnya tersebut.

Ketentuan tersebut di atas masih juga abu-abu karena terbuka kemungkinan harta warisan akan habis dibagi kepada ahli waris sehingga hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat tentu tidak lagi ada. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalan¹⁶⁰ kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil.

Hukum waris menurut KUH Perdata mengenal peraturan wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :

¹⁶⁰R. Subekti. 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, halaman 28.

“Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”

Menurut Hukum Barat (KUHPerdara) pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut “*legitime portie*”, atau “*wettelijk erfdeel*” (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Tujuan dari pembuatan undang-undang dalam menetapkan *legitimeportie* ini adalah untuk menghindarkan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.

Legitime portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian wasiat (Pasal 913 KUH Perdata). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan “Pancer”). Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Apabila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu-satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang

pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Di dalam Pasal 957 KUHPerdata disebutkan: “ Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.

Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris. Biasanya wasiat membagi harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Dengan demikian didalam hukum Barat telah ditentukan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

Ahli waris menurut surat wasiat (*testamentair erfrecht*) jumlahnya tidak tentu, karena ahli waris ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu wasiat seringkali berisi penunjukan seorang atau beberapa ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, dan mereka tetap akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris seperti halnya ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*).

Dari kedua macam ahli waris tersebut yang diutamakan adalah ahli waris menurut Undang-Undang. Hal itu terbukti dari beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya, antara lain Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara, yang menyebutkan: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewaris atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atau suatu bagian mutlak”.

Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUH Perdata dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUH Perdata). *Legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUH Perdata).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Dalam lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.¹⁶¹

¹⁶¹Ferza Ika Mahendra, “Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur). Tesis. 2008. Program

Pada hubungan pengangkatan anak, hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sekalipun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fikih) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Berdasarkan statemen tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan kalau perlu adanya pembaharuan hukum kewarisan untuk memberikan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum kepada anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pembaharuan hukum itu menyiratkan perlu adanya revisi, inovasi terhadap substansi hukum yang lebih berkemanusiaan, berkeadilan. Menurut Teguh Prasetyo pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.¹⁶²

Seperti diketahui, hukum dibuat oleh Negara dalam kerangka menciptakan keadilan dalam masyarakat yang dipandu oleh keadilan itu sendiri. Tanpa keadilan, hukum tidak dapat mewajibkan pelaksanaan nilai-nilainya. Seperti dinyatakan oleh Luypen, tanpa sifat mewajibkan yang bersumber dari

Magister Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang, halaman 35.

¹⁶²Teguh Prasetyo. 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Setara Press, halaman 5.

keadilan, maka sebuah aturan tidak dapat disebut sebagai hukum.¹⁶³ Oleh karena itu dalam keadilan tersirat membangun kehidupan bersama yang lebih baik, yaitu kehidupan adil dan baik bagi kemanusiaan.

Demikian juga, putusan hakim dianggap adil, meskipun tidak dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Hukum pengadilan juga harus dianggap benar (*waarheid*), karena dibuat oleh hakim sebagai orang yang tahu hukum (*jus curia novit*). Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum kalau tidak adil, demikian juga keadilan tidak dapat tumbuh di luar hukum. Pada sisi lain hukum adalah instrumen penguasa (Negara) untuk mengatur pihak yang dikuasai (masyarakat). Ini berarti Negara bertanggungjawab atas ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menciptakan keadilan, Negara harus membuat aturan hukum yang menguntungkan semua pihak, terutama kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan, dalam kerangka memberikan perlindungan sekaligus menguntungkan bagi kelompok yang lemah.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang

¹⁶³ Bernard L Tanya dkk. tt. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, tp, halaman 150.

boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹⁶⁴

Penting untuk melihat argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Sudiyat terkait dengan pemberian hak atas harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat.¹⁶⁵

Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewarisi barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut pada kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan anak angkat berstatus sama dengan anak kandung, dilihat dari aspek pewarisan anak angkat juga mempunyai hak waris sama dengan anak kandung namun Staatblad 1917 Nomor 129 tidak diatur masalah kewarisan. Anak angkat dalam Staatblad 1917 Nomor 129 dianggap sebagai anak kandung maka kedudukan seorang anak angkat dalam lapangan hukum kewarisan dapat menggunakan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut disebutkan anak kandung termasuk ke dalam anggota keluarga golongan pertama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat empat penggolongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan 1 : Anak-anak dan keturunannya, termasuk suami/isteri;
2. Golongan 2 : Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya;

¹⁶⁴Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 39.

¹⁶⁵Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Kewarisan Sketsa Adat*. Liberty; Yogyakarta, 1981, halaman 67.

3. Golongan 3 : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas dari pewaris;
4. Golongan 4 : Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke enam.

Mengenai penggolongan tersebut, apabila ada ahli waris golongan satu, maka golongan ahli waris yang lain tidak berhak mewaris, apabila ahli waris golongan satu tidak ada, maka ahli waris golongan dua yang berhak mewaris, demikian seterusnya sampai dengan golongan empat. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan. Apabila orang tua angkatnya tersebut tidak mempunyai anak kandung dan kedua orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Mengenai penggantian kedudukan, seorang anak angkat tidaklah berbeda dengan kedudukan seorang anak kandung, sedangkan jika dilihat dari hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka akibat adanya pengangkatan anak adalah terputusnya hubungan kewarisan antara si anak angkat dengan orang tua kandungnya atau saudaranya, dikarenakan masuknya si anak angkat ke dalam keluarga dari orang tua angkatnya.

Pemberian wasiat wajibah atau hibah wasiat kepada anak angkat merupakan salah satu alternatif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Anak angkat yang status hukumnya diakui oleh undang-undang seharusnya diberikan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak dan tidak boleh sama dengan yang diterima oleh anak kandung, namun hak atas harta peninggalan itu tetap harus diberikan.

Terkait warisan, anak angkat dapat mewarisi harta orang tuanya sendiridan juga mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sesuai denganyurisprudensi Mahkamah Agung no.37/k/Sip/1959, tanggal 18 Maret 1959. Padahal ini anak bukanlah ahli waris terhadap barang asal (harta pusaka) orang tuaangkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga,juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat mendapat bagianharta gono-gini tidak mencukupi anak angkatnya, apabila orang tua angkatnyatidak mempunyai anak kandung. Hal ini sesuai dengan putusan Raad JustisiJakarta tanggal 26 Mei 1939 bahwa apabila barang gono-gini tidak mencukupipada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkat, makaanak angkat boleh meminta bagian dari harta asal sehingga menurut keadaandianggap adil.

Apabila dilihat dari berbagai macam yurisprudensi yang pernah diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI sepanjang sejarahnya terkait dengan hak atas harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat, hampir tidak pernah sama karena dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing daerah yang mengajukan gugatan tersebut. Hakim Mahkamah Agung agak gamang untuk memutuskan untuk perkara yang sama dengan putusan yang sama pula, dengan memerhatikan kebiasaan (adat istiadat) daerah setempat. Hal ini pun semakin menunjukkan adanya ketidakkonsistenan para hakim dalam mengambil putusan terkait kasus hak atas harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat.

Kenyataan dan fakta di atas tentunya tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak angkat. Perlunya pembaharuan hukum terkait hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat juga dikarenakan secara yuridis formal Staatsblad 1917 Nomor 129 belum dicabut

dan masih berlaku. Dalam perkara pengangkatan ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 (tentang pengesahan orang tua tunggal (lajang) untuk mengadopsi anak) sebagai batu penguji untuk menyatakan Pasal 5 sampai Pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang mengatur tentang pengangkatan anak tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan tidak berlakunya Staatsblad 1917 Nomor 129, maka diperbolehkan mengangkat anak perempuan menjadi anak angkat karena anak perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda.

Staatsblad tersebut sebenarnya tidak dapat dipergunakan lagi. Pertama, karena setelah Indonesia merdeka sudah tidak ada lagi penggolongan-penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling dan 131 Staatsregeling. Kedua, ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 bersifat diskriminasi. Beberapa ketentuan yang diatur dalam staatsblad 1917 Nomor 129 yang bersifat diskriminasi yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 5 ditentukan bahwa hanya anak laki-laki saja yang boleh diadopsi;
2. Berdasarkan Pasal 6 dikatakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain.

Sejalan dengan perkembangan hukum yang menghendaki agar Warga negara Indonesia yang satu dan integral, tanpa diskriminasi dan bukan warga

negara Indonesia sebagai lanjutan dari Pasal 163 Indische Staatsregeling, maka keturunan Tionghoa tidak lagi terikat Staatsblad 1917 Nomor 129.

Perlindungan hukum dalam situasi seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak angkat. Hukum harusnya lahir untuk memanusiakan manusia, atau dalam arti mendudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka bumi. Hukum bukan untuk membedakan orang karena status kelahirannya status perkawinan orang tuanya atau statusnya sebagai anak kandung atau pun anak angkat. Anak adalah anak yang hak-haknya harus dilindungi oleh Negara. Dalam sudut pandang hak asasi, setiap anak yang lahir dengan tidak mempedulikan cara dan bagaimana proses kelahiran yang terjadi, negara dan hukum harus memberikan perlindungan yang adil dengan cara menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang.

Pada sisi perlindungan hukum bagi anak angkat terhadap hak atas harta peninggalan orang tua angkat maka yurisprudensi Mahkamah Agung yang sering kali disparitas sehingga corak perlindungan hukumnya menjadi kabur dan masih abu-abu, maka perlu segera diatur dalam sebuah regulasi yang komplit dan konkrit sebagai sebuah pembaharuan hukum waris yang bercorak Indonesia. Pembaharuan hukum yang dimaksud harus sesuai dengan corak Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, halaman 8.

Pembaharuan itu tidak selamanya selalu mengandung pengertian “perubahan”, namun dapat juga untuk menambah kualitas (kedalaman) hakikat dari reformasi hukum, sehingga perlu ditekankan bahwa dalam konsep “reformasi” itu harus dikandung suatu makna perubahan “menuju ke kualitas yang lebih baik”.¹⁶⁷ Dalam hal pembaharuan hukum perdata perlu kiranya menyatukan tiga stelsel hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (baca BW), sehingga didapat sebuah kodifikasi hukum yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

Menurut hukum Islam dan hukum adat anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah, hibah atau dengan cara waris (biasanya dalam hukum adat), maka hukum perdata yang tidak mengenal lembaga anak angkat sehingga anak angkat tidak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, perlu untuk dirubah ketentuannya, mengingat telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool social engineering*) seharusnya melihat bahwa perubahan sosial merupakan sebuah keniscayaan. Berdasarkan hal itu maka menjadi sesuatu yang sangat wajar apabila ketentuan hukum perdata tersebut dirubah.

Kedudukan anak angkat yang selama ini dalam perspektif hukum perdata selalu tidak mendapat hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka dalam konteks kekinian perlu untuk diberikan hak atas harta peninggalan orang tuanya meskipun bentuknya bukan warisan, namun dalam bentuk hibah atau wasiat yang kepastian hukumnya harus mendapat legalitas melalui undang-undang. Kepastian hukum tersebut menjadi urgen untuk dijadikan pertimbangan

¹⁶⁷Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 46.

hukum, mengingat anak angkat selalu dimarginalkan oleh hukum dikarenakan statusnya yang bukan merupakan ahli waris.

Lemahnya kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut, anak angkat hanya mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya apabila ada wasiat dari orang tua angkatnya. Apabila tidak ada wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak akan mendapatkan harta peninggalan apa pun dari orang tua angkatnya. Pada posisi seperti inilah perlu pembaharuan hukum perdata terkait hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Penguatan kedudukan anak angkat tersebut sebenarnya hanya memperkuat isi dari ketentuan hukum perdata di mana anak angkat hanya mendapat bagian jika ada wasiat.

Pemikiran lain terkait perlunya pembaharuan hukum perdata dalam bidang kewarisan anak angkat adalah fakta bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki konsep pengertian dan akibat hukum yang multitafsir, konsep pengangkatan anak dalam Staatblad 1917 nomor 129 menjadikan anak angkat berstatus sama dengan anak kandung di sisi lain konsep pengangkatan anak dalam Hukum Islam anak angkat hanya sebagai anak asuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, konsep pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak mengalihkan hak anak dari kekuasaan orang tua tanpa dijadikan anak kandung.

Adanya dualisme konsep tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula konsep yang pertama akan berakibat hukum anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua angkat sehingga memiliki hak dan kewajiban

sebagai anak kandung. Dari konsep kedua, anak angkat bersifat pengasuhan saja yang berakibat hukum tidak menjadi anak kandung dari orang tua angkat.

Pascaproklamasi, Indonesia memasuki era tata hukum nasional, namun sebagian hukum era kolonial masih berlaku, antara lain perihal pengangkatan anak. Hukum warisan kolonial tersebut berlaku di samping hukum adat dan hukum Islam. Keberagaman sistem hukum tersebut berakibat pada perbedaan konsepsi pengangkatan anak, yang kemudian menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan. Adanya dualisme konsep dan akibat hukum pengangkatan anak tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum pengangkatan anak masih multitafsir dan tidak pasti akibat hukumnya. Untuk itulah perlu diadakan unifikasi hukum pengangkatan anak sehingga hukum pengangkatan anak tidak lagi multitafsir dan dapat menjamin kepastian hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat hasil kesimpulan:

1. Bahwa didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah

hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya ditujukan untuk pemeliharaan saja bukan merubah nasab si anak sehingga merubah statusnya menjadi anak kandung yang mengangkatnya.

2. Bahwa anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya, tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime portie* (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Dengan demikian anak angkat tidak memperoleh kepastian hukum terkait haknya terhadap 119 inggalan orang tua angkatnya, karena masih tergantung kepada pihak lain.
3. Bahwa dalam agama Hindu Bali, anak angkat laki-laki kedudukannya sama dengan anak kandung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak angkat laki-laki berhak memperoleh warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Besaran jumlah harta warisan yang diterima oleh anak angkat laki-laki dalam perspektif agama Hindu Bali, sama besarnya dengan yang diterima oleh anak kandung. Berbeda hanya dengan beberapa keputusan Mahkamah Agung RI, yang selalu terjadi disparitas yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah setempat, yang mengakibatkan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang belum ada kepastian hukum, maka layak untuk dilakukan

pembaharuan hukum perdata agar ada perlindungan dan kepastian hukum atas hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dengan merevisi ketentuan hukum perdata yang sifatnya diskriminatif tersebut dengan memberikan porsi yang pasti kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Bahwa sebaiknya dan secepatnya pihak legislatif harusnya membuat regulasi baru terkait dengan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dengan berasaskan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum.
2. Sebaiknya ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dilegitimasi menjadi undang-undang, karena selama ini ketentuan tersebut hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan oleh Instruksi Presiden.
3. Sebaiknya pihak pemerintah bersama pihak legislatif segera merumuskan ketentuan yang menghilangkan diskriminasi terhadap hak anak angkat terutama yang berkaitan dengan harta peninggalan orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Dahlan (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,.
- Afandi, Ali, 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali Affandi, Ali, Tanpa tahun. *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdara*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Ali, Muhammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Pengadilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3.

- Amanat, Anisitus, 1989, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal hukum Perdata BW*, Jakarta: CV Rajawali.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Artadi, Ketut, 1980, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post,.
- Ashshofa, Burhan, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bushar, Muhammad. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darajat, Zakiah, et.al. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Devita Pernamasari, Irma, 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan. 122
- Fahmi Al Amruzi, M., 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Fathurrahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif.
- Gautama, Sudargo, 1981. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman, 1996. *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Hanitijo Soemitro, Rony, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad, 1999, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pusaka Rizki.
- Joko Subagyo, P. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kadjeng, Nyoman, 1971, *Sarasamurcaya*, Proyek Penerbit: Kitab Suci Hindhu dan Budha, Dirjen Bimas Hindhu-Budha Denpasar, Departemen Agama RI, Jakarta.

- Kamil, Ahmad, dan M. Fuzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Katjasungkana, Nursyahbani, 2003. *Bunga Rampai Catatan Sipil*. Jakarta: Primamedia Pustaka.
- Korn, V.E., 1978, *Het Adat Recht Van Bali, Hukum Adat Kekeluargaan Bali*, terjemahan oleh I Gede Wayan Pangkat, Denpasar: Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum UNUD, Denpasar.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2003. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Lubis, M. Solly, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Magnis Suseno, Franz. 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Meliala, Djaja S.. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir,. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar, 1989. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cet. ke-1. Jakarta : PT. Pradnya, Paramita.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Amin Husein, 2102. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nuruddin, Amiur, 2010. *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah*. Bandung: Citapustaka Media,,
- Pandika, Rusli, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panetje, I Gede, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: Kayumas.
- Perangin, Efendi. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh, 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Setara Press.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Pudja, I Gde, 1977, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: Mayasari.
- Rahmad Budiono, A. 1999. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Roihan A., "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah", dalam Cik Hasan Bisri (ed). 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi. Cet. 1.
- Saiban, Kasuwi, 2011. *Kewarisan Dalam Islam*. Malang: Unmer Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cetakan Pertama.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Satrio, J. 2005. *Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Setyowati Soemitro, Irma, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Shidik, Safiudin, 2004. *Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Inti media Citra Nusantara.

- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14.
- Soepomo, R., 2000, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo, R., dalam M.Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Soeripto, 1973, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali*, Jember: Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Soeripto, 1979, *Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Fakultas Hukum UNEJ.
- Soeroso, 2007, *Perbandingan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R.,. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4.
- Soeroso. 2007. *Perbandingan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo, 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., 1990. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudiyat, Imam ,1981. *Hukum Kewarisan Sketsa Adat*. Liberty; Yogyakarta.
- Sukerti, Nyoman, 2002, *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar : Udayana University Press.
- Sunggono, Bambang, 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Eman, 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers,.
- Suseno, Franz Magnis, 2001. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutha, I Gusti Ketut, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani, Riodwan, 1989. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

- Syamsul Alam, Andi, Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Media Group Bekerja Sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tanya, Bernard, dkk. tt. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, tp,.
- Ter Haar, B., 1985. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia, Edisi IV. Cet. Ke-1.
- Usman, Suparman, 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Van Apeldoorn, L.J. dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiana, I Ketut, 2007, *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Wignjodipoero, Soerojo,. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wirjono Prodjodikoro, R., 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Witanto, D.Y., 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia.
- Zaini, Muderis, 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Akasara.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 38.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998 M.

Tesis, Disertasi

Ferza Ika Mahendra, "Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur). *Tesis*. 2008. Program Magister Studi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Meri Wanyi Rihi, "Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Dan Pengadilan Negeri Denpasar). *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Tengku Erwinsyahbana, "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan HukumKeluarga Nasional". *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 2012.

Jurnal

Habiburrahman, "Polemik Pemberian Harta Waris Melalui Wasiat Kepada Anak Angkat", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 16, No. 2, Agustus 2014.

Harry A. Tuhumury, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam" dalam *Legal Pluralism*, Vol. 3, No.1, Januari 2013.

I Wayan Martha, I Nyoman Surtana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Akibat Konversi Agama Hindu Ke Agama Kristen (Di Desa Pakraman Taro Kaja)Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar), dalam *Widya WrettaJurnal Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Mei 2017.

Mahmutarom Harun Al Rasyid, "Perkembangan Makna Hukum dan Keadilan Islam dalam Sejarah Pemikiran Prof. Sri Rejeki Hartono, SH", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.2 No. 2 September, Unissula, Semarang, 2007.

- Mochammad Taqrib, "Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Waris di Indonesia", dalam *Jurnal Pusaka*, Edisi Januari-Juni 2014.
- Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" dalam *Jurnal Qiyas*, Vol.1 No.1 Tahun 2016.
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Pagar, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 54. Tahun 2001.
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 April 2009.
- Rifyal Ka'bah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, dalam *Suara Uldilag*, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007.
- Satria Effendi M. Zein, "Analisis Fiqih Analisis Yuripsrudensi", dalam *Mimbar Hukum* No. 37 Thn. IX, 1998.
- Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", dalam *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4 Oktober 2013.
- Zeila Mochtar, "Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata", dalam *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.

Situs Internet

- Agus Wahyudi, "Munculnya Pengertian Keadilan Sosial", dalam www.pps.ugm.ac.id. Diakses tanggal 24 November 2017.
- Ahmad Kholil, "Menyoal Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice", dalam www.badilag.net., diakses tanggal 2 Februari 2018.
- Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui www.statushukum.com, diakses tanggal 25 November 2017.
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", dalam <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/download>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.
- Evi Krisitiani, "Hak Waris Anak Angkat menurut KHI", melalui www.unnes.ac.id, diakses tanggal 10 Desember 2017.

Ghina Kartika Ardiyati, Liliek Istiqomah, Yusuf Adiwibowo, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", melalui www.unej.ac.id, diakses tanggal 25 Oktober 2017.

Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Maret 2016.

Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 25 April 2017.

Muhammad Ali Safaat, "Pemikiran Keadilan, (Plato, Aristoteles dan John Rawls)", dalam www.anomalisemesta.com. diakses tanggal 5 Februari 2018.

Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan" dalam www.ojs.unud.ac.id, diakses tanggal 12 Desember 2017.

Ugun Guntari, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional", melalui <http://www.ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/>, diakses tanggal 26 Agustus 2017.